



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR
030 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

b. bahwa ...

- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 030 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2020, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan prioritas sasaran pembangunan, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 030 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 121 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pedoman dan Tata Cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 07);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 610 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 28);
15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 030 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 030 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 030 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

5. Perangkat ...

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
7. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode waktu tersisa dalam 1 (satu) tahun berjalan.
8. Perubahan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat Perubahan PPAS adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
9. Perencanaan adalah serangkaian proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahap I pada Tahun 2020.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2020 memuat dokumen perubahan perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020 Tahap I.
- (2) Dokumen perubahan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. perubahan rencana kerja dan pendanaan.
- (3) Rincian dokumen perubahan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2020 dijadikan:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dan DPRD dalam penyusunan perubahan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Perubahan Tahun 2020 untuk menyusun APBD Perubahan 2020 Tahap I; dan
- b. pedoman bagi Perangkat Daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Tahap I.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 030 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 030 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 masih berlaku, kecuali:

- a. Dinas Pendidikan Kota Bandung menyangkut pembiayaan bagi siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan pada Program Bantuan Pendidikan serta pergeseran pada Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. Dinas Kesehatan Kota Bandung menyangkut jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin pada Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung menyangkut belanja Bantuan Sosial dan Belanja Barang dan Jasa;
- d. Inspektorat Kota Bandung menyangkut belanja Pembangunan Gedung Kantor pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyangkut Revitalisasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Sekelimus pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- f. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan menyangkut Penataan Taman Tegal Lega pada Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
- g. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana menyangkut Pengadaan Mobil Pancar pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana lainnya.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Maret 2020
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H

Pembina Tingkat I

NIP.19650715 198603 1 027

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 10 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 MARET 2020

PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA BANDUNG TAHUN 2020

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 10 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 Maret 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN 2020 TAHAP I

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 dapat disusun dan diselesaikan.

Dokumen Perubahan Kedua RKPD Tahun 2020 disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Kedua Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Perubahan Kedua RKPD Tahun 2020 selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (RKUPA) dan Rancangan Prioritas Program dan Anggaran Sementara Perubahan (RPPAS-P) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) dan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) khususnya pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana serta Inspektorat.

Demikian dokumen Perubahan Kedua RKPD Tahun 2020 ini disusun dan semoga dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan program/kegiatan dengan harapan dapat berkontribusi dalam mewujudkan Visi Kota Bandung sebagai Kota yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, Maret 2020

WALI KOTA BANDUNG

ODED MOHAMAD DANIAL

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GRAFIK | vi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1 Latar Belakang | I-1 |
| 1.2 Landasan Hukum | I-3 |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah | I-7 |
| 1.4 Sistematika Dokumen Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020 | I-7 |
| 1.5 Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan | I-9 |
| 1.5.1 Maksud | I-9 |
| 1.5.2 Tujuan | I-9 |
| 1.5.3 Dasar Pertimbangan | I-9 |
| | |
| BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2019..... | II-1 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 | II-1 |
| 2.2 Permasalahan, Solusi, dan Rekomendasi | II-17 |
| 2.3.1 Permasalahan | II-17 |
| 2.3.2 Solusi | II-17 |
| 2.3.3 Rekomendasi | II-18 |
| | |
| BAB III GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH..... | III-1 |
| 3.1 Asumsi Keuangan Daerah | III-1 |
| 3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Global | III-1 |
| 3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Nasional | III-2 |
| 3.1.3 Kondisi Ekonomi Jawa Barat | III-7 |

| | | |
|---------------|---|-------------|
| 3.1.4 | Kondisi Ekonomi Kota Bandung | III-10 |
| 3.2 | Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah | III-24 |
| 3.2.1 | Kebijakan Pendapatan Daerah | III-25 |
| 3.2.2 | Perubahan Kebijakan Belanja Daerah | III-27 |
| BAB IV | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | IV-1 |
| 4.1 | Tujuan dan Sasaran Pembangunan | IV-1 |
| 4.2 | Prioritas dan Sasaran Pembangunan | IV-8 |
| 4.2.1 | Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi | IV-10 |
| 4.2.2 | Keterkaitan dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 | IV-15 |
| BAB V | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH | V-1 |
| 5.1 | Pagu Indikatif Pendanaan Daerah | V-1 |
| 5.1.1 | Belanja Tidak Langsung | V-2 |
| 5.1.2 | Belanja Langsung | V-5 |
| 5.2 | Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020 | V-8 |
| BAB VI | PENUTUP | VI-1 |

LAMPIRAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|---------|
| Tabel 2.1 | Evaluasi Program Pembangunan Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 | II-2 |
| Tabel 3.1 | Indikator Makro Kota Bandung Tahun 2014 – 2019 | III-23 |
| Tabel 3.2 | Rincian Kebijakan Pendapatan pada APBD Tahun 2020, Perwal Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2020 dan Proyeksi Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020 | III-26 |
| Tabel 3.3 | Perubahan Kebijakan Belanja Urusan Pendidikan untuk Siswa RMP SD dan SMP | III-29 |
| Tabel 3.4 | Perubahan Kebijakan Belanja Urusan Pendidikan untuk untuk Pemenuhan Fasilitas Pembiayaan bagi Siswa RMP SMA/K dan Mahasiswa | III-32 |
| Tabel 3.5 | Perubahan Kebijakan Belanja Urusan Kesehatan | III-37 |
| Tabel 3.6 | Rincian Kebijakan Belanja pada APBD Tahun 2020, Perwal Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2020 dan Proyeksi Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020 | III-39 |
| Tabel 3.7 | Rincian Kebijakan Pembiayaan Daerah Kota Bandung pada APBD Tahun 2020, Perwal Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2020 dan Proyeksi Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020 | III.-40 |
| Tabel 4.1 | Tujuan dan Sasaran Pembangunan Berdasarkan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023..... | IV-5 |
| Tabel 4.2 | Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020 | IV-12 |
| Tabel 4.3 | Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020 dengan Tujuan SDG's | IV-13 |
| Tabel 4.4 | Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020 | IV-14 |
| Tabel 4.5 | Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 | IV-15 |
| Tabel 4.6 | Target Kinerja Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2020 pada RPJMD Kota Bandung 2018-2023..... | IV-16 |
| Tabel 5.1 | Rekapitulasi Pagu Belanja Tidak Langsung Pada | V-3 |

| | | |
|-----------|---|-----|
| | Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020..... | |
| Tabel 5.2 | Rekapitulasi Pagu Indikatif Belanja Langsung Perangkat Daerah pada Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020 | V-6 |

DAFTAR GRAFIK

| | | |
|------------|--|--------|
| Grafik 3.1 | Pola Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2014–2023 dengan Jawa Barat dan Nasional (%) sampai dengan tahun 2023 | III-10 |
| Grafik 3.2 | Struktur Ekonomi Kota Bandung Tahun 2018..... | III-12 |
| Grafik 3.3 | Sektor Ekonomi Penyebab Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bandung | III-13 |
| Grafik 3.4 | Inflasi di Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2014 s.d. 2018..... | III-16 |
| Grafik 3.5 | Sumber Inflasi di Kota Bandung | III-17 |
| Grafik 3.6 | Perbandingan Gini Rasio Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional | III-19 |
| Grafik 3.7 | Perbandingan Penduduk Miskin Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional | III-20 |
| Grafik 3.8 | Perbandingan IPM Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional | III-22 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 343 ayat (1) menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

1. pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.

2. Pasal 160 ayat (2) sampai dengan (4), disebutkan bahwa pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek berkenaan serta objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
3. Pasal 162 ayat (1) disebutkan bahwa keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Sesuai dengan landasan yuridis tersebut serta memperhatikan hasil evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap kinerja tahun 2019 yang ditindaklanjuti dengan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, terdapat ketidaksesuaian antara rencana program dan kegiatan urusan pendidikan dan urusan kesehatan yaitu tidak terpenuhinya pembiayaan bagi siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) SD, SMP, SMA/K dan mahasiswa yang mengakibatkan siswa tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan, serta masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan jaminan pembiayaan kesehatan yang dapat mengganggu kualitas hidup masyarakat. Hal ini diakibatkan karena kurang tepatnya alokasi anggaran pada tahun 2020 yang menempatkan pos anggaran RMP dan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat pada anggaran Belanja Langsung.

Disamping hal-hal diatas, fenomena merebaknya wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia, diperlukan adanya respon tanggap dari pemerintah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa. Hal ini sejalan dengan arahan presiden agar merealokasikan dan merefungsionalisasi anggaran kementerian / lembaga dan daerah, fokus untuk menangani masalah yang muncul guna mengantisipasi, mencegah dan menangani penyebaran Covid-19 yang merupakan kondisi darurat.

Dari penjelasan sebagaimana diuraikan diatas, maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyusunan Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
18. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2020;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ke Tiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07);
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);
30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);

31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 12);
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
34. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020;
35. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah yang disusun berdasarkan pada RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023, RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, dan RPJMN tahun 2015-2020.

Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan pagu indikatif dengan mempertimbangkan sumber dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN KEDUA RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2020

Sistematika Dokumen Perubahan Kedua Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan penyusunan Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020, yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen perubahan Kedua RKPD, maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan.

BAB 2 EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2019

Bab ini menguraikan tentang hasil evaluasi Pendidikan dan Kesehatan tahun berjalan dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2019 di urusan Pendidikan dan Kesehatan serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB 3 GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang perubahan asumsi keuangan daerah, kebijakan dan kondisi ekonomi global, kondisi ekonomi nasional, kondisi perekonomian Jawa Barat, kondisi perekonomian Kota Bandung, asumsi dasar kebijakan keuangan daerah, serta perubahan kebijakan keuangan daerah yang meliputi kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020

Bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, serta prioritas pembangunan daerah tahun 2020.

BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang perubahan dan pergeseran alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Kedua RKPD Tahun 2020.

BAB 6 PENUTUP

Bab ini memuat penutup dan kaidah pelaksanaan dari Perubahan Kedua RKPD Tahun 2020.

1.5 MAKSUD, TUJUAN, DAN DASAR PERTIMBANGAN

1.5.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020 adalah sebagai upaya solusi untuk mengakomodir kebutuhan pemenuhan pembiayaan bagi siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) SD, SMP, SMA/K dan mahasiswa serta pemenuhan jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat Kota Bandung.

1.5.2 Tujuan

Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020 bertujuan untuk :

1. Memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap penyelenggaraan urusan pendidikan dan kesehatan;
2. Sebagai acuan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bandung Tahun 2020, sebagai dasar dari penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bandung Tahun 2020.

1.5.3 Dasar Pertimbangan

Dasar pertimbangan dalam penyusunan Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

Pada APBD Tahun 2019, terdapat Kegiatan Pemberian Bantuan bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) pada Dinas Pendidikan Kota Bandung berkaitan dengan bantuan pendidikan siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) SD, SMP, SMA/K dan mahasiswa. Berdasarkan evaluasi tahun 2019, anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan. Sebagai dampak dari tidak terealisasinya kegiatan tersebut menyangkut resiko sosial terhadap siswa dan mahasiswa yang terancam tidak dapat melanjutkan sekolah, dapat dikatakan sebagai keadaan darurat.

2. Urusan Kesehatan

Kesehatan adalah faktor terpenting yang harus dimiliki oleh manusia agar dapat berkontribusi positif dalam kehidupan. Gangguan kesehatan yang menimpa seseorang berpotensi mengganggu produktivitas orang tersebut dalam melakukan berbagai aktivitas baik aktivitas ekonomi, sosial, kemasyarakatan, maupun aktivitas lainnya. Kondisi gangguan kesehatan akan lebih memberatkan lagi apabila menimpa kelompok masyarakat miskin. Keberadaan Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan memberikan kontribusi yang cukup signifikan karena pemerintah menyediakan anggaran yang cukup memadai bagi masyarakat miskin untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan.

Meskipun demikian terdapat beberapa pelayanan kesehatan yang tidak dapat difasilitasi oleh BPJS Kesehatan tapi sangat mungkin menimpa masyarakat miskin. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau keracunan alkohol. Apabila ada masyarakat miskin yang mengalami KDRT dan harus mendapat perawatan rumah sakit, mereka tidak akan mendapat bantuan dana dari BPJS Kesehatan padahal mereka sudah menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan.

Oleh karena itu pemerintah Kota Bandung menyediakan anggaran khusus jaminan pembiayaan atau Anggaran Jaminan Pembiayaan Masyarakat Miskin untuk kasus-kasus yang menimpa masyarakat miskin akan tetapi tidak dapat dibebankan pembiayaannya kepada BPJS.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2019

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2019

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bertujuan untuk memastikan perencanaan diimplementasikan secara konsisten sehingga dapat diperhitungkan pemanfaatan sumberdaya secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk perbaikan kebijakan dan perencanaan. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Evaluasi perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi pada Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020, difokuskan pada urusan pendidikan dan urusan kesehatan serta urusan lingkungan hidup, urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Fungsi Penunjang Lainnya sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Evaluasi Program Pembangunan Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

| No. | Urusan/ Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2019 | | | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2020 | | Perangkat Daerah | Keterangan |
|----------|---|--|--------|---|----------------------|------------------------------|---|--|--|------------------|---|
| | | | | Target Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2019 | Tingkat Realisasi Tahun 2019 | | Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2020 | Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2020 | | |
| | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | |
| 1 | Urusan Pendidikan | | | | | | | | | | |
| 1 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | % | 57,00 | 100,00 | 175,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pendidikan | |
| 2 | Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SD | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | % | 102,13 | 102,14 | 100,01 | - | - | - | Dinas Pendidikan | Program ini pada tahun 2020 digabung dengan Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar |
| 3 | Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | % | 103,11 | 103,13 | 100,02 | - | - | - | Dinas Pendidikan | Program ini pada tahun 2020 digabung dengan Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar |
| 4 | Program Inovasi Pendidikan | Presentasi Inovasi Pendidikan yang Dimanfaatkan Untuk Pelayanan Pendidikan | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Dinas Pendidikan | Program ini pada tahun 2020 digabung dengan Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar |
| 5 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | Tingkat Ketepatan Manajemen Pelayanan Pendidikan | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Dinas Pendidikan | Program ini pada tahun 2020 digabung dengan Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar |

| No. | Urusan/ Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2019 | | | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2020 | | Perangkat Daerah | Keterangan |
|-----|--|--|--------|---|----------------------|------------------------------|---|--|--|------------------|--|
| | | | | Target Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2019 | Tingkat Realisasi Tahun 2019 | | Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2020 | Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2020 | | |
| 6 | Program Pendidikan Non Formal | Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan | |
| 7 | Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan | Program ini ada di tahun 2020 dan merupakan gabungan dari Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SD, Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP, Program Inovasi Pendidikan dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan |
| | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | | |
| | | Presentasi Inovasi Pendidikan yang Dimanfaatkan Untuk Pelayanan Pendidikan | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | | |
| | | Persentase manajemen pelayanan pendidikan yang dimanfaatkan | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | | |
| 8 | Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | Persentase sekolah yang difasilitasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | % | 100 | 103.92 | 103.92 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan | |
| 9 | Program Bantuan Pendidikan | Angka Putus Sekolah SD | % | - | - | - | 0,01 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan | Program ini ada di tahun 2020 dan merupakan gabungan dari Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD dan Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP |
| | | Persentase siswa miskin SD yang mendapatkan bantuan pendidikan. | | - | - | - | 100 | 100 | 100 | | |
| | | Angka Putus Sekolah SMP | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | | |

| No. | Urusan/ Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2019 | | | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2020 | | Perangkat Daerah | Keterangan |
|-----|--|--|--------|---|----------------------|------------------------------|---|--|--|------------------|--|
| | | | | Target Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2019 | Tingkat Realisasi Tahun 2019 | | Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2020 | Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2020 | | |
| | | Persentase siswa miskin SMP yang mendapatkan bantuan pendidikan. | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | | |
| | | Persentase peserta didik dan mahasiswa berprestasi yang mendapat bantuan pendidikan. | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | | |
| | | Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan | |
| 10 | Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD | Angka Putus Sekolah SD pendidikan gratis | % | 0.01 | 0.01 | 100 | - | - | - | Dinas Pendidikan | Program ini pada tahun 2020 digabung dengan Program Bantuan Pendidikan |
| | | Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi pendidikannya | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | | |
| 11 | Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP | Angka Putus Sekolah SMP pendidikan gratis | % | 0.02 | 100 | 100 | - | - | - | Dinas Pendidikan | Program ini pada tahun 2020 digabung dengan Program Bantuan Pendidikan |

| No. | Urusan/ Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2019 | | | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2020 | | Perangkat Daerah | Keterangan |
|----------------------------|---|--|--------|---|----------------------|------------------------------|---|--|--|------------------|---|
| | | | | Target Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2019 | Tingkat Realisasi Tahun 2019 | | Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2020 | Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2020 | | |
| II Urusan Kesehatan | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program Pola Pengelolaan UPT. Kesehatan | Persentase fasilitas kesehatan pemerintah dan tata laksana keuangan yang sehat | % | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | Dinas Kesehatan | |
| 2 | Program Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Bidang Kesehatan | Persentase puskesmas dengan tatalaksana BLUD yang sehat | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Dinas Kesehatan | program ini berubah nomenklatur menjadi Program Pengelolaan UPT Kesehatan |
| 3 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase tingkat kesehatan keluarga | % | - | - | - | 79,24% | 79,24% | 100% | Dinas Kesehatan | Indikator ini perubahan dari indikator Persentase Pencapaian Pelayanan Kesehatan pada Bayi, Balita, Anak Remaja, Ibu dan Lansia |
| | | Persentase masalah gizi ditangani sesuai standar | % | - | - | - | 100% | 100% | 100% | Dinas Kesehatan | Indikator ini perubahan dari Indikator Penanganan Masalah Gizi Buruk |
| | | Persentase penanganan masalah gizi buruk | % | 95% | 100 | 105,26 | - | - | - | Dinas Kesehatan | indikator ini berubah menjadi persentase masalah gizi ditangani sesuai standar pelayanan kesehatan |

| No. | Urusan/ Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2019 | | | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2020 | | Perangkat Daerah | Keterangan |
|-----|---|--|--------|---|----------------------|------------------------------|---|--|--|------------------|--|
| | | | | Target Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2019 | Tingkat Realisasi Tahun 2019 | | Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2020 | Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2020 | | |
| | | Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia | % | 85% | 83,46 | 105,26 | - | - | - | Dinas Kesehatan | indikator ini berubah menjadi persentase tingkat kesehatan keluarga |
| 4 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Cakupan kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri | % | 8,61 | 23,18 | 105,26 | 9,6 | 9,6 | 100% | Dinas Kesehatan | |
| | | Cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga | % | 67,85 | 67,88 | 105,26 | 67,9 | 67,9 | 100% | Dinas Kesehatan | |
| 5 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Cakupan pelayanan kesehatan lansia | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Dinas Kesehatan | program ini dihilangkan bergabung dengan program upaya kesehatan masyarakat dengan indikator persentase tingkat kesehatan keluarga |

| No. | Urusan/ Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2019 | | | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2020 | | Perangkat Daerah | Keterangan |
|-----|--|---|--------|---|----------------------|------------------------------|---|--|--|------------------|---|
| | | | | Target Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2019 | Tingkat Realisasi Tahun 2019 | | Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2020 | Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2020 | | |
| 6 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Upaya Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga | Persentase akses penduduk terhadap sanitasi dasar | % | 75 | 64,02 | 85 | - | - | - | Dinas Kesehatan | Program ini dihilangkan bergabung dengan program pengembangan lingkungan sehat dengan indikator persentase rekomendasi IKL yang ditindaklanjuti |
| | | Persentase sarana kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat | % | 40 | 48,37 | 121 | - | - | - | Dinas Kesehatan | Program ini dihilangkan bergabung dengan program pengembangan lingkungan sehat dengan indikator persentase rekomendasi IKL yang ditindaklanjuti |
| 7 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persentase rekomendasi IKL yang ditindaklanjuti | % | - | - | - | 100% | 100% | 100% | Dinas Kesehatan | Program ini dimulai Tahun 2020 dan merupakan perubahan nomenklatur dari Program Pengembangan lingkungan sehat, upaya kesehatan kerja dan kesehatan olahraga |

| No. | Urusan/ Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2019 | | | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2020 | | Perangkat Daerah | Keterangan |
|-----|--|--|--------|---|----------------------|------------------------------|---|--|--|------------------|---|
| | | | | Target Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2019 | Tingkat Realisasi Tahun 2019 | | Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2020 | Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2020 | | |
| 8 | Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat | Persentase balita gizi buruk yang ditangani | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Dinas Kesehatan | program ini dihilangkan bergabung dengan program upaya kesehatan masyarakat dengan indikator persentase tingkat kesehatan keluarga Persentase masalah gizi ditangani sesuai standar pelayanan kesehatan |
| | | Persentase RW Siaga Aktif | % | 47,64 | 59,21 | 124,29 | - | - | - | Dinas Kesehatan | program ini dihilangkan bergabung dengan program upaya kesehatan masyarakat dengan indikator persentase tingkat kesehatan keluarga |
| 9 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar | % | 37,5 | 37,5 | 100 | 38,59 | 39 | 100% | Dinas Kesehatan | |

| No. | Urusan/ Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2019 | | | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2020 | | Perangkat Daerah | Keterangan |
|-----|--|---|--------|---|----------------------|------------------------------|---|--|--|------------------|---|
| | | | | Target Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2019 | Tingkat Realisasi Tahun 2019 | | Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2020 | Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2020 | | |
| 10 | Program Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan | Cakupan fasilitas kesehatan primer yang dibina | % | 65 | 65 | 100 | - | - | - | Dinas Kesehatan | Program ini dihilangkan bergabung dengan program standarisasi pelayanan kesehatan dengan indikator persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar |
| | | Cakupan fasilitas kesehatan rujukan yang dibina | % | 80 | 80 | 100 | - | - | - | Dinas Kesehatan | Program ini dihilangkan bergabung dengan program standarisasi pelayanan kesehatan dengan indikator persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar |
| 11 | Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan | Cakupan pelayanan laboratorium kesehatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | Dinas Kesehatan | |
| 12 | Program Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu | Cakupan penanggulangan gawat darurat terpadu | % | 1,3 | 1.04 | 80% | 1,60% | 1,60% | 100% | Dinas Kesehatan | |

| No. | Urusan/ Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2019 | | | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2020 | | Perangkat Daerah | Keterangan |
|-----|---|--|--------|---|----------------------|------------------------------|---|--|--|--|------------|
| | | | | Target Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2019 | Tingkat Realisasi Tahun 2019 | | Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2020 | Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2020 | | |
| 13 | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | Cakupan pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan | % | 100 | - | - | - | - | Dinas Kesehatan | Program ini dihilangkan dan dipindahkan ke Program pelayanan BLUD pada RSKIA | |
| 14 | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata | Persentase Unit Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang memenuhi standar pelayanan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | Dinas Kesehatan | |
| 15 | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata | Persentase sarana prasarana kesehatan dalam kondisi baik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | Dinas Kesehatan | |
| 16 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah | Cakupan Pelayanan BLUD | % | 40,3 | 40,3 | 100 | 75 | 75 | 100% | Dinas Kesehatan | |

| No. | Urusan/ Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2019 | | | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2020 | | Perangkat Daerah | Keterangan |
|-----|---|---|--------|---|----------------------|------------------------------|---|--|--|------------------|------------|
| | | | | Target Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2019 | Tingkat Realisasi Tahun 2019 | | Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2020 | Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2020 | | |
| 17 | Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan | Cakupan pengembangan <i>smart city pada fasilitas kesehatan tingkat pertama</i> | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | Dinas Kesehatan | |
| | | Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | Dinas Kesehatan | |
| 18 | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan | Persentase kecamatan dengan puskesmas dibandingkan rasio jumlah puskesmas dan jumlah penduduk | % | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | Dinas Kesehatan | |
| 19 | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Persentase tingkat pencegahan dan pengendalian penyakit | % | - | | | 100% | 100% | 100% | Dinas Kesehatan | |

| No. | Urusan/ Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2019 | | | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2020 | | Perangkat Daerah | Keterangan |
|-----|--|--|--------|---|----------------------|------------------------------|---|--|--|------------------|---|
| | | | | Target Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2019 | Tingkat Realisasi Tahun 2019 | | Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2020 | Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2020 | | |
| 20 | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular | Persentase penanganan penderita penyakit menular | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Dinas Kesehatan | Program ini berubah menjadi program pencegahan dan pengendalian penyakit dengan indikator persentase tingkat pencegahan dan pengendalian penyakit |
| | | <i>Universal Child Immunization (UCI)</i> | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Dinas Kesehatan | Program ini berubah menjadi program pencegahan dan pengendalian penyakit dengan indikator persentase tingkat pencegahan dan pengendalian penyakit |
| | | Persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) < 24 jam | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Dinas Kesehatan | Program ini berubah menjadi program pencegahan dan pengendalian penyakit dengan indikator persentase tingkat pencegahan dan pengendalian penyakit |

| No. | Urusan/ Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2019 | | | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2020 | | Perangkat Daerah | Keterangan |
|-----|--|---|--------|---|----------------------|------------------------------|---|--|--|------------------|---|
| | | | | Target Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2019 | Tingkat Realisasi Tahun 2019 | | Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2020 | Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2020 | | |
| 21 | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | Persentase penanganan penderita penyakit tidak menular | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Dinas Kesehatan | Program ini berubah menjadi program pencegahan dan pengendalian penyakit dengan indikator persentase tingkat pencegahan dan pengendalian penyakit |
| 22 | Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat | Persentase masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan | % | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | Dinas Kesehatan | |
| | | Persentase masyarakat miskin yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | Dinas Kesehatan | |

| No. | Urusan/ Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2019 | | | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2020 | | Perangkat Daerah | Keterangan |
|-----|---|---|--------|---|----------------------|------------------------------|---|--|--|------------------|--|
| | | | | Target Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2019 | Tingkat Realisasi Tahun 2019 | | Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2020 | Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2020 | | |
| 23 | Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan | Persentase pengelolaan sumber daya kesehatan | % | - | - | - | 77,40% | 77,40% | 100% | Dinas Kesehatan | Program ini merupakan gabungan dari program Program Pengadaan Dan Pengawasan Obat, Perbekalan Kesehatan, Pangan Dan Bahan Berbahaya, Program Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Kesehatan, Program Kefarmasian dan alat kesehatan, Program Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pegawai Kesehatan |
| 24 | Program Pengadaan Dan Pengawasan Obat, Perbekalan Kesehatan, Pangan Dan Bahan Berbahaya | Persentase fasilitas kesehatan melaksanakan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Dinas Kesehatan | Program ini dihilangkan dan dirubah menjadi Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan |

| No. | Urusan/ Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2019 | | | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2020 | | Perangkat Daerah | Keterangan |
|-----|---|---|--------|---|----------------------|------------------------------|---|--|--|------------------|---|
| | | | | Target Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2019 | Tingkat Realisasi Tahun 2019 | | Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2020 | Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2020 | | |
| | | Persentase industri rumah tangga pangan yang melaksanakan produksi sesuai standar kesehatan | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Dinas Kesehatan | Program ini dihilangkan dan dirubah menjadi Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan |
| 25 | Program Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Kesehatan | Persentase dokumen rancangan kebijakan dan peraturan yang tersusun | % | 40 | 40 | 100 | - | - | - | Dinas Kesehatan | Program ini dihilangkan dan dirubah menjadi Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan |
| 26 | Program Kefarmasian dan Alat kesehatan | Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Dinas Kesehatan | Program ini dihilangkan dan dirubah menjadi Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan |
| | | Persentase instalasi RS yang memenuhi standar kefarmasian dan alat kesehatan | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Dinas Kesehatan | Program ini dihilangkan dan dirubah menjadi Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan |

| No. | Urusan/ Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2019 | | | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2020 | | Perangkat Daerah | Keterangan |
|-----|---|---|--------|---|----------------------|------------------------------|---|--|--|------------------|---|
| | | | | Target Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2019 | Tingkat Realisasi Tahun 2019 | | Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2020 | Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2020 | | |
| 27 | Program Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan | % | 15 | 15 | 100 | - | - | - | Dinas Kesehatan | Program ini dihilangkan dan dirubah menjadi Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan |
| 28 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pegawai Kesehatan | Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai kesehatan | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Dinas Kesehatan | Program ini dihilangkan dan dirubah menjadi Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan |
| 29 | Program Pembinaan Lingkungan Sosial | Persentase pembinaan lingkungan sosial | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Dinas Kesehatan | Program ini dihilangkan |
| | | Persentase lingkungan sosial yang memenuhi standar alat kesehatan | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Dinas Kesehatan | |

2.2. PERMASALAHAN, SOLUSI, DAN REKOMENDASI

2.2.1 Permasalahan

Belum optimalnya penyerapan anggaran belanja langsung Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, hal ini disebabkan karena:

- a. Adanya kegiatan pada Dinas Pendidikan yang tidak dapat direalisasikan, dikarenakan sasaran kegiatannya adalah siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan pada sekolah swasta, seyogyanya dimasukkan dalam pos Belanja Tidak Langsung.
- b. Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, yang diperuntukan bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) SMA/K dan Mahasiswa belum mendapatkan alokasi anggaran di Tahun 2020.
- c. Adanya kegiatan pada Dinas Kesehatan tidak dapat direalisasikan, dikarenakan sasaran kegiatannya adalah masyarakat miskin yang membutuhkan jaminan pembiayaan kesehatan, seyogyanya dimasukkan dalam Belanja Tidak Langsung.

Selain hal tersebut diatas, pada tahun 2020 terjadi situasi darurat yang disebabkan wabah COVID-19 di Kota Bandung yang membutuhkan penyesuaian alokasi anggaran untuk menanggulangi bencana yang ditimbulkan sebagai langkah tanggap darurat dalam melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa.

2.2.2 Solusi

- a. Melakukan perubahan dari Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan menjadi Belanja Tidak Langsung dalam jenis Belanja Bantuan Sosial untuk mengakomodasi bantuan operasional, dan investasi bagi siswa RMP SD dan SMP Swasta.
- b. Melakukan pengalihan alokasi anggaran dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas Pendidikan dan Inspektorat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku

pengelola Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, yang diperuntukan bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) SMA/K dan Mahasiswa.

- c. Melakukan perubahan dari Belanja Langsung pada Dinas Kesehatan menjadi Belanja Tidak Langsung dalam jenis Belanja Bantuan Sosial untuk mengakomodasi pembiayaan bagi masyarakat yang belum mendapatkan jaminan kesehatan.
- d. Melakukan penambahan alokasi Belanja Tidak Terduga untuk menanggulangi bencana wabah COVID-19 dalam melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat Kota Bandung.

2.2.3 Rekomendasi

Dari hasil evaluasi dan pengendalian dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, dapat diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas data dalam upaya akurasi perencanaan dan pelaksanaan pada program dan kegiatan di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
- b. Optimalisasi sistem pelaporan pengendalian dan evaluasi triwulanan maupun tahunan agar setiap permasalahan dapat segera diselesaikan.

BAB III

GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ASUMSI KEUANGAN DAERAH.

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah Kota Bandung dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di luar Kota Bandung seperti kondisi ekonomi global, nasional, serta regional Jawa Barat dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Global

Berdasarkan data *World Economic Outlook IMF* Januari 2019, pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan akan mengalami peningkatan 0,1% dari proyeksi tahun 2019 menjadi sebesar 3,6%. Pada proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi global akan meningkat 0,1% yang didasarkan pada kenaikan pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa dan beberapa negara berkembang. Negara berkembang pada tahun 2020 tingkat pertumbuhan ekonominya diproyeksikan naik sebesar 0,4% sedangkan pada negara-negara di kawasan Eropa akan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1%. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi global pada tahun berikutnya, semua negara diwajibkan meningkatkan potensi pertumbuhan output dan memperkuat penyangga fiskal dan keuangan di lingkungan yang memiliki beban utang tinggi dan kondisi keuangan yang ketat.

Berdasarkan Laporan Perekonomian dari Bank Indonesia Bandung, prospek ekonomi global diperkirakan meningkat pada tahun 2020 yang dipengaruhi oleh peningkatan khususnya pada emerging markets. Berdasarkan *World Economic Outlook (WEO) IMF* Oktober 2019, pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 diperkirakan sebesar 3,4% (*year on year - yoy*) lebih tinggi daripada tahun 2019 sebesar 3,0% (*yoy*). Namun demikian, potensi risiko masih membayangi mengingat proyeksi ini terus menunjukkan bias ke bawah dari perkiraan sebelumnya, yaitu sebesar 3,5% (*yoy*) pada proyeksi IMF bulan Juli 2019.

Koreksi ke atas terjadi pada ekonomi negara berkembang, sedangkan koreksi moderat untuk negara maju. Volume perdagangan dunia tahun 2020 diperkirakan mengalami peningkatan menjadi 3,2% (yoy) jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebesar 1,1% (yoy). Hal ini turut berdampak pada perekonomian Jawa Barat yang memiliki pangsa ekspor besar ke negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, ASEAN, Eropa dan Tiongkok. Eskalasi perang dagang Tiongkok dan US yang mulai mereda mengurangi dampak ketidakpastian pada perekonomian Jawa Barat sehubungan dengan perkiraan peningkatan permintaan dari kedua negara dimaksud.

Pertumbuhan negara maju diperkirakan tumbuh moderat dan kembali mengalami koreksi ke bawah pada proyeksi IMF Oktober 2019. IMF dalam WEO Oktober 2019 memperkirakan bahwa pertumbuhan AS kembali menurun tercermin dari angka proyeksi 0.3 poin bias ke bawah menjadi sebesar 3,4% (yoy). Perekonomian AS diperkirakan melambat sehubungan dengan tahun politik dimana terdapat Pemilihan Presiden AS pada tahun 2020

Pertumbuhan ekonomi negara *emerging and developing economies* secara umum diperkirakan meningkat. Pertumbuhan negara-negara yang tergolong berkembang tersebut pada tahun 2020 diperkirakan berada pada level 4,6% dikoreksi ke bawah dari semula 4,8%. Peningkatan terjadi di negara/kawasan Asia dan India.

Sementara itu dari sisi inflasi, tekanan inflasi relatif terdispersi antara negara maju dan emerging market. Konsistensi penurunan harga komoditas global dan pertumbuhan ekonomi yang moderat akan menahan inflasi IHK pada angka 1,5% tahun 2019 untuk negara maju, turun 2,0% dari tahun 2018. Inflasi inti AS diperkirakan sebesar 2,6% pada tahun 2020 sampai dengan 2021.

3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Nasional

Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,17%, tertinggi dalam 4 (empat) tahun terakhir. Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi tercatat 5,01%, 2015 sebesar 4,88%, 2016 sebesar 5,03%, dan 2017 sebesar 5,07%. Permintaan domestik

terutama dari sisi konsumsi rumah tangga, investasi dan konsumsi pemerintah masih menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi pada 2018.

Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi (SPIME) Bank Indonesia periode triwulan IV-2019 mengindikasikan perekonomian Indonesia pada tahun 2019 diperkirakan tumbuh 5,04% (yoy), melambat dibanding 5,17% (yoy) pada tahun 2018. Sementara itu, responden memprakirakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2019 sebesar 5,04% (yoy). Inflasi pada akhir tahun 2020 diperkirakan sebesar 3,01% (yoy), masih lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 2,72%.

Nilai tukar Rupiah terhadap USD pada akhir tahun 2020 diperkirakan akan sedikit melemah menjadi Rp14.126 per USD dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp14.070 per USD. Responden memprakirakan bahwa pelemahan nilai tukar Rupiah tersebut antara lain dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global.

Pada tahun 2020, perekonomian Indonesia optimis semakin membaik. PDB tahun 2020 diperkirakan akan tumbuh 5,07% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan prakiraan pertumbuhan tahun 2019 sebesar 5,04%. Diprakirakan bahwa peningkatan kinerja perekonomian pada tahun 2020 dipengaruhi oleh membaiknya perekonomian dunia dan meningkatnya investasi nasional baik yang bersumber dari PMDN maupun PMA. Diprakirakan ekonomi tahun 2020 akan tumbuh di antara rentang 5,00-5,24%.

Inflasi secara keseluruhan tahun 2020 diperkirakan sebesar 3,01% (yoy), masih lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 2,72%. Realisasi tahun 2019 tersebut masih berada dalam kisaran sasaran inflasi tahun 2019 sebesar 3,5±1%.

Nilai tukar Rupiah terhadap USD pada tahun 2020 diperkirakan akan melemah pada Rp14.126 per USD dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp14.070 per USD. Diprakirakan bahwa pelemahan nilai tukar Rupiah tersebut antara lain dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Tantangan perekonomian di tahun-tahun mendatang adalah:

§ Ketidakpastian global.

Ke depan, risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun, di antaranya batu bara dan minyak kelapa sawit, seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain. Adapun risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan tekanan normalisasi kebijakan moneter yang beralih dari AS ke kawasan Eropa.

§ Pertumbuhan ekonomi yang stagnan

Dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Stagnannya pertumbuhan ekonomi disebabkan utamanya oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah: (1) regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat; (2) sistem dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai; (3) kualitas infrastruktur yang masih rendah terutama konektivitas dan energi; (4) rendahnya kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja; (5) intermediasi sektor keuangan rendah dan pasar keuangan yang dangkal; (6) sistem inovasi yang tidak efektif; (7) keterkaitan hulu-hilir yang lemah.

§ Defisit transaksi berjalan yang meningkat

Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mencapai 3 persen PDB. Di tengah kondisi keuangan global yang ketat, peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

§ Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital

Revolusi industry 4.0 memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen.

Digital teknologi membantu proses pembangunan di antaranya pendidikan melalui distance learning, pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui fin-tech, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan. Di Indonesia diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang.

Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi dengan upaya pengoptimalan penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi-transaksi tersebut.

Sasaran ekonomi makro Indonesia kedepan berdasarkan berdasarkan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024:

§ Sasaran Makro Pembangunan

Pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,4 – 6,03 persen per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas. Tingkat inflasi ditargetkan sebesar $3,0 \pm 1$ persen sepanjang 2020– 2024. Kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan perbaikan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 6,5 – 7,0 persen dan 4,0 – 4,6 persen pada tahun 2024. Tingkat rasio gini menurun menjadi 0,370 – 0,374 pada tahun 2024. Sementara IPM diharapkan meningkat menjadi 75,54 pada tahun 2024, yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia.

§ Memperkuat Permintaan Domestik

Dari sisi permintaan domestik, konsumsi masyarakat (rumah tangga dan LNPRT) diharapkan tumbuh rata-rata 5,16 – 5,29 persen per tahun. Peningkatan konsumsi masyarakat didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat seiring dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar dan lebih baik, stabilitas harga, dan bantuan sosial pemerintah yang lebih tepat sasaran. Konsumsi

pemerintah akan tumbuh rata-rata 4,13 – 4,23 persen per tahun didukung oleh peningkatan belanja pemerintah, baik pusat maupun transfer ke daerah.

§ Diversifikasi Ekspor dan Stabilitas Eksternal

Secara keseluruhan, ekspor barang dan jasa tumbuh rata-rata 6,21 – 7,67 persen per tahun. Sementara impor barang dan jasa tumbuh rata 6,42 – 7,42 persen tahun didorong oleh peningkatan permintaan domestik, terutama investasi. Kinerja perdagangan internasional yang membaik akan mendorong penguatan stabilitas eksternal yang ditandai dengan perbaikan defisit transaksi berjalan menjadi 2,0 – 1,3 persen PDB dan peningkatan cadangan devisa menjadi USD161,1 – 184,8 miliar pada tahun 2024.

§ Menjaga Kestinambungan Fiskal

Pendapatan negara ditargetkan meningkat menjadi rata-rata 13,7 – 14,8 persen PDB per tahun, dengan rasio perpajakan mencapai rata-rata 11,7 – 12,7 persen PDB per tahun. Pemerintah akan terus melakukan penggalan potensi penerimaan, antara lain yang berasal dari aktivitas jasa digital lintas negara dan ekstensifikasi barang kena cukai. Adapun, kebijakan ini juga diimbangi dengan peran kebijakan perpajakan sebagai instrumen pendorong investasi melalui penyediaan insentif fiskal yang mendukung aktivitas penciptaan nilai tambah ekonomi (industri manufaktur, pariwisata, ekonomi kreatif dan digital).

§ Menjaga Stabilitas Inflasi dan Nilai Tukar

Laju inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga tren penurunan laju inflasi rendah dan stabil dalam jangka menengah.

§ Mengurangi Ketimpangan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi tiap wilayah diharapkan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan di tiap wilayah diharapkan dapat selaras dengan kebijakan di tingkat nasional, dengan tetap memperhatikan keunggulan dan permasalahan yang unik dengan karakteristik wilayah masing-masing.

§ **Kebutuhan Investasi dan Pembiayaan**

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,4 – 6,0 persen per tahun, dibutuhkan investasi sebesar Rp.36.595,6 – 37.447,6 triliun sepanjang tahun 2020-2024. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing sebesar 11,6 – 13,8 persen dan 7,6 – 7,9 persen, sementara sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat atau swasta.

§ **Pertumbuhan Ekonomi Berwawasan Lingkungan**

Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

3.1.3 Kondisi Ekonomi Jawa Barat

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Berdasarkan Laporan Bank Indonesia bahwa perekonomian Jawa Barat pada triwulan III 2019 tumbuh sebesar 5,14% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan II 2019 yang mencapai 5,70% (yoy). Perlambatan ekonomi Jawa Barat triwulan III 2019 terutama disebabkan oleh normalisasi konsumsi pasca berlalunya momen bulan Ramadhan dan Idul Fitri serta Pilpres dan Pileg serentak. Kondisi ini tercermin dari melambatnya konsumsi rumah tangga dan penurunan konsumsi Lembaga Non Pemerintah Penyedia Rumah Tangga (LNPRP). Ketidakpastian kondisi ekonomi global yang meningkat juga berkontribusi menahan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dengan melemahnya investasi yang selama ini didominasi Foreign Direct Investment (FDI).

b. Perkembangan Inflasi

Inflasi Jawa Barat menunjukkan kondisi yang terkendali. Dari tujuh kota pantauan IHK di Jawa Barat Desember 2019, seluruhnya mengalami inflasi. Kota dengan inflasi tertinggi pada Desember 2019 adalah Kota Bandung sebesar 0,45 persen, kemudian Kota Cirebon sebesar 0,44 persen; Kota Bekasi 0,38 persen; Kota Bogor sebesar 0,30

persen; dan Kota Depok sebesar 0,18 persen. Pada Desember 2019, dari 7 (tujuh) kota di Jawa Barat, IHK gabungan Jawa Barat adalah 137,73 dengan demikian terjadi inflasi sebesar 0,35 persen. Dengan demikian laju inflasi tahun kalender 2019 untuk Jawa Barat adalah 3,21 persen.

c. Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Stabilitas keuangan Jawa Barat triwulan III 2019 masih terjaga. Kinerja Intermediasi perbankan pada akhir triwulan III 2019 menunjukkan kondisi yang cukup baik. Risiko kredit yang tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) terpantau sedikit meningkat, namun masih di bawah batas toleransi. Rasio intermediasi perbankan sedikit membaik, didorong oleh pertumbuhan penyaluran kredit berdasarkan lokasi bank ditengah perlambatan pertumbuhan DPK. Hal ini juga ditunjukkan dengan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) tercatat sebesar 92,23% atau meningkat dibandingkan LDR pada triwulan sebelumnya yang mencapai 91,10%.

d. Perkembangan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan Jawa Barat kembali mengalami perbaikan. Hal ini tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat yang menurun dari 8,17% pada Agustus 2018 menjadi 7,99% pada Agustus 2019. Sementara itu di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, kondisi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat pada Maret 2019 masih mencatat perbaikan. Tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada Maret 2019 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Maret 2018 (7,45%). Sejalan dengan hal tersebut, ketimpangan di Jawa Barat juga tercatat menurun dari 0,407 menjadi 0,402 pada Maret 2019. Hal ini terutama didorong oleh aliran dana bantuan sosial dari Pemerintah Pusat yang meningkat cukup tinggi sampai dengan triwulan III 2019.

e. Prakiraan Perekonomian Ke Depan

Secara keseluruhan pada tahun 2020, ekonomi Jawa Barat diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,4%- 5,8% (yoy). Pertumbuhan tersebut diperkirakan masih akan didorong oleh peningkatan konsumsi, investasi dan ekspor. Peningkatan konsumsi ditopang kenaikan UMK dan anggaran bansos Pemerintah. Investasi berpotensi meningkat sejalan dengan realisasi komitmen investasi tahun 2019 pada tahun 2020 sejalan dengan forum puncak West Java Investment Summit (WJIS) bulan Oktober 2019, di samping potensi investasi Jawa Barat yang masih prospektif.

Dari sisi lapangan usaha, perbaikan kinerja ekonomi Jawa Barat diperkirakan berasal dari lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan, konstruksi, dan pertanian. Sementara itu, kinerja sektor perdagangan diperkirakan melambat pada tahun 2020, terutama karena berkurangnya intensitas perhelatan politik seperti Pemilu Presiden dan legislatif, serta potensi kenaikan inflasi kelompok *administered price* yang dapat mengurangi kemampuan konsumsi masyarakat.

Tekanan inflasi pada tahun 2020 diperkirakan masih pada kisaran target 3,0%±1% (yoy). Peningkatan biaya-biaya yang diatur oleh pemerintah seperti tarif listrik, iuran BPJS, dan cukai rokok, termasuk rencana penyesuaian tarif listrik diperkirakan menjadi faktor yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi

Berdasarkan rancangan akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 disebutkan bahwa misi Provinsi Jawa Barat di bidang ekonomi yaitu Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan dengan target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2021 sebesar 5,4 s.d. 5,7 persen; Inflasi tahun 2021 sebesar 3 s.d. 4 persen; dan Indeks Gini sebesar 0,37-0,38.

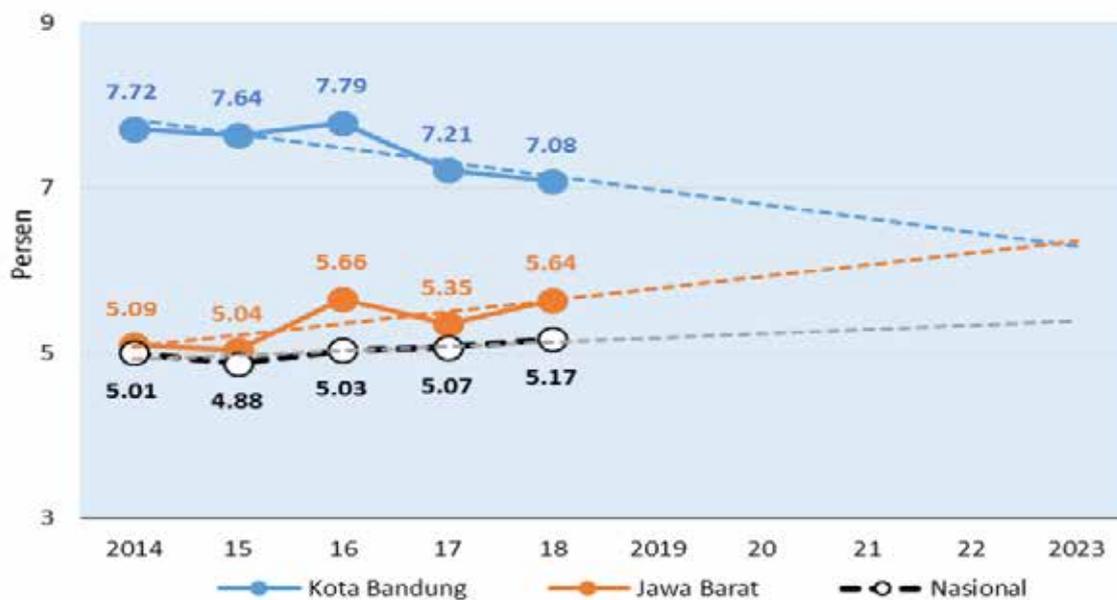
3.1.4 Kondisi Ekonomi Kota Bandung

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat dan Nasional. Rerata LPE Kota Bandung diatas 7 persen dengan pencapaian LPE tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni 7,79 persen, namun lajunya relatif mengalami penurunan. Pada tahun 2018 LPE Kota Bandung menunjukkan angka terendah sepanjang 5 tahun terakhir yaitu di angka 7,08 persen. Secara historis, trend penurunan telah terjadi dalam periode jangka panjang. Sebelumnya pada tahun 2003, LPE Kota Bandung dapat menembus angka lebih dari 10 persen. Diprediksi pada tahun-tahun mendatang trend penurunan akan terus terjadi. Pola Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung dengan Jawa Barat dan Nasional (%) sampai dengan Tahun 2023 di tunjukan pada Grafik 3.1 berikut ini.

Grafik 3.1

Pola Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung dengan Jawa Barat dan Nasional (%) sampai dengan Tahun 2023



Sumber: BPS Kota Bandung, BPS Provinsi Jawa Barat, dan BPS Nasional

Pola LPE Jawa Barat relatif berbanding terbalik dengan Kota Bandung, walaupun lebih rendah, namun cenderung meningkat. Pada tingkat Nasional, trend pertumbuhan meningkat dan diprediksi terus mengalami peningkatan meski tidak sekuat Jawa Barat. Artinya walaupun Kota Bandung masih termasuk daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, namun ekonominya cenderung menuju stagnasi.

Kota Bandung diindikasikan tengah mengalami fase ekonomi yang fatigue (kelelahan). Perbedaan trend dan prediksi LPE Kota Bandung dengan Jawa Barat dan Nasional mengindikasikan adanya hambatan internal yang bersifat khas. Aktivitas ekonomi sektoral yang selama ini menjadi andalan seperti Perdagangan dan Industri Pengolahan tengah melambat. Diperlukan terobosan baru yang inovatif untuk mendorong pertumbuhan yang lebih luas, ditengah keterbatasan lahan yang dimiliki. Kota Bandung perlu memikirkan sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan memberikan landasan yang kuat. Peluang-peluang potensial di era transformasi digital, terutama di bidang komunikasi dan bisnis dapat menjadi momentum dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandung.

b. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi Kota Bandung dapat dilihat dari distribusi sektor ekonomi di dalam PDRB. Sektor Pedagangan & Reparasi; Industri Pengolahan; dan Sektor Informasi & Komunikasi merupakan kegiatan ekonomi terbanyak di Kota Bandung. Sektor Pedagangan & Reparasi memberikan kontribusi 28,2 persen dari keseluruhan kegiatan ekonomi di Kota Bandung. Sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi 19,7 persen dan Sektor Informasi & Komunikasi memberikan kontribusi 12,8 persen. Ketiga sektor ini menyumbang 60,7 persen dari total komposisi struktur ekonomi Kota Bandung. Berdasarkan data, formasi ketiga sektor tersebut tidak mengalami perubahan setidaknya selama 5 tahun terakhir. Artinya kegiatan ekonomi di Kota Bandung didominasi oleh aktivitas ketiga sektor tersebut. Struktur ekonomi Kota Bandung dapat dilihat pada Grafik 3.2.

Grafik 3.2
Struktur Ekonomi Kota Bandung Tahun 2018



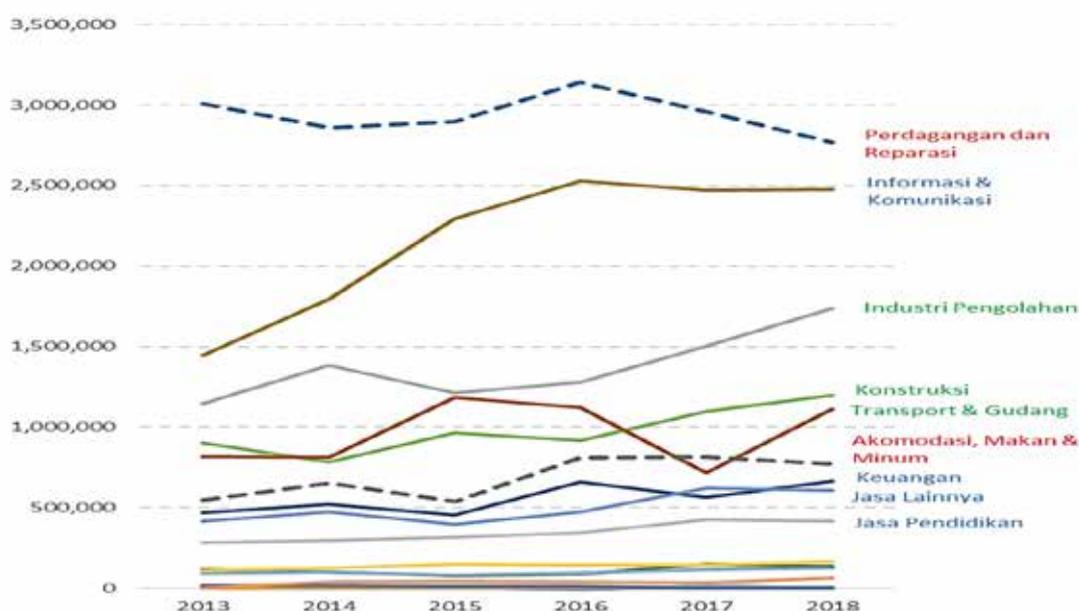
Sumber: *BPS Kota Bandung, yang dikelola dalam SIPD*

Sektor ekonomi kelompok kedua yang cukup besar di Kota Bandung terdiri dari 4 sektor, menyumbang sekitar 27 persen dari kegiatan ekonomi di Kota Bandung. Sektor tersebut yaitu Kontruksi, berupa pembangunan dan pemeliharaan bangunan serta infrastruktur publik yang dibiayai oleh pemerintah, perorangan ataupun perusahaan. Sektor lainnya yaitu Transportasi dan Pergudangan, mobilitas perpindahan penduduk dan logistik pada wilayah pusat ekonomi seperti Kota Bandung akan tetap tinggi. Kemudian sektor Jasa Keuangan & Asuransi serta Penyediaan Akomodasi & makan Minum. Sektor ekonomi selain yang disebutkan di atas, terdapat 9 sektor lain dan hanya memberikan kontribusi sebesar 12,3 persen terhadap perekonomian Kota Bandung.

Selama periode 2013-2018, sektor ekonomi yang membentuk struktur ekonomi Kota Bandung memiliki dinamika pertumbuhan yang berbeda. Sumber pertumbuhan ekonomi terbesar pada tahun 2013-2018 yaitu sektor Perdagangan & Reparasi. Namun sejak tahun 2016,

sektor ini pertambahan nilai nominalnya semakin mengecil, bahkan pertambahannya lebih kecil dibandingkan tahun 2013. Artinya sektor ini mengalami pengecilan (*shrinking*). Sektor penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung dapat dilihat pada grafik 3.3 berikut ini:

Grafik 3.3
Sektor Ekonomi Penyebab Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bandung



Sumber: BPS Kota Bandung.

Bila sumber permintaan utama dari penduduk yang banyak dan kegiatan wisatawan ke Bandung, maka tanda-tanda penurunan intensitas pariwisata di Kota Bandung sudah terlihat sejak tahun 2016, sehingga mempengaruhi terhadap penurunan kegiatan Sektor Perdagangan & Reparasi. Terdapat kemungkinan lain yang melatarbelakangi penurunan ini, seperti lesunya aktivitas transaksi untuk keperluan barang konsumsi jangka pendek. Selain itu masyarakat mulai mempertimbangkan pembelian barang yang diperoleh dari luar Kota Bandung via *e-commerce* atau penjualan online. Barang impor yang didatangkan ke daerah yang memiliki fasilitas pelabuhan besar (Jakarta dan Surabaya) kini dapat

mendistribusikan barangnya langsung ke konsumen tanpa perlu melewati perantara penjual. Skema ini lebih menarik konsumen karena harga yang ditawarkan lebih rendah. Pelaku industri yang berasal dari luar Bandung saat ini mulai mengurangi ketergantungan kepada *reseller* dengan memanfaatkan akses penjualan langsung kepada konsumen. Pusat perbelanjaan *offline* seperti mall, *factory outlet* dan toserba kini sudah merasakan imbas penurunan penjualan pasca era transformasi bisnis digital.

Nilai ekspor Kota Bandung yang mengalami penurunan, juga memberi tekanan terhadap nilai transaksi perdagangan. Faktor lain diantaranya pergeseran preferensi masyarakat yang lebih memilih menyimpan dananya untuk kebutuhan investasi. Adapun sektor Penyediaan Akomodasi & Makan Minum meski mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan. Potensi sektor ini masih cukup besar seiring berkembangnya industri kuliner dan penegasan status Kota Bandung sebagai Kota Pariwisata. Tantangan yang dihadapi yakni pergeseran preferensi konsumen yang begitu cepat serta kemampuan menciptakan nilai intrinsik kepada produk makan minum yang diproduksi.

Sektor kedua yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor Informasi dan Komunikasi. Sektor ini mengalami pertumbuhan pesat, dari tahun 2013 hingga tahun 2016 bertambah sekitar 1,5 kali lipat. Pertumbuhan ini tampaknya berkaitan dengan intensitas pemanfaatan teknologi komunikasi untuk berbagai kepentingan sehari-hari, sehingga permintaannya tinggi. Setelah itu sektor ini cenderung stagnan, yang kemungkinan disebabkan oleh sudah terpenuhi standar kebutuhan penggunaan teknologi pada kebanyakan penduduk Kota Bandung. Karena itu kemudian permintaannya melambat atau cenderung tetap. Pergerakan sektor ini di masa depan dalam jangka menengah potensial untuk tetap. Sektor ini dikategorikan sebagai pendukung untuk sektor lain.

Sektor Industri Pengolahan, yang memberikan sumbangan ketiga terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Sektor Industri Pengolahan menunjukkan peningkatan yang sangat pesat, terutama sejak tahun 2014, atau bertambah sekitar 75 persen. Namun

demikian pada sektor ini terjadi transformasi dari Industri Pengolahan skala besar, yang tutup atau relokasi keluar Kota Bandung, diiringi perkembangan industri mikro, kecil dan menengah.

Pelaku IKM memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam merespon peluang dan *trend* pasar. Situasi ini perlu dipertahankan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pengangguran. Pelaku industri skala besar cenderung menghadapi periode sulit dikarenakan upah minimum yang relatif tinggi dibanding kawasan lain di Jawa Barat dan biaya *overhead* yang tidak lagi seimbang dengan potensi pendapatan.

Sektor Konstruksi mengalami pertumbuhan sejak tahun 2016. Besaran anggaran Pemerintah untuk proyek infrastruktur di Kota Bandung secara simultan akan berpengaruh terhadap nilai perputaran sektor Konstruksi. Pemkot Bandung dikenal cukup aktif dalam membangun infrastruktur untuk kepentingan mobilitas dan kenyamanan publik. Untuk kegiatan konstruksi non pemerintah, faktor pertumbuhan dipengaruhi oleh kemudahan fasilitas pembiayaan dari pihak ketiga terutama perbankan. Saat ini mayoritas pembelian rumah hunian atau tempat usaha yang baru masih didominasi oleh skema kredit. Biaya bunga yang kompetitif dan termin pembayaran yang relatif panjang menjadi pemicu minat konsumen untuk melakukan pembelian.

c. Inflasi

Inflasi ialah gejala kenaikan harga secara umum dalam perekonomian di suatu wilayah. Inflasi tinggi memberikan tekanan berat kepada masyarakat berpendapatan rendah, karena efeknya pada penurunan daya beli. Minimal golongan masyarakat ini harus mencukupi kebutuhan dasarnya berupa makanan. Program pemerintah yang menyangkut permasalahan ini seperti penyaluran beras miskin dan penjualan sembako murah perlu tetap dipertahankan. Pemerintah diharapkan terus memperbaharui secara berkala database penduduk miskin yang juga tergolong sebagai penduduk berpenghasilan rendah. Hal ini untuk menjamin penyaluran program bantuan tepat sasaran.

Dari tahun 2014-2018 rerata inflasi di Kota Bandung sebesar 4,51 persen, relatif lebih tinggi daripada inflasi Jawa Barat sebesar 4,17 persen namun dibawah inflasi Nasional sebesar 4,58 persen. Selama kurun tersebut, inflasi Kota Bandung, Jawa Barat maupun Nasional, memiliki pola fluktuasi yang hampir sama, dengan sedikit perbedaan tingkat inflasi pada satu waktu tertentu (Grafik 3.4). Berdasarkan kondisi ini, faktor eksternal lebih berperan dalam menentukan tingkat inflasi. Umumnya hampir seluruh daerah di tingkat nasional ikut terkena dampak simultan atas tekanan inflasi. Tahun 2014 menunjukkan lonjakan inflasi yang tinggi dengan persentase diatas 7 persen. Secara dominan, penyebab inflasi dipengaruhi kondisi ekonomi Nasional seperti kenaikan bahan bakar yang menjadi faktor pendorong terhadap komponen lainnya. Ketergantungan terhadap komoditas impor yang diikuti oleh melemahnya mata uang rupiah ikut memberikan tekanan berat terhadap laju inflasi pada kurun tersebut.

Grafik 3.4
Inflasi di Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2014 s.d. 2018 (yoy)



Sumber: *BPS Kota Bandung, yang dikelola dalam SIPD, BPS Jawa Barat dan BPS Pusat*

Di Kota Bandung, umumnya inflasi bersumber dari komoditas Sandang, Bahan Makanan dan Perumahan. Ketiga komponen ini berada di atas rerata komponen penyumbang inflasi (Grafik 3.5). Kota Bandung memiliki ketergantungan terhadap pasokan produk sandang dan bahan makanan yang mayoritas didatangkan dari luar Kota Bandung. Rantai distribusi kedua komponen ini terutama bahan makanan relatif panjang. Setiap saluran distribusi yang dilewati akan mengambil margin keuntungan dan yang paling tinggi umumnya penjual ritel.

Grafik 3.5
Sumber Inflasi di Kota Bandung



Sumber: *BPS Kota Bandung*,

Selain itu biaya transportasi logistik di Indonesia khususnya pulau Jawa terbilang tinggi sehingga semakin membebani harga jual akhir. Produk Sandang, meski sama-sama menjadi penyumbang inflasi tertinggi namun perbedaan selisih antara Kota Bandung dan Jawa Barat cukup besar. Status Kota Bandung sebagai destinasi wisata belanja di Jawa Barat ikut berpengaruh. Tingkat permintaan terhadap

produk fashion yang *up to date* dan didukung daya beli masyarakat yang relatif tinggi semakin meningkatkan angka inflasi dari komponen ini. Para produsen produk fashion dari luar Kota Bandung saling berkompetisi untuk bisa memasarkan produknya di Kota Bandung dengan harapan mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi. Selain itu, gaya hidup masyarakat Kota Bandung yang cenderung konsumtif untuk produk fashion.

Inflasi Perumahan terkait dengan semakin mahalnya harga lahan dan uang sewa rumah. Harga properti di Kota Bandung dikhawatirkan mengalami fenomena *bubble price* yakni ketika harga jual tidak lagi mencerminkan harga sebenarnya karena terlampaui tinggi. Aktivitas pembangunan kompleks perumahan di Kota Bandung masih cukup tinggi dan saat ini terkonsentrasi di Bandung Timur dan Selatan. Masyarakat Kota Bandung yang berniat memiliki rumah namun kemampuan finansialnya terbatas, umumnya mempertimbangkan pilihan untuk membeli rumah di daerah satelit Kota Bandung (Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat dan Kab. Sumedang).

d. Kesejahteraan Penduduk

· Pemerataan Pendapatan

Tingkat pemerataan dapat diukur menggunakan indeks Gini Rasio. Nilai Gini Rasio yang meningkat, mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan yang semakin besar. Suatu wilayah yang memiliki nilai Gini rasio diatas 0,5 maka menunjukkan tingkat ketimpangan yang besar dan bila nilainya kurang dari 0,3 menunjukkan ketimpangan rendah. Nilai diantara keduanya menunjukkan ketimpangan sedang. Umumnya kawasan metropolitan yang menjadi pusat ekonomi cenderung memiliki nilai Gini Rasio yang tinggi, berbanding terbalik dengan kawasan non urban yang lebih merata. Grafik 3.6 menunjukkan Ketimpangan Kota Bandung mencapai titik tertinggi pada tahun 2014 dengan nilai 0,48. Nilai tersebut jauh diatas Jawa Barat dan Nasional yang berada di tingkat 0,41.

Grafik 3.6

Perbandingan Gini Rasio Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional



Sumber: *BPS Kota Bandung dan BPS Jawa Barat yang dikelola dalam SIPD*

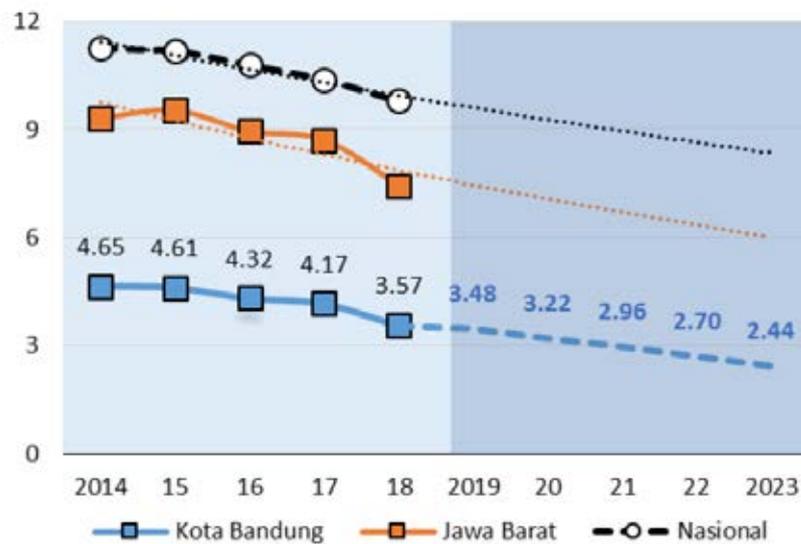
Pada tahun selanjutnya Gini Ratio Kota Bandung selalu tetap diatas Jawa Barat dan Nasional meski cenderung terus menurun. Pada tahun 2018, Pemerintah dan BPS Kota Bandung tidak melaksanakan survey Gini Rasio. Diprediksi tahun 2019 nilai Gini Rasio Kota Bandung akan menyamai Jawa Barat. Penurunan tersebut diantaranya ditentukan oleh keberhasilan program pemerintah dalam mendorong kesejahteraan rakyat lewat distribusi pendapatan pajak yang tepat sasaran. Menurunnya jumlah masyarakat berpenghasilan rendah lewat peluang penyerapan tenaga kerja dapat terus diupayakan. Penetapan nilai upah minimum regional (UMR) yang proposional dapat menjadi cara untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Meski begitu kenaikan UMR perlu diiringi dengan peningkatan kompetensi dan profuktivitas dari tenaga kerja yang diserap.

• **Penduduk Miskin**

Persentase penduduk miskin di Kota Bandung termasuk rendah dan selalu lebih rendah daripada Jawa Barat dan Nasional. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin Kota Bandung di posisi 3,57 persen (Grafik 3.7). Sementara berturut-turut level Jawa Barat dan Nasional berada di angka 7,45 persen dan 9,8 persen.

Grafik 3.7

Perbandingan Penduduk Miskin Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional



Sumber: *BPS Kota Bandung*

Kota Bandung sebagai pusat perekonomian Jawa Barat telah berhasil mendistribusikan lapangan kerja yang berdampak tidak langsung pada pengurangan jumlah penduduk miskin. Trend penurunan penduduk miskin Jawa Barat dan Nasional menurun lebih cepat dari pada di Kota Bandung. Pada Tahun 2023 diperkirakan penduduk miskin di Jawa Barat dan Nasional berada di Kisaran 6-9 persen. Sedangkan untuk Kota Bandung diperkirakan pada Tahun 2021 untuk pertama kalinya dapat menembus angka dibawah 3 persen. Pola penurunan penduduk miskin di Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional relatif serupa.

Dalam mengetahui jumlah penduduk miskin di Kota Bandung terdapat 2 (dua) rujukan yang dapat digunakan yakni data SUSENAS dari BPS dan Basis Data Terpadu/PPLS. Kedua teknik ini pada dasarnya memiliki perbedaan. Data SUSENAS termasuk dalam kelompok data makro yang diperoleh melalui pendekatan survei. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu perkiraan tentang tingkat kemiskinan berdasarkan ukuran garis kemiskinan. Basis Data Terpadu/PPLS adalah data mikro yang diperoleh melalui pendekatan sensus. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data jumlah penduduk dengan pemeringkatan kesejahteraan dalam desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Data ini kemudian digunakan sebagai rujukan dalam penetapan sasaran karena dapat mengidentifikasi data nama kepala rumah tangga dan alamat tempat tinggal (*by name by address*).

• **Ketenagakerjaan**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase tenaga kerja di atas usia 15 Tahun yang tersedia untuk bekerja. TPAK Kota Bandung sepanjang periode 2014-2018 konsisten di atas angka 60 persen namun memiliki trend penurunan. TPAK Kota Bandung sempat mengalami peningkatan sejak tahun 2016 namun selanjutnya menurun pada tahun 2018 sekaligus mencatatkan angka terendah yaitu 61,98 persen sepanjang 5 tahun terakhir. Penurunan tersebut dapat disebabkan pertambahan jumlah penduduk lanjut usia yang tidak diimbangi dengan pertambahan jumlah penduduk usia kerja. Diprediksi TPAK Kota Bandung akan terus mengalami penurunan sampai tahun 2023.

• **Indek Pembangunan Manusia (IPM)**

Tingkat kesejahteraan penduduk Kota Bandung berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 81,06 pada tahun 2018. IPM Kota Bandung secara konsisten menunjukkan peningkatan sebesar 2,08 sejak tahun 2014. IPM Kota Bandung tercatat lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat dan Nasional meski laju pertumbuhannya jauh lebih rendah (Grafik 3.8). IPM Jawa Barat merupakan representasi dari pencapaian IPM Nasional karena pola dan nilai pertumbuhan yang identik. Secara umum tingkat kesejahteraan penduduk di berbagai tingkatan konsisten menunjukkan perbaikan.

Grafik 3.8
Perbandingan IPM Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional



Sumber: - *IPM Kota Bandung (Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018)*
- *IPM Nasional dan Provinsi Jawa Barat (Sumber: BPS Pusat, 2018)*

e. Indikator Makro

Indikator makro pembangunan secara umum merupakan dampak langsung dan tidak langsung dari adanya penyelenggaraan Pemerintah Kota Bandung. Pada Tabel 3.1, secara umum indikator makro di Kota Bandung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan peningkatan baik secara material maupun non material. Misalnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung pada tahun 2018 meningkat menjadi 81,06 poin dari tahun 2017 yang hanya sebesar 80,31 poin. Kemudian pada tingkat kemiskinan Kota Bandung pada tahun 2018 menurun dari 103,98 ribu penduduk miskin menjadi 89,38 ribu penduduk miskin atau persentase penduduk miskin menurun dari 4,17 persen menjadi 3,57 persen. Maka dengan kata lain bahwa terjadi pengurangan penduduk miskin di Kota Bandung.

Tabel 3.1
Indikator Makro Kota Bandung Tahun 2014 - 2019

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 1. | IPM | Poin | 79,67 | 80,13 | 80,31 | 81,06 | 81,47 |
| 2. | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 10,52 | 10,58 | 10,59 | 10,63 | N/A |
| 3. | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 13,63 | 13,89 | 13,90 | 14,18 | N/A |
| 4. | Usia Harapan Hidup | Tahun | 73,82 | 73,84 | 73,86 | 74,00 | N/A |
| 5. | Pengeluaran per Kapita | Juta Rp | 15,61 | 15,80 | 16,03 | 16,63 | N/A |
| 6. | LPE | % | 7,64 | 7,79 | 7,21 | 7,08 | 6,97 |
| 7. | PDRB (Berlaku) | Milyar Rp | 195,84 | 217,04 | 240,11 | 264,55 | N/A |
| 8. | PDRB per Kapita (Berlaku) | Juta Rp | 78,91 | 87,14 | 96,12 | 105,66 | N/A |
| 9. | PDRB (Konstan) | Milyar Rp | 149,58 | 161,23 | 172,85 | 185,08 | N/A |
| 10. | PDRB per Kapita (Konstan) | Juta Rp | 60,27 | 64,73 | 69,2 | 73,92 | N/A |
| 11. | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 9,02 | 9,02 | 8,44 | 8,01 | 8,25 |
| 12. | Inflasi | % | 3,93 | 2,93 | 3,46 | 3,76 | 2,78 |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|---|------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 13. | Tingkat Kemiskinan | % | 4,61 | 4,32 | 4,17 | 3,57 | 3,38 |
| 14. | Jumlah Penduduk Miskin | Ribu Orang | 114,10 | 107,57 | 103,98 | 89,38 | 84,67 |
| 15. | Ketimpangan Pendapatan (Koefisien Gini) | Rasio | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,39 |

Sumber: Angka tahun 2015 s.d. 2018 dari BPS Kota Bandung.

Catatan: Proyeksi 2019 berdasarkan Analisis Indikator Ekonomi Makro, kerjasama Bappelitbang dan DRPMI Unpad; kecuali Inflasi, Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin dari BPS Kota Bandung

3.2 PERUBAHAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

1. pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
2. Pasal 160 ayat (2) sampai dengan (4), disebutkan bahwa pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek berkenaan serta objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
3. Pasal 162 ayat (1) disebutkan bahwa keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Kota Bandung Tahun 2019 dan kondisi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 khususnya pada urusan pendidikan dan urusan kesehatan, maka kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 162 ayat (1) tersebut telah terpenuhi sebagai dasar untuk melakukan perubahan kebijakan keuangan daerah. Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah Kota Bandung hanya difokuskan pada belanja Daerah urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan lingkungan hidup, urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Fungsi Penunjang Lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, Pemerintah Kota Bandung memperoleh alokasi Bantuan Provinsi dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sehingga diperlukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah yang dianggarkan dalam perubahan kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020, mengalami perubahan dikarenakan adanya dana transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak sebesar Rp. 1,16 milyar dan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp. 76,58 Milyar. Sehingga Pendapatan Daerah yang semula Rp. 7,18 triliun menjadi Rp. 7,19 triliun. Rincian Pendapatan pada Perubahan Kedua RKPD tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2

Rincian Kebijakan Pendapatan pada APBD Tahun 2020, Perwal Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2020 dan Proyeksi Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020

| NO | URAIAN | JUMLAH (RP) | | | SELISIH |
|-------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | APBD 2020* | APBD 2020 (Pergeseran)** | Proyeksi Perubahan Kedua RKPD 2020*** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5-3) |
| 1 | PENDAPATAN | 7,117,204,956,964.00 | 7,194,946,646,419.00 | 7,194,946,646,419.00 | 77,741,689,455.00 |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 3,339,363,515,736.00 | 3,339,363,515,736.00 | 3,339,363,515,736.00 | 0.00 |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 2,709,552,659,693.00 | 2,709,552,659,693.00 | 2,709,552,659,693.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 91,727,268,961.00 | 91,727,268,961.00 | 91,727,268,961.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 27,740,800,000.00 | 27,740,800,000.00 | 27,740,800,000.00 | 0.00 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 510,342,787,082.00 | 510,342,787,082.00 | 510,342,787,082.00 | 0.00 |
| 1.2 | DANA PERIMBANGAN | 2,545,616,837,032.00 | 2,546,775,482,000.00 | 2,546,775,482,000.00 | 1,158,644,968.00 |
| 1.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 263,880,985,032.00 | 265,039,630,000.00 | 265,039,630,000.00 | 1,158,644,968.00 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1,776,235,910,000.00 | 1,776,235,910,000.00 | 1,776,235,910,000.00 | 0.00 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 505,499,942,000.00 | 505,499,942,000.00 | 505,499,942,000.00 | 0.00 |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 1,232,224,604,196.00 | 1,308,807,648,683.00 | 1,308,807,648,683.00 | 76,583,044,487.00 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 188,552,400,000.00 | 188,552,400,000.00 | 188,552,400,000.00 | 0.00 |
| 1.3.2 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 914,183,628,596.00 | 914,183,628,596.00 | 914,183,628,596.00 | 0.00 |
| 1.3.3 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 86,473,406,000.00 | 86,473,406,000.00 | 86,473,406,000.00 | 0.00 |
| 1.3.4 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 43,015,169,600.00 | 119,598,214,087.00 | 119,598,214,087.00 | 76,583,044,487.00 |

Sumber: *Perda APBD Tahun Anggaran 2020

** Perwal Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020

*** Proyeksi Perubahan Kedua RKPD 2020

3.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan kebijakan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perubahan Kebijakan Belanja Urusan Pendidikan.

Perubahan kebijakan Belanja Langsung Dinas Pendidikan pada Tahun 2020 adalah:

- a. Merubah anggaran yang diperuntukan untuk siswa SD Swasta dan SMP swasta, yang pada awalnya terdapat pada program Bantuan Pendidikan, pada Kegiatan Pemberian Bantuan Kebutuhan Sekolah Siswa SD melalui Kartu Bandung Juara dan Kegiatan Pemberian Bantuan Kebutuhan Sekolah Siswa SMP melalui Kartu Bandung Juara, menjadi anggaran Belanja Tidak Langsung yang dikategorikan menjadi Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan, dengan rincian :
 - 1) Kegiatan Pemberian Bantuan Kebutuhan Sekolah Siswa SD melalui Kartu Bandung Juara, dari output awal seluruh siswa baik SD Negeri dan SD Swasta diakomodir. Pada perubahan kedua kebijakan RKPD, kegiatan ini hanya mengakomodir kebutuhan personal bagi siswa SD negeri dan SD swasta, sedangkan kebutuhan operasional dan investasi bagi siswa SD swasta dipindahkan ke Belanja Tidak Langsung pada Bantuan Sosial yang direncanakan. Data detail perubahan Kebijakan Belanja Urusan Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.3
 - 2) Kegiatan Pemberian Bantuan Kebutuhan Sekolah Siswa SMP melalui Kartu Bandung Juara, dari output awal seluruh siswa baik SMP Negeri dan SMP Swasta diakomodir. Pada perubahan kedua kebijakan RKPD, pada kegiatan ini hanya mengakomodir kebutuhan untuk siswa SMP negeri dan SMP swasta, sedangkan kebutuhan operasional dan investasi bagi siswa SMP swasta dipindahkan ke Belanja Tidak Langsung pada Bantuan Sosial yang direncanakan. Data detail perubahan Kebijakan Belanja Urusan Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.3
- b. Merubah anggaran pada Program Bantuan Pendidikan dengan menambah alokasi anggaran ke dalam Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada pos belanja langsung, dalam

rangka mengakomodir kebijakan Gerakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, guna memfasilitasi sekolah, guru-guru dan muridnya mempunyai kebebasan dalam berinovasi, serta kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif, yang dilaksanakan melalui:

- 1) Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SD dengan output 1.000 pendidik tingkat SD yang dilatih mengenai penilaian kompetensi siswa dan program Merdeka Belajar.
 - 2) Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP dengan output 1.000 pendidik tingkat SMP yang dilatih mengenai penilaian kompetensi siswa dan program Merdeka Belajar.
- c. Merubah anggaran perangkat daerah yang menangani beberapa urusan untuk dialihkan menjadi Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa untuk pemenuhan pembiayaan bagi siswa RMP SMA/K.
- d. Merubah anggaran perangkat daerah yang menangani beberapa urusan untuk dialihkan menjadi Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan untuk pemenuhan pembiayaan bagi mahasiswa RMP. Data detail perubahan Kebijakan Belanja untuk pembiayaan siswa RMP SMA/K dan mahasiswa RMP dapat dilihat pada Tabel 3.4
- e. Re-alokasi anggaran perangkat daerah yang menangani beberapa urusan untuk dialihkan menjadi Belanja Tidak Terduga, guna menanggulangi bencana wabah COVID-19 dalam melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat Kota Bandung.

Tabel 3.3

Perubahan Kebijakan Belanja Urusan Pendidikan untuk Siswa RMP SD dan SMP

| SEBELUM | | | | SESUDAH | | | |
|---------|---|--|------------------|---------|---|--|------------------|
| NO | PROGRAM / KEGIATAN | OUTPUT : | ANGGARAN (RP.) | NO | PROGRAM / KEGIATAN | OUTPUT : | ANGGARAN (RP.) |
| I | Program : Bantuan Pendidikan | | | I | Program : Bantuan Pendidikan | | |
| 1 | Kegiatan : Pemberian Bantuan Kebutuhan Sekolah Siswa SD melalui Kartu Bandung Juara | Output : 1. Siswa SD Negeri 2. Siswa SD Swasta | 63.605.575.000,- | 1 | Kegiatan : Pemberian Bantuan Kebutuhan Sekolah Siswa SD melalui Kartu Bandung Juara | Output: 33.125 siswa SD Negeri dan 7.556 siswa SD Swasta yang memperoleh bantuan personal | 31.527.775.000,- |
| | | | | | Belanja Tidak Langsung (Bantuan Sosial yang direncanakan) | Output: 7.556 siswa SD swasta yang memperoleh bantuan operasional dan investasi | 16.320.960.000,- |
| 2. | Kegiatan : Pemberian Bantuan Kebutuhan Sekolah Siswa SMP melalui Kartu Bandung Juara | Output : 1. Siswa SMP Negeri 2. Siswa SMP Swasta | 51.883.600.000,- | 2 | Kegiatan : Pemberian Bantuan Kebutuhan Sekolah Siswa SMP melalui Kartu Bandung Juara | Output : 14.478 siswa SMP Negeri dan 10.565 siswa SMP swasta yang memperoleh bantuan personal | 20.660.475.000,- |

| SEBELUM | | | | SESUDAH | | | |
|-----------|--|---|----------------|---------|--|---|------------------|
| NO | PROGRAM / KEGIATAN | OUTPUT : | ANGGARAN (RP.) | NO | PROGRAM / KEGIATAN | OUTPUT : | ANGGARAN (RP.) |
| | | | | | Belanja Tidak Langsung (Bantuan Sosial yang direncanakan) | Output : 10.565 siswa SMP swasta yang memperoleh bantuan operasional dan investasi | 45.165.375.000,- |
| II | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | II | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | |
| 1 | Kegiatan: Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SD | Output: 300 peserta pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan SD | 418.305.200,- | 1 | Kegiatan: Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SD | Output: · 300 peserta pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan SD · 1.000 pendidik tingkat SD yang dilatih mengenai penilaian kompetensi siswa dan program Merdeka Belajar | 768.305.200,- |

| SEBELUM | | | | SESUDAH | | | |
|---------|---|---|--------------------------|---------|---|--|---|
| NO | PROGRAM / KEGIATAN | OUTPUT : | ANGGARAN (RP.) | NO | PROGRAM / KEGIATAN | OUTPUT : | ANGGARAN (RP.) |
| 2 | Kegiatan: Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP | Output: 300 peserta pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan SMP | 3.270.892.800,- | 2 | Kegiatan: Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP | Output: · 300 peserta pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan SMP · 1.000 pendidik yang diberi pelatihan penilaian mengenai kompetensi siswa dan program Merdeka Belajar | 3.695.082.800,- |
| | TOTAL | | 119.178.373.000,- | | TOTAL | | 118.137.973.000,- |
| | | | | | SELISIH | | 1.040.400.000,- (dialokasikan Ke Belanja Tidak Terduga) |

Tabel 3.4
Perubahan Kebijakan Belanja Urusan Pendidikan untuk Pemenuhan Fasilitas Pembiayaan bagi
Siswa RMP SMA/K dan Mahasiswa

| No | Urusan / Perangkat Daerah | Program / Kegiatan | Sebelum | | Sesudah | | Selisih |
|----------|--|--|----------------|---|----------------|---|------------------|
| | | | Anggaran (Rp.) | Output | Anggaran (Rp.) | Output | |
| | BELANJA LANGSUNG | | | | | | |
| A | Urusan Lingkungan Hidup | | | | | | |
| 1 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | | |
| | | Kegiatan Pengelolaan Taman Rekreasi | 42.113.746.000 | Penataan Taman Tegallega 1 (satu) lokasi | 30.913.746.000 | Tidak ada penataan Taman Tegallega 1 (satu) lokasi | (11.200.000.000) |
| 2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | | | | | |
| | | Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | 51.817.273.605 | Revitalisasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Sekelimus | 42.817.273.605 | Tidak ada Revitalisasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Sekelimus | (9.000.000.000) |

| No | Urusan / Perangkat Daerah | Program / Kegiatan | Sebelum | | Sesudah | | Selisih |
|----------|---|--|----------------|--------------------------------------|----------------|--|-----------------|
| | | | Anggaran (Rp.) | Output | Anggaran (Rp.) | Output | |
| B | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | |
| 3 | Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana lainnya | | | | | |
| | | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana lainnya | 19.430.735.400 | Pengadaan Mobil Pancar 1 (satu) unit | 11.430.735.400 | Tidak ada Pengadaan Mobil Pancar 1 (satu) unit | (8.000.000.000) |

| No | Urusan / Perangkat Daerah | Program / Kegiatan | Sebelum | | Sesudah | | Selisih |
|----------|---------------------------------|--|------------------------|---|-----------------------|---|-------------------------|
| | | | Anggaran (Rp.) | Output | Anggaran (Rp.) | Output | |
| C | Urusan Pendidikan | | | | | | |
| 4 | Dinas Pendidikan | Program Pendidikan Non Formal | | | | | |
| | | Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C | 3.139.140.000 | Pemberian Laptop untuk paket kesetaraan | 2.208.737.712 | Tidak Ada Pemberian Laptop untuk paket kesetaraan | (930.402.288) |
| D | Urusan Penunjang Lainnya | | | | | | |
| 5 | Inspektorat | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | |
| | | Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor | 26.308.397.712 | Pembangunan Gedung Kantor 1 (satu) unit | 0 | Tidak ada Pembangunan Gedung Kantor 1 (satu) unit | (26.308.397.712) |
| | TOTAL BELANJA LANGSUNG | | 142.809.292.717 | | 88.023.292.717 | | (55.438.800.000) |

| No | Urusan / Perangkat Daerah | Program / Kegiatan | Sebelum | | Sesudah | | Selisih |
|----|--|---|----------------|--|-----------------------|--|---|
| | | | Anggaran (Rp.) | Output | Anggaran (Rp.) | Output | |
| | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | | | |
| 6 | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) | Belanja Tidak Langsung (Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa | 0 | Tidak ada alokasi BTL untuk Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) SMA/K | 33.750.000.000 | Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) SMA/K sebanyak : - SMA 4.588 orang siswa - SMK 12.287 orang siswa | 33.750.000.000 |
| | | Belanja Tidak Langsung (Bantuan Sosial yang direncanakan) | 0 | Tidak ada alokasi BTL untuk Mahasiswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) | 17.188.800.000 | Mahasiswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) sebanyak 3.581 mahasiswa | 17.188.800.000 |
| | TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG | | 0 | | 50.938.800.000 | | 50.938.800.000 |
| | SELISIH BELANJA LANGSUNG - BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | | | 4.500.000.000 (dialokasikan ke Belanja Tidak Terduga) |

2. Perubahan Kebijakan Belanja Urusan Kesehatan.

Perubahan kebijakan Belanja Langsung Dinas Kesehatan pada Tahun 2020 adalah merubah pos anggaran pada Kegiatan Jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin, kepada belanja Tidak Langsung berupa Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan. Data detail perubahan kebijakan urusan kesehatan dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Perubahan Kebijakan Belanja Urusan Kesehatan

| Sebelum | | | | Sesudah | | | |
|----------|---|---|------------------|---------|--|---|------------------|
| No | Program / Kegiatan | Output : | Anggaran (Rp.) | No | Program / Kegiatan | Output : | Anggaran (Rp.) |
| | Program : Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat | | | | Program : Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat | | |
| 1 | Kegiatan : Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin | Output : Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan | 60.288.766.080,- | 1 | Kegiatan : Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin | Output : Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan | 57.334.741.280,- |
| | | | | | Belanja Tidak Langsung (Bantuan Sosial yang direncanakan) | Output : Jumlah masyarakat miskin yang belum mendapatkan jaminan pembiayaan kesehatan, tetapi sudah mendapatkan pelayanan kesehatan | 954.024.800,- |

| Sebelum | | | | Sesudah | | | |
|---------|--------------------|----------|-------------------------|---------|--|--|-------------------------|
| No | Program / Kegiatan | Output : | Anggaran (Rp.) | No | Program / Kegiatan | Output : | Anggaran (Rp.) |
| | | | | | Belanja Tidak Langsung (Bantuan Sosial yang tidak direncanakan) | Output : Jumlah masyarakat miskin yang belum mendapatkan jaminan pembiayaan kesehatan dan belum mendapatkan pelayanan kesehatan | 2.000.000.000,- |
| | TOTAL | | 60.288.766.080,- | | TOTAL | | 60.288.766.080,- |

Perubahan belanja urusan Pendidikan dan Kesehatan tersebut, berdampak kepada komposisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2020, sebagai mana tercantum dalam Tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6
Rincian Kebijakan Belanja pada APBD Tahun 2020, Perwal Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2020 dan Proyeksi Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020

| NO | URAIAN | JUMLAH (RP) | | | SELISIH |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | APBD 2020* | APBD 2020 (Pergeseran)** | Proyeksi Perubahan Kedua RKPD 2020** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5-3) |
| 2 | BELANJA | 7,698,341,521,707.08 | 7,776,083,211,162.08 | 7,776,083,211,162.08 | 77,741,689,455.00 |
| 2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3,298,847,433,840.76 | 3,274,860,597,532.76 | 3,395,780,157,332.76 | 96,932,723,492.00 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 2,930,273,954,118.76 | 2,930,273,954,118.76 | 2,930,273,954,118.76 | 0.00 |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | 140,153,204,134.00 | 140,153,204,134.00 | 140,153,204,134.00 | 0.00 |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 194,433,439,280.00 | 194,433,439,280.00 | 194,433,439,280.00 | 0.00 |
| 2.1.5 | Bantuan Sosial | 0.00 | 0.00 | 81,629,159,800.00 | 81,629,159,800.00 |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kab. / Kota dan Pemerintahan Desa | 0.00 | 0.00 | 33,750,000,000.00 | 33,750,000,000.00 |
| 2.1.7 | Belanja Tidak Terduga | 33,986,836,308.00 | 10,000,000,000.00 | 15,540,400,000.00 | (18,446,436,308.00) |
| 2.2 | BELANJA LANGSUNG | 4,399,494,087,866.32 | 4,501,222,613,629.32 | 4,380,303,053,829.32 | (19,191,034,037.00) |

Sumber: *Perda APBD Tahun Anggaran 2020

** Perwal Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020

*** Proyeksi Perubahan Kedua RKPD 2020

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam perubahan kedua RKPD Kota Bandung tidak mengalami perubahan. Pembiayaan netto hanya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp. 581,14 milyar. Rincian Pembiayaan pada Perubahan Kedua RKPD tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7
Rincian Kebijakan Pembiayaan Daerah Kota Bandung pada APBD Tahun 2020, Perwal Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2020 dan Proyeksi Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020

| NO | URAIAN | JUMLAH (RP) | | | SELISIH |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | APBD 2020* | APBD 2020 (Pergeseran)** | Proyeksi Perubahan Kedua RKPD 2020** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5-3) |
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| 3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 581,136,564,743.08 | 581,136,564,743.08 | 581,136,564,743.08 | 0.00 |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 581,136,564,743.08 | 581,136,564,743.08 | 581,136,564,743.08 | 0.00 |
| 3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.1 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.2 | Pembayaran Pokok Utang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 581,136,564,743.08 | 581,136,564,743.08 | 581,136,564,743.08 | 0.00 |
| | SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Sumber: *Perda APBD Tahun Anggaran 2020

** Perwal Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020

*** Proyeksi Perubahan Kedua RKPD 2020

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan Prioritas pembangunan daerah pada perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020 mengalami perubahan pada beberapa urusan untuk mengakomodir kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang merupakan urusan wajib layanan dasar serta tanggap darurat pencegahan dan penanganan Covid-19. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut maka secara substantif kebijakan belanja daerah mengalami perubahan yang signifikan.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berikut penjabaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023:

Misi 1 “*Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing*” Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata, dengan sasaran:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, melalui strategi:
 - a. Meningkatkan mutu infrastruktur pendidikan
 - b. Meningkatkan mutu proses pembelajaran
 - c. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
 - d. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendidikan
 - e. Meningkatkan minat baca masyarakat

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, melalui strategi:
 - a. Penyelarasan pembangunan berwawasan kesehatan.
 - b. Meningkatkan mutu layanan kesehatan
 - c. Meningkatkan kualitas lingkungan sehat
 - d. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
 - e. Meningkatkan penanggulangan gawat darurat terpadu
 - f. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan

Misi 2 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih” Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui *smart government* yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima”, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, melalui strategi:
 - a. Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
 - b. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
 - c. Mewujudkan pencegahan korupsi yang efektif
 - d. Mewujudkan birokrasi yang ramah, gesit, terampil, dan responsif
 - e. Meningkatkan pelayanan publik berbasis TIK
 - f. Meningkatkan profesionalisme aparatur
 - g. Penguatan kelembagaan tepat ukuran dan tepat fungsi
 - h. Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien
 - i. Meningkatnya manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas

Misi 3 “Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan” Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal”, dengan sasaran:

1. Meningkatkan perekonomian kota, melalui strategi:
 - a. Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif
 - b. Meningkatkan produk unggulan daerah berbasis pemberdayaan masyarakat
 - c. Meningkatkan daya saing pariwisata, lingkungan bisnis pariwisata, tata kelola, dan infrastruktur pariwisata Kota Bandung
 - d. Meningkatkan daya saing industri unggulan dan iklim perdagangan yang kondusif
 - e. Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan.
 - f. Optimalisasi kontribusi pendapatan yang bersumber dari BUMD
 - g. Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi yang kondusif
 - h. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
2. Menurunkan jumlah penduduk miskin, melalui strategi:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan bantuan/jaminan sosial bagi warga miskin
 - b. Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat
 - c. Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan
 - d. Membangun rusun untuk seluruh lapisan masyarakat dengan memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup
3. Meningkatkan kesempatan kerja, melalui strategi:
 - a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi.
 - b. Peningkatan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja
 - c. Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru berbasis padat karya
 - d. Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif

Misi 4 "Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan" Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan sasaran:

1. Meningkatnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan, melalui strategi :
 - a. Meningkatkan ketersediaan lahan
 - b. Menurunkan pelanggaran perijinan tata ruang
 - c. Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)
 - d. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman
 - e. Meningkatkan akses sanitasi dan air minum
 - f. Meningkatkan pemberdayaan kawasan kumuh
2. Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas, melalui strategi:
 - a. Meningkatkan kapasitas saluran drainase hingga terintegrasi
 - b. Meningkatkan resapan air hujan
 - c. Meningkatkan fungsi lahan pada wilayah hulu/wilayah perbatasan kota/kabupaten
 - d. Meningkatkan resapan air hujan
 - e. Meningkatkan peran serta masyarakat/swasta
 - f. Meningkatkan mobilitas penduduk kota
 - g. Meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana jalan
 - h. Meningkatkan manajemen kebutuhan lalu-lintas
 - i. Meningkatkan keselamatan berlalu-lintas
3. Meningkatnya layanan air bersih , melalui strategi:
 - a. Meningkatkan akses air bersih
 - b. Meningkatkan ketersediaan dan pasokan sumber air baku
 - c. Menurunkan tingkat kebocoran air bersih
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung, melalui strategi:
 - a. Meningkatnya Indeks Kualitas Air
 - b. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara
 - c. Meningkatnya penanganan sampah
 - d. Meningkatnya pengurangan sampah

Misi 5 "Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi" Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta, dengan sasaran:

1. Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan, melalui strategi Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan kota
2. Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan, melalui strategi Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan melalui kerjasama daerah (antara lain pengelolaan TJSL/CSR, kerjasama pemerintah daerah dengan pihak lain, pembiayaan infrastruktur non anggaran pemerintah, dan lain sebagainya)

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 dijabarkan dari misi pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang masih relevan dengan perkembangan serta target RPJPD pada periode ke IV. Secara lebih rinci, uraian tujuan dan sasaran yang digunakan sebagai dasar perumusan isu strategis serta prioritas pembangunan pada Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Berdasarkan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

| No | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal 2018 | Target Kinerja Sasaran 2020 | PD Pengampu |
|---|---|----------------------------|--------|-------------------|-----------------------------|-------------|
| Misi 1: Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing | | | | | | |
| 1. | Membangun masyarakat Kota Bandung yang mandiri dengan jaminan pendidikan, kesehatan yang bermutu, adil dan merata berlandaskan nilai agama dan budaya | Indeks Pembangunan Manusia | poin | 80,31 | - | |

| No | Tujuan/ Sasaran | | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal 2018 | Target Kinerja Sasaran 2020 | PD Pengampu |
|--|---|----------|---|-------------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| | Meningkatnya Kualitas Pendidikan masyarakat | 1 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 13,90 | 14,01 | Disdik |
| | | 2 | Angka Kelulusan | Persentase | 100 | 100 | |
| | | 3 | Rata-rata Nilai Hasil ujian SD | Angka | 76,72 | 76,76 | |
| | | 4 | Rata-rata Nilai Hasil ujian SMP | Angka | 57,02 | 57,04 | |
| | Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat | 5 | Umur Harapan Hidup | Tahun | 73,86 | 73,92 | Dinkes, DPPKB |
| Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih | | | | | | | |
| 2. | Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien | | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 69,81 | - | |
| | Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | 1 | Nilai Evaluasi AKIP Kota | Predikat | A | A | Bappelitbang Inspektorat, SETDA, |
| | | 2 | Nilai LPPD Kota | Predikat | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| | | 3 | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | Predikat | WDP | WTP | BPKA |
| | | 4 | Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks Kepuasan baik | Persentase | 51,61 | 70 | DPMPTSP, Disdukcapil, |
| | | 5 | Level Kematangan Smart City Kota Bandung | Tingkat | Integrative | Integrative | Diskominfo |
| Misi 3: Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan | | | | | | | |
| 3 | Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan | 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persentase | 7,21 | - | |
| | | 2 | Indeks Gini | Poin | 0,43 | - | |
| | Meningkatnya perekonomian kota | 1 | PDRB Per Kapita | Juta Rp | 69,20 | 73,38 | Diskop UMKM, Disdagin, Dispangtan, DPMPTSP |
| | | 2 | Indeks Daya Saing Pariwisata | poin | 3,27 | 3,55 | Disbudpar |
| | | 3 | Pengeluaran Per Kapita | Ribu rupiah/orang/tahun | 16.156 | 16.584 | Diskop UMKM, Disdagin, Dispangtan |
| | Meningkatkan kesempatan kerja | 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 8,44 | 8,34 | Disnaker, Diskop UMKM, Disbudpar, Dispora, Dispangtan |
| | Menurunnya jumlah penduduk miskin | 5 | Angka Kemiskinan | % | 4,17 | 3,66 | Dinsosnangkis, Dispangtan, DPKP3, Disdik, Dinkes |

| No | Tujuan/ Sasaran | | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal 2018 | Target Kinerja Sasaran 2020 | PD Pengampu |
|--|---|----|---|--------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Misi 4: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan | | | | | | | |
| 4 | Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan | 1 | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur | Poin | 7,375 | - | |
| | Meningkatnya ruang Kota yang nyaman, dan berkelanjutan | 1 | Persentase RTH | % | 12,2 | 12,6 | Dinas Penataan Ruang, DPKP3 |
| | Meningkatnya infrastruktur Kota terpadu dan berkualitas | 2 | Lama genangan yang tertangani pada titik genangan | Menit | 120 | 80 | DPU, |
| | | 3 | Jumlah aspek penyebab kemacetan | Aspek | 12 | 10 | Dishub, |
| | | 4 | Persentase luasan kawasan kumuh | % | 9,76 | 3,96 | DPKP3 |
| | | 5 | Cakupan layanan Air bersih | % | 77,27 | 80 | PDAM, DPKP3 |
| | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung | 6 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 32,56 | 35,47 | DLHK |
| | | 7 | Cakupan layanan pengelolaan sampah kota | % | 97,47 | 98,3 | DLHK |
| Misi 5: Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi | | | | | | | |
| 5. | Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan | 1 | Persentase pembiayaan pembangunan dari non APBD terhadap Belanja Langsung APBD Kota | % | 17,86 | - | |
| | Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan kepentingan lainnya | 1 | Tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan | | 193 Miliar | Meningkat 4% dari tahun 2018 | SETDA, DP3APM |
| | Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan | 2. | Persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan (sesuai Perda 13 Tahun 2012) yang dibiayai dari TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga | % | 71,43 | 71,43 | DP3APM |
| | | 3 | Persentase realisasi program/ agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari swasta | % | 0 | 33,33 | SETDA |

Sumber: RPJMD Kota Bandung 2018-2023 diolah

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Bandung Tahun 2020 mengacu dan memperhatikan : (1) Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023; (2) Hasil Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2019; (3) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020; (4) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2020; dan (5) RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031. Prioritas pembangunan Kota Bandung pada Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020 merupakan prioritas pembangunan pada tahun kedua RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Prioritas pembangunan daerah, pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan daerah pada Perubahan Kedua RKPD Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan:

Prioritas I:

Prioritas I merupakan prioritas pembangunan daerah tahun rencana dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD (program pembangunan daerah) dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas pendidikan 20% (duapuluh persen) yang terangkum dalam prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Suatu prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prioritas II:

Prioritas II merupakan prioritas program ditingkat Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya telah mengandung penghitungan alokasi pagu kewilayahandan dengan memperhatikan prioritas I yang berhubungan dengan Perangkat Daerah terkait. Suatu prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani.

Prioritas III:

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung, seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga. Selain berpedoman pada pencapaian target kinerja pada RPJPD Kota Bandung Tahap ke IV, kinerja RPJMD periode 2018-2023 yang belum mencapai target, evaluasi kinerja sampai dengan Tahun 2019, serta permasalahan pembangunan Kota Bandung yang belum tertangani, penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan pada level yang lebih tinggi yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Proses Penentuan Prioritas dilakukan dengan pembobotan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dilakukan pembobotan terhadap prioritas pembangunan turunan dari sasaran yang merepresentasikan penyelenggaraan urusan dihitung skalanya dengan membandingkan terhadap 8 (delapan) indikator yang digunakan yaitu:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan;
7. Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan;
8. Pencapaian SDGs dan SPM.

Selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD Kota Bandung, penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan pada level yang lebih tinggi yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan di Kota Bandung, maka ditetapkan prioritas Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan;
2. Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan;
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan TIK;
4. Penyelesaian permasalahan layanan Infrastruktur Kota;
5. Peningkatan Perekonomian Kota;
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan;
7. Sinergitas Pembiayaan Pembangunan.

Prioritas yang telah disusun pada implementasinya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Program/Kegiatan tersebut menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung pada periode 2018-2023 pada tahun kedua.

4.2.1 Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi

a. Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional.

Prioritas pembangunan daerah merupakan fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara

bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya. Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah serta mempedomani Prioritas Nasional. Berikut merupakan acuan prioritas nasional yang dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas daerah :

1. Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita)

Adapun Sembilan agenda pembangunan (Nawacita) yang dipaparkan dalam rencana Pembangunan Nasional, sebagai berikut:

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

- Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
- Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- Melakukan revolusi karakter bangsa;
- Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sinkronisasi serta keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kota Bandung Tahun 2020 dengan prioritas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dengan
Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020

| No | Prioritas Nasional | Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020 |
|----|---|--|
| 1 | Cita 1: Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara | Peningkatan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| 2 | Cita 2: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya | Peningkatan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| 3 | Cita 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan | - |
| 4 | Cita 4: Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya | Peningkatan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| 5 | Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; | Peningkatan kualitas pendidikan dan derajat Kesehatan |
| 6 | Cita 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional | Peningkatan perekonomian Kota Pembiayaan Pembangunan |
| 7 | Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik | Peningkatan perekonomian Kota Pembiayaan Pembangunan |
| 8 | Cita 8: Melakukan revolusi karakter bangsa | Peningkatan kualitas pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat |
| 9 | Cita 9: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia | - |

Sumber: *RPJMD Kota Bandung 2018-2023 diolah*

Selain berpedoman terhadap Nawacita, Penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2020 juga memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 serta tujuan pembangunan berkelanjutan *SDG's (Sustainable Development*

Goals) yang terdiri dari 17 sasaran pembangunan global. Adapun sinkronisasi antara Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020 dengan Target SDG's dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020
dengan Tujuan SDG's

| No | Tujuan SDGs | Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020 |
|----|--|--|
| 1 | Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun; | Penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan |
| 2 | Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan; | Penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan |
| 3 | Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia; | Peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat |
| 4 | Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang; | Peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan |
| 5 | Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan; | - |
| 6 | Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang; | Peningkatan infrastruktur kota terpadu dan berkualitas |
| 7 | Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang; | Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota |
| 8 | Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang; | Peningkatan perekonomian kota |
| 9 | Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi; | Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota |
| 10 | Mengurangi kesenjangan; | Penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan |
| 11 | Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan; | Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota |
| 12 | Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; | Peningkatan perekonomian kota |
| 13 | Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya; | Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota |

| No | Tujuan SDGs | Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020 |
|----|--|--|
| 14 | Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan; | - |
| 15 | Melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati; | Pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan |
| 16 | Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif diseluruh tingkatan; | Peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat |
| 17 | Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (<i>means of implementation</i>) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. | Sinergitas pembiayaan pembangunan |

Sumber: RPJMD Kota Bandung 2018-2023 diolah

Kemudian sinkronisasi serta keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kota Bandung Tahun 2020 dengan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020

| No | Prioritas RKP Tahun 2020 | Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020 |
|----|--|---|
| 1 | Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan | Peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan |
| | | Penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan |
| 2 | Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah | Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota |
| 3 | Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja | Peningkatan perekonomian kota |
| 4 | Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan | Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota |
| | | Pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan |
| 5 | Stabilitas Pertahanan dan Keamanan | - |

Sumber: RPJMD Kota Bandung 2018-2023 diolah

b. Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Provinsi

Selain berpedoman terhadap prioritas nasional, pembangunan Kota Bandung juga berorientasi terhadap prioritas Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, berikut merupakan sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020 dan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Tabel 4.5
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Prioritas
Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

| No | Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 | Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020 |
|----|--|---|
| 1. | Akses pendidikan untuk semua | Peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan |
| 2. | Desentralisasi pelayanan kesehatan | Peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan |
| 3. | Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi | Peningkatan perekonomian kota |
| 4. | Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata | Peningkatan perekonomian kota |
| 5. | Pendidikan agama dan tempat ibadah juara | - |
| 6. | Infrastruktur konektivitas wilayah | Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota |
| 7. | Gerakan bangun desa (Gerbang desa) | Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota |
| 8. | Subsidi gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) | Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan |
| 9. | Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah (reformasi birokrasi) | Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK |

Sumber: *RPJMD Kota Bandung 2018-2023* diolah

4.2.2 Keterkaitan dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

Prioritas pembangunan Kota Bandung Tahun 2020 yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, dicapai dengan pelaksanaan program oleh perangkat daerah, program yang dilaksanakan untuk mencapai prioritas daerah disebut program prioritas. Pada penyusunan Perubahan Kedua RKPD Tahun 2020, program prioritas adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang outcomenya ditujukan untuk mewujudkan sasaran

daerah, anggaran untuk program prioritas dimaksud dipenuhi secara optimal sebelum mengalokasikan anggaran untuk program non prioritas atau program yang sifatnya mendukung atau supporting.

Berikut disajikan target kinerja prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Bandung tahun 2020 pada RPJMD Kota Bandung 2018-2023.

Tabel 4.6
Target Kinerja Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kota Bandung Tahun 2020 pada RPJMD Kota Bandung 2018-2023

| No | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Tahun 2020 | Target akhir RPJMD | Perangkat Daerah |
|-------|---|--|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1.1 | Tujuan: Membangun masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan yang Bermutu, Adil dan Merata berlandaskan Nilai-nilai Agama dan Budaya | Indeks Pembangunan Manusia | 80.31 | 80.70 | 81.20 | |
| 1.1.1 | Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat | Harapan Lama Sekolah | 13.90 | 14.01 | 14.04 | |
| | | Angka Kelulusan | 100% | 100% | 100% | |
| | | Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD | 76,72 | 76,76 | 76,82 | |
| | | Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP | 57,02 | 57,04 | 57,07 | |
| 1 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | Angka Partisipasi Kasar PAUD | 56% | 100% | 100% | Dinas Pendidikan |
| 2 | Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar | Angka Partisipasi Kasar SD | 102,12% | 100% | 100% | |
| | | Angka Partisipasi Kasar SMP | 103,10% | 100% | 100% | |
| | | Persentase inovasi pendidikan yang dimanfaatkan untuk pelayanan pendidikan | 100% | 100% | 100% | |
| | | Persentase manajemen pelayanan pendidikan yang dimanfaatkan | NA | 100% | 100% | |
| 3 | Program Pendidikan Non Formal | Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan | 100% | 100% | 100% | |
| 4 | Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | Persentase sekolah yang difasilitasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | 100% | 100% | 100% | |
| 5 | Program Bantuan Pendidikan | Angka Putus Sekolah SD | 0,01% | 0,01% | 0,01% | |
| | | Persentase siswa miskin SD yang mendapatkan bantuan pendidikan | NA | 100% | 100% | |
| | | Angka Putus Sekolah SMP | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |

| No | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Tahun 2020 | Target akhir RPJMD | Perangkat Daerah |
|--------------|---|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | Persentase siswa miskin SMP yang mendapatkan bantuan pendidikan | NA | 100% | 100% | |
| | | Persentase peserta didik dan mahasiswa berprestasi yang mendapat bantuan pendidikan | NA | 100% | 100% | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase masyarakat miskin yang mendapat bantuan pendidikan | NA | 100% | 100% | |
| 6 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang disertifikasi | 50,59% | 52,55% | 54,95% | |
| 7 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca | Persentase pemustaka per tahun | 4,475% | 5,50% | 7,00% | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 8 | Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan dan Kearsipan | Persentase <i>smart library</i> yang berfungsi dengan baik di Kota Bandung | 1,54% | 2,54% | 4,03% | |
| | | Persentase perangkat daerah yang menyelenggarakan sistem kearsipan secara baku | 28,12% | 44,87% | 68,75% | |
| 1.1.2 | Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Umur Harapan Hidup | 73.86 | 73.92 | 73.98 | |
| 1 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase tingkat kesehatan keluarga | NA | 79,24% | 81.63% | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase masalah gizi ditangani sesuai standar | NA | 100% | 100% | |
| 2 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri | 7.95 % | 9.6% | 12.8 % | |
| | | Cakupan Peningkatan PHBS tatanan Rumah Tangga | 67.8 % | 67.9% | 68.5 % | |
| 3 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persentase rekomendasi IKL yang ditindaklanjuti | NA | 100% | 100% | |
| 5 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar | 37% | 37.59% | 51.00% | |
| 6 | Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan | Cakupan Pelayanan Laboratorium Kesehatan | 100% | 100% | 100% | |
| 7 | Program Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu | Cakupan Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu | N/A | 1,60% | 2,50% | |
| 8 | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | Persentase Unit Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang memenuhi standar pelayanan | 100% | 100% | 100% | |
| 9 | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | persentase sarana prasarana kesehatan dalam kondisi baik | 100% | 100% | 100% | |
| 10 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah | Cakupan Pelayanan BLUD | 40,30% | 74,71% | 100% | |

| No | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Tahun 2020 | Target akhir RPJMD | Perangkat Daerah |
|----|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 11 | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan | Persentase kecamatan dengan puskesmas dibandingkan rasio jumlah puskesmas dan jumlah penduduk sesuai WHO (1:30.000 penduduk) | NA | 100% | 100% | Dinas Kesehatan |
| 12 | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Persentase tingkat pencegahan dan pengendalian penyakit | NA | 100% | 100% | |
| 13 | Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat | Persentase masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan | 95% | 100% | 100% | |
| | | Persentase masyarakat miskin yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan | 100% | 100% | 100% | |
| 14 | Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan | Peningkatan persentase pengelolaan sumber daya kesehatan | NA | 77,40% | 82,88% | |
| 15 | Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim | Indeks SO ₂ | 1.17 poin | 1.16 poin | 1.13 poin | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan |
| 16 | Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air | Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan" | 39.13 persen | 41.30 persen | 43.48 persen | |
| 17 | Program Pencegahan Dampak Lingkungan | Cakupan pencegahan dampak lingkungan akibat kebijakan dan usaha/ kegiatan | 100 persen | 100 persen | 100 persen | |
| 18 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah B3 | Persentase Limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang terkelola | 0 persen | 0.51 persen | 0.93 persen | |
| 19 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Jumlah sampah yang termanfaatkan dan didaur ulang di sumber sampah | 103.601 ton | 130.735 ton | 206.653 ton | |
| 20 | Program Perlindungan dan Konservasi SDA | Persentase kawasan konservasi terpelihara | 8.8% | 28.99% | 67.60% | |
| 21 | Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air | Lama genangan yang tertangani pada titik genangan | 120 Mnt | 80 Mnt | 30 Mnt | Dinas Pekerjaan Umum |
| 22 | Program Penataan Kawasan Permukiman | Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh | 9.76% | 3.96% | 2.16% | DPKP3 |
| 23 | Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan | Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak | 64.23% | 67.70% | 70.52% | |
| 24 | Program Keluarga Berencana | Persentase peserta KB aktif | 72.29% | 73% | 74.50% | DPPKB |
| 25 | Program Ketahanan Keluarga | Persentase Kelompok Tribina Aktif | N/A | 74.56% | 86.26% | |
| 26 | Program Promosi Keluarga Berencana | Jumlah peserta KB baru | 2.000 pasangan akseptor | 2.625 pasangan akseptor | 3.040 pasangan akseptor | |
| | | Jumlah Kampung KB aktif | 15 | 31 | 58 | |
| 27 | Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak | Persentase Kelurahan Layak Anak | 47.68% | 52.28% | 100% | DP3APM |

| No | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Tahun 2020 | Target akhir RPJMD | Perangkat Daerah |
|-----|---|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 28 | Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Pemenuhan Hak Lanjut Usia | Persentase ketercapaian kriteria Kota Layak Anak | NA | 25% | 85% | |
| 29 | Program Perlindungan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | Persentase Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | 100% | 100% | 100% | |
| 30 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan | Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik | N/A | 30.50% | 100% | |
| 31 | Program Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan | Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi | 91% | 92% | 95% | |
| 32 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Ternak | Jumlah Maksimum Kasus Penyakit Zoonosa | 7 kasus | 7 kasus | 7 kasus | Dinas Pangan dan pertanian |
| 33 | Program Ketahanan Pangan | Skor Pola Pangan Harapan | 84.25 | 84.27 | 84.30 | Dinas Pangan dan pertanian |
| | | Jumlah cadangan pangan ekuivalen besar | 60 ton | 80 ton | 80 ton | |
| 34 | Program pengembangan budidaya perikanan | Produksi ikan konsumsi | 2.970 ton | 2.970,5 ton | 2.972 ton | Dinas Pangan dan pertanian |
| | | Produksi ikan hias | 1.222.00 0 ekor | 1.272.000 ekor | 1.422.00 | |
| | | Tingkat konsumsi ikan | 37.95 kg/kap/ th | 37.97 kg/kap/ th | 38.02 kg/kap/th | |
| 35 | Program Pembinaan Keolahragaan | Persentase rata-rata pembinaan keolahragaan | 90% | 90% | 90% | |
| 36 | Program Pengembangan Infrastruktur Kepemudaan dan Keolahragaan | Persentase infrastruktur kepemudaan dan keolahragaan yang berfungsi dengan baik | NA | 100% | 100% | |
| 2.1 | Tujuan : Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien | Indeks Reformasi Birokrasi | 69.81 | NA | 70.13 | |
| | Sasaran : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | Nilai Evaluasi AKIP Kota | A | A | A | |
| 1 | Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kota Bandung komponen pelaporan | 12.61 | 13.25 | 14.00 | Sekretariat Daerah |
| 2 | Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase rata-rata penyusunan dok pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu | 100% | 100% | 100% | Bappelitbang |
| 3 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase rata-rata penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu | 100% | 100% | 100% | |
| 4 | Program Penyusunan Data, Informasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan | Persentase penyelesaian dokumen LKPJ tepat waktu | 100% | 100% | 100% | |
| | | Nilai LPPD Kota | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | |
| 5 | Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pem Daerah | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | 34.110 | 3.4200 (ST) | 3.4500 (ST) | Sekretariat Daerah |
| | | | (ST) | | | |

| No | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Tahun 2020 | Target akhir RPJMD | Perangkat Daerah |
|----|--|---|--|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| 6 | Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah | Persentase penyelenggaraan OTDA, pemerintahan daerah dan pemerintahan wilayah | 100% | 100% | 100% | |
| | | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | WDP | WTP | WTP | |
| 7 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah | Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan | 2 Dok | 2 Dokumen | 2 Dokumen | |
| | | Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan | 350 lokasi /bidang tanah | 30 lokasi /bidang tanah | 500 lokasi /bidang tanah | |
| | | Persentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN | 17.64% | 21% | 30% | |
| 8 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP | 60 Hari Kerja RAPBD dan 30 Hari Kerja RAPBDP | Tepat waktu | Tepat waktu | |
| | | Rata rata penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai peraturan perundang undangan | 2 hari kerja | 2 hari kerja | 2 hari kerja | |
| | | Laporan keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang undangan | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 14 Dokumen | |
| 9 | Program peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah | Persentase PD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material | 80% | 85% | 100% | Inspektorat |
| 10 | Program dukungan Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi | Persentase capaian pelaksanaan pengawasan | 80% | 80% | 100% | |
| 11 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Pemerintah Daerah | Persentase capaian sistem pengawasan /pengendalian internal | 100% | 100% | 100% | |
| | | Tingkat pemenuhan kapabilitas aparat pengawass | NA | Level 3 | Level 3 | |
| | | Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik" | 51.61 | 60 | 100 | |
| 12 | Program Pengembangan Kebijakan Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah | Persentase Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah | 100% | 100% | 100% | Sekretariat Daerah |
| 13 | Program Pelayanan Perijinan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | 80.19 | 80.25 | DPMPSTP |
| 14 | Program Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan | Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan | NA | 60% | 75% | Disdukcapil |
| 15 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Persentasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | BKPP |
| 16 | Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian | Persentase akurasi data kepegawaian | 96,38% | 97,83% | 100% | |

| No | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Tahun 2020 | Target akhir RPJMD | Perangkat Daerah |
|--------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 17 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Presentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/thn | 42,08% | 52,40% | 74,06% | |
| 18 | Program Layanan Informasi Publik | Persentase layanan informasi melalui media kepada masyarakat | 100% | 100% | 100% | Dinas Kominfo |
| 19 | Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan dan Sistem Administrasi Kearsipan | Cakupan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan | 100% | 100% | 100% | Dispusip |
| 20 | Program Layanan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD kepada pimpinan dan anggota DPRD | 85% | 85% | 85% | Setwan |
| 21 | Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik | 79,64% | 80% | 80,50% | Disdukcapil |
| | | Level Kematangan Smart City Kota Bandung | Integrative | Integrative | Smart | |
| 22 | Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Cakupan persentase dokumen hasil kajian yang digunakan dalam rumusan kebijakan yang di implementasikan | 50% | 60% | 90% | Dinas Kominfo |
| 23 | Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi | Persentase interkoneksi pengembangan infrastruktur TIK yang berfungsi | 100% | 100% | 100% | |
| 3.1 | Tujuan: Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan | Laju Pertumbuhan Ekonomi | 7.21 | 7.51 | 7.98 | |
| 3.1.1 | Sasaran : Meningkatnya perekonomian kota | PDRB Perkapita | 69.20 | 73.38 | 81.33 | |
| | | Indeks Daya Saing Pariwisata | 3.27 | 3.55 | 3.74 | |
| | | Pengeluaran Per Kapita | 16.156 ribu rupiah/org/thn | 16.584 ribu rupiah/org/thn | 17.227 ribu rupiah/org/thn | |
| 1 | Program Pemberdayaan UMKM | Jumlah usaha mikro yang skala usahanya meningkat | N/A | 240 UMKM | 1.200 UMKM | Dinas KUMKM |
| 2 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Jumlah Koperasi berkualitas | N/A | 30 Koperasi | 220 Koperasi | |
| 3 | Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Unggulan | Jumlah sentra Industri yang meningkat daya saingnya | - | 4 Sentra | 16 Sentra | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 4 | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | Nilai Ekspor Kota Bandung | US\$ 466 jt | US\$ 467 jt | US\$ 470 juta | |
| 5 | Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri | Pelaku usaha perdagangan dalam negeri berkualitas | 255 Pelaku Usaha | 275 Pelaku Usaha | 1.955 Pelaku Usaha | |
| 6 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Produksi Ikan Konsumsi | 2.970 ton | 2.970,5 ton | 2.972 ton | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 7 | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Produktivitas Tanaman Padi | 68.08 kw/ha | 68.22 kw/ha | 68.64 kw/ha | |
| 8 | Program Peningkatan Produksi Peternakan | Populasi Ternak Domba | 36.756 ekor | 36.829 ekor | 39.849 ekor | |

| No | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Tahun 2020 | Target akhir RPJMD | Perangkat Daerah |
|----|--|---|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 9 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Jumlah Investor (PMDN/PMA) | 400 investor | 550 investor | 700 investor | DPMPTSP |
| | | Persentase perusahaan yang menindaklanjuti promosi investasi | NA | 100% | 100% | |
| 10 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) | 4,756 Triliun | 5,65 Triliun | 7,12 Triliun | |
| 11 | Program Pembangunan dan Pengembangan Destinasi Wisata | Persentase daya tarik wisata dikembangkan | N/A | 24% | 48,00% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 12 | Program Pengembangan Industri Pariwisata | Persentase jasa usaha pariwisata berstandar baik / tersertifikasi jasa usaha | N/A | 10,78% | 26,95% | |
| 13 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Indeks <i>brand awareness</i> pariwisata Kota Bandung | N/A | 3,80 | 4,24 | |
| 14 | Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata | Persentase lembaga dan SDM Pariwisata meningkat kompetensinya | N/A | 1,94% | 4,84% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 15 | Program Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan | Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi | N/A | 0,52% | 2,10% | |
| 16 | Program Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan | Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan | N/A | 0,52% | 2,10% | |
| 17 | Program Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Persentase sub objek pemajuan kebudayaan dimanfaatkan | N/A | 0,52% | 2,10% | |
| 18 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Jumlah peserta pelatihan yang meningkat kompetensinya | 180 orang | 220 orang | 1.480 orang | Dinas Tenaga Kerja |
| 19 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan | 45,30% | 45,56% | 46,19% | |
| 20 | Program Padat Karya | Jumlah Pekerja Padat Karya | 300 orang | 600 orang | 3.000 orang | |
| 21 | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Persentase kasus selesai melalui perjanjian bersama | 58% | 58% | 59% | |
| 22 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku | 100% | 100% | 100% | BPPD |
| 23 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah | Persentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN | 17.64% | 21% | 30% | |
| 24 | Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Pendapatan Pajak Daerah | 2.436.311.172.989 | 2.522.552.659.693 | 3.082.342.305.461 | |
| 25 | Program Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air | Lama genangan yang tertangani pada titik genangan | 120 menit | 80 menit | 30 menit | Dinas Pekerjaan Umum |
| 26 | Program Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum | Jumlah PJU dalam kondisi baik | 44.000 Ttk | 2.500 Ttk | 56.500 Ttk | |
| 27 | Program Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan | Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap | 92% | 94% | 97% | |
| 28 | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Persentase penumpang sarana angkutan umum | 19.5% | 20,25% | 21% | Dinas Perhubungan |
| 29 | Program Penataan Kawasan Permukiman | Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh | 9.76% | 3.96% | 2.16% | DPKP3 |

| No | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Tahun 2020 | Target akhir RPJMD | Perangkat Daerah |
|-------|---|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| 3.2 | Tujuan: Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan | Indeks Gini | 0.44 | 0.43 | 0.40 | |
| | | | | | | |
| 3.2.1 | Sasaran : Meningkatkan kesempatan kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | 8.44 | 8.34 | 8.22 | |
| | | | | | | |
| 1 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Jumlah Peserta pelatihan yang meningkat kompetensinya | 180 orang | 280 orang | 1.600 orang | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan | 45,30% | 45,56% | 46,19% | Dinas Tenaga Kerja |
| 3 | Program Padat Karya | Jumlah Pekerja Padat Karya | 300 orang | 600 orang | 3.000 orang | |
| 4 | Program Pendidikan Non Formal | Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan | 0.22 % | 0.27 % | 0.33 % | Dinas Pendidikan |
| 5 | Program Pengembangan Ekosistem Kreatif | Aktivasi sub sektor ekonomi kreatif | 25% | 62.50% | 93.75% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 6 | Program Pengembangan Infrastruktur Terpadu Ekonomi Kreatif | Persentase rumah / kampung kreatif / inkubasi / berkembang | N/A | 6.67% | 26.67% | |
| 7 | Program Pengembangan Usaha Mikro | Persentase SDM usaha mikro yang kualitasnya meningkat | NA | 60% | 60% | |
| 8 | Program Pembinaan Kepemudaan | Persentase organisasi pemuda dan pemuda yang aktif positif | 23% | 35% | 60% | |
| 9 | Program Pembinaan Keolahragaan | Persentase rata-rata pembinaan keolahragaan | 90% | 90% | 90% | |
| 10 | Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan | Bertambahnya Pelaku Usaha Bidang Peternakan | 80 orang | 90 orang | 120 orang | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 11 | Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Bertambahnya Pelaku Usaha Bidang Perikanan | 80 orang | 90 orang | 120 orang | |
| 12 | Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan | Bertambahnya Pelaku Usaha Bidang Pertanian | 80 orang | 90 orang | 120 orang | |
| 13 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan | Jumlah kelompok masyarakat di bidang pangan, pertanian dan perikanan diberkdayaan | 45 kelompo k | 48 kelompok | 57 Kelompok | |
| 14 | Program Pengembangan Infrastruktur Kepemudaan dan Keolahragaan | Persentase Infrastruktur Kepemudaan dan keolahragaan yang berfungsi dengan baik | N/A | 100% | 100% | |
| 3.2.2 | Sasaran : Menurunnya jumlah penduduk miskin | Angka Kemiskinan | 4.17 | 3.66 | 3.14 | |
| | | | | | | |
| 1 | Program Penanganan Fakir Miskin | Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya | 62.000 KK | 62.000 KK | 72.000 KK | Dinsos Nangkis |
| 2 | Program Pemberdayaan PMKS | Jumlah PMKS yang meningkat pendapatannya | N/A | 500 orang | 2.200 orang | |

| No | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Tahun 2020 | Target akhir RPJMD | Perangkat Daerah |
|----|--|---|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| 3 | Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan | Cakupan warga miskin yang memperoleh akses terhadap program pemerintah | 100% | 100% | 100% | |
| 4 | Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial | Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesos | 100% | 85% | 100% | |
| 5 | Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persentase pemenuhan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS | 100% | 100% | 100% | Dinsos Nangkis |
| 6 | Program Ketahanan Pangan | Jumlah Cadangan Pangan Ekuivalen Beras | 60 Ton | 80 Ton | 80 Ton | DisPangtan |
| | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | 84.25 | 84.27 | 84.30 | |
| 7 | Program Pemberdayaan UMKM | Jumlah UM yang usahanya meningkat | N/A | 240 UMKM | 1200 UMKM | Dinas KUMKM |
| 8 | Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan | Persentase rumah tidak layak huni diperbaiki | 34.09 % | 67.70% | 70.52% | DPKP3 |
| 9 | Program Bantuan Pendidikan | Angka Putus sekolah SD | NA | 0.01% | 0.04% (komulatif) | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Siswa Miskin SD yang mendapat Bantuan pendidikan | - | 100% | 100% | |
| | | Angka Putus Sekolah SMP | NA | 0.02% | 0.08% (komulatif) | |
| | | Persentase Siswa Miskin SMP yang mendapat Bantuan pendidikan | | 100% | 100% | |
| 10 | Program Padat Karya | Jumlah orang yang mendapatkan pekerjaan sementara (Padat Karya) | 300 orang | 600 orang | 3000 orang | Dinas Tenaga Kerja |
| 11 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Calon transmigrasi diseleksi | 120 orang | 120 orang | 600 orang | |
| 12 | Program Peningkatan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase tingkat lonjakan harga kebutuhan pokok | 15% | 15% | 15% | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 13 | Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat | Persentase kepesertaan masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan | 95% | 97% | 100% | Dinas Kesehatan |
| 14 | Program Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi | Persentase kelurahan klasifikasi swasembada | 24.50% | 56,29% | 100% | |
| | | | | | | |

| No | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Tahun 2020 | Target akhir RPJMD | Perangkat Daerah |
|-------|--|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 4.1 | Tujuan : Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur | 7.375 | NA | 8.00 | |
| | Sasaran : Meningkatnya ruang Kota yang nyaman dan berkelanjutan | | | | | |
| 4.1.1 | | Persentase RTH | 12.2% | 12.6% | 13.2% | |
| 1 | Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan | 75% | 77% | 80% | Dinas Penataan Ruang |
| 2 | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Persentase RTH yang berkualitas | 44.73% | 50,31% | 58.18% | DPKP3 |
| 3 | Program penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas | Persentase PSU milik pemerintah Kota Bandung dalam kondisi Baik | 100% | 100% | 100% | |
| 4 | Program Penegakan Produk Hukum Daerah | Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda | 100% | 100% | 100% | Bakesbangpol |
| | | Persentase Penegakan Perda | 100% | 100% | 100% | |
| 5 | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Persentase luasan RTH | 12.20% | 12.215% | 12.23% | DPKP3 BPKA |
| 6 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah | Persentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN | 17.64% | 21% | 30% | |
| 7 | Program Pelayanan Perizinan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | 82,02 | 82,04 | DPMPTSP |
| | | Pemenuhan standar pelayanan perizinan | N/A | 100% | 100% | |
| 8 | Program Pemanfaatan Ruang | Prosentase Bangunan Gedung Umum yang Memenuhi RTH Privat Sesuai Peraturan yang Berlaku | NA | 5% | 5% | Dinas Penataan Ruang |
| 9 | Program Perencanaan Tata Ruang | Jumlah Ketersediaan Dokumen Rencana Rinci Pada Pusat-Pusat Pelayanan Kota | 2 Dokume n | 2 Dokumen | 2 Dokumen | |
| 10 | Program Pengelolaan Areal Pemakaman | Persentase Areal Pemakaman ditata | 75% | 32% | 35% | |
| 11 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | Persentase kawasan konservasi terpelihara | 8.8% | 28,99% | 67.60% | Dinas Lingkungan Hidup |
| 12 | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Produktivitas Padi | 68,08 kw/ha | 68,22 kw/ha | 68,64 kw/ha | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Produksi Tanaman Sayuran | 237.000 Pohon | 278.400 Pohon | 308.270 pohon | |
| | | Produksi Tanaman Hias | 155.485 Pohon | 161.864 Pohon | 182.763 pohon | |
| | | Jumlah Penanaman Pohon Buah-buahan | 10.000 Pohon | 11.000 Pohon | 14.000 Pohon | |
| 13 | Program Pemberdayaan Kewilayahan | Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan | 64-100% | 65%-100% | 65%-100% | Kecamatan |

| No | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Tahun 2020 | Target akhir RPJMD | Perangkat Daerah |
|-------|--|--|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| 4.1.2 | Sasaran : | Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan | 120 Menit | 80 Menit | 30 Menit | |
| | Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas | | | | | |
| 1 | Program Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air | Lama genangan yang tertangani pada titik genangan | 120 Ment | 80 Mnt | 30 Mnt | Dinas Pekerjaan Umum |
| 2 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Jumlah sampah yang termanfaatkan dan didaur ulang di sumber sampah | 103.601 ton | 130.735 ton | 206.653 ton | DLHK |
| 3 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase rata-rata penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu | 100% | 100% | 100% | Bappelitbang |
| 4 | Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan | 75% | 77% | 80% | Dinas Penataan Ruang |
| 5 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | Persentase kawasan konservasi terpelihara | 8.8% | 28,99% | 67.60% | DLHK |
| 6 | Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup | Cakupan perlindungan kualitas lingkungan | 33.38% | 33,43% | 33.49% | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan |
| | | Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan | 12 Aspek | 10 Aspek | 7 Aspek | |
| 7 | Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap | 92% | 94% | 97% | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | Jumlah simpang tak sebidang yang terbangun (flyover/Underpass) | 3 | 1 | 4 | |
| | | Luasan trotoar dalam kondisi Baik | 397.535 m ² | 13.000 m ² | 462.535 m ² | |
| | | Luasan drainase dalam kondisi Baik | 602.402 m | 8.000 m | 642.402 m | |
| 8 | Program Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum | Jumlah PJU dalam kondisi baik | 44.000 Ttk | 2.500 Ttk | 56.500 Ttk | |
| 9 | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Persentase penumpang sarana angkutan umum | 19,50% | 20,25% | 21% | Dinas Perhubungan |
| 10 | Program Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Persentase ketercapaian tertib dan keselamatan lalu lintas | 1% | 10% | 25% | |
| 11 | Program Penegakan Produk Hukum daerah | Persentase Penegakan Perda | 100% | 100% | 100% | |
| | | Persentase Luasan Kawasan Kumuh | 9.76% | 3,96% | 2.16% | |
| 12 | Program Penataan Kawasan Permukiman | Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh | 9.76% | 3,96% | 2.16% | DPKP3 Dan |
| | | Cakupan layanan air bersih | 77.27% | 80% | 83% | PDAM |
| 13 | Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan | Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak | 64.23% | 67,70% | 70.52% | DPKP3 |
| 14 | Program Penyelenggaraan Penanggulangan Pra dan Tanggap Darurat Bencana | Rata-rata tingkat waktu maksimum assesment tanggap darurat bencana | N/A | 24 jam | 24 jam | DKPB |

| No | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Tahun 2020 | Target akhir RPJMD | Perangkat Daerah |
|--------------|---|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 15 | Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan | Tingkat Waktu maksimum Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) | 15 menit | 15 menit | 15 menit | |
| 16 | Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan | 75% | 77% | 80% | Dinas Penataan Ruang |
| 17 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Jumlah sampah yang termanfaatkan dan didaur ulang di sumber sampah | 103.601 ton | 130.735 ton | 206.653 ton | DLHK |
| 18 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Cakupan Peningkatan PHBS tatanan Rumah Tangga | 67.8 % | 67.9% | 68.5 % | Dinas Kesehatan |
| 19 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persentase Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Dasar | 70% | 77% | 85% | |
| 4.1.3 | Sasaran: Meningkatnya Layanan Air Bersih | Cakupan Layanan Air bersih | 77.27% | 80% | 83% | |
| 1 | Program Penataan Kawasan Permukiman | Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh | 9.76% | 3,96% | 2.16% | DPKP3 Dan |
| | | Cakupan Layanan Air bersih | 77.27% | 80% | 83% | PDAM |
| 2 | Program Peningkatan Cakupan Pelayanan | Jumlah penambahan sambungan rumah (SR) perpipaan air bersih | 15.000 SR | 10.000 SR | 91.000 SR | PDAM |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Produksi | Kapasitas produksi air baku | 3.042 ltr/det | 3.862 ltr/det | 4.129 ltr/det | PDAM |
| 4 | Program Penurunan Tingkat Kehilangan Air | Persentase pengurangan kebocoran air | 42% | 37% | 30% | PDAM |
| 4.1.4 | Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 32.56 | 35,47 | 33.16 | |
| 1 | Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air | Persentase Sungai dengan Status Indeks Pencemaran "cemar ringan" | 39.13% | 41,30% | 43.48% | DLHK |
| 2 | Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim | Indeks SO2 | 1.17 poin | 1,16 poin | 1.13 poin | |
| 3 | Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup | Cakupan perlindungan kualitas lingkungan | 33.38% | 33,43% | 33.49% | |
| 4 | Program Pencegahan Dampak Lingkungan | Cakupan pencegahan dampak kerusakan lingkungan akibat kebijakan dan usaha/kegiatan | 100.00% | 100% | 100% | |
| 5 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah B3 | Persentase Limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang terkelola | 0.00% | 0.51% | 0.93% | |
| 6 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | Persentase kawasan konservasi terpelihara | 8.8% | 28,99% | 67.60% | |
| 7 | Program Penataan Kawasan Permukiman | Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh | 9.76% | 3,96% | 2.16% | |
| 8 | Program Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air | Lama genangan yang tertangani pada titik genangan | 120 Ment | 80 mnt | 30 Mnt | |

| No | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Tahun 2020 | Target akhir RPJMD | Perangkat Daerah |
|-------|--|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 9 | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Persentase RTH yang berkualitas | 44.73% | 50,31% | 58.18% | DPKP3 |
| 10 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persentase sarana kesehatan lingkungan "memenuhi syarat" | N/A | 45% | 55% | Dinas Kesehatan |
| 11 | Program Penegakan Produk Hukum daerah | Persentase Penegakan Perda | 100% | 100% | 100% | Satpol PP |
| | | Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota | 97.47% | 98,3% | 99% | |
| 12 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Jumlah sampah yang termanfaatkan dan didaur ulang di sumber sampah | 103.601.6 ton | 130.735 ton | 644.653 ton | DLHK |
| 13 | Program Penegakan Produk Hukum daerah | Persentase penegakan perda | 100% | 100% | 100% | Satpol PP |
| 14 | Program Pemberdayaan Kewilayahan | Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan | 64-100% | 65%-100% | 65%-100% | Kecamatan |
| 5.1 | Tujuan : Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan | Tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan | 17.86% | NA | 100% | |
| 5.1.1 | Sasaran: Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan | Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi masyarakat dalam pembangunan | 193 Miliar | Meningkat 4% dari tahun 2018 | Meningkat 10% dari tahun 2018 | |
| 5.1.2 | Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan | Persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan | 71.43% | 71.43% | 100% | |
| | | Persentase realisasi program/ agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari swasta | 0% | 33.33% | 100% | |
| 1 | Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah | Persentase Kerjasama Aktif yang Diimplementasikan | 100% | 100% | 100% | |
| 2 | Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi | Jumlah perusahaan yang berkontribusi melalui TJSL | 58 perusahaan | 66 perusahaan | 81 perusahaan | Sekretariat Daerah |
| | | Jumlah perusahaan yang berkontribusi melalui Sumbangan Pihak Ketiga | 3 perusahaan | 5 perusahaan | 8 perusahaan | |
| 3 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Persentase perusahaan yang menindaklanjuti promosi investasi | N/A | 100% | 100% | DPMPSTP |
| 4 | Program Pelayanan Perijinan | Pemenuhan standar pelayanan perizinan | N/A | 100% | 100% | |

Sumber: RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 diolah

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. PAGU INDIKATIF PENDANAAN DAERAH.

Perubahan pagu indikatif pendanaan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan adanya evaluasi permasalahan yang terjadi pada Tahun 2019 yaitu tidak terpenuhinya hak pembiayaan bagi siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) SD, SMP, SMA/K dan Mahasiswa yang dapat mengakibatkan siswa/mahasiswa RMP tidak dapat melanjutkan pendidikan.
2. Masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan jaminan pembiayaan kesehatan yang dapat mengganggu kualitas hidup masyarakat. Hal ini diakibatkan karena terdapat kesalahan alokasi anggaran pada tahun 2020 yang mana menempatkan anggaran Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) dan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat pada anggaran Belanja Langsung, maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020.
3. Terjadinya wabah bencana COVID-19, sehingga melakukan penambahan alokasi Belanja Tidak Terduga untuk mencegah, menanggulangi dan melindungi kesehatan serta keselamatan jiwa masyarakat Kota Bandung.
4. Inisiatif perubahan anggaran pada perangkat daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas Pendidikan dan Inspektorat pada Tahun 2020, dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan anggaran Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, yang diperuntukan bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) SMA/K dan Mahasiswa, serta Belanja Tidak Terduga untuk menanggulangi bencana wabah COVID-19.

Alokasi pagu indikatif pada Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

§ **Belanja Tidak Langsung**

Melakukan perubahan belanja tidak langsung untuk mengakomodir pembiayaan bagi siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) SD, SMP, SMA/K dan Mahasiswa, mengakomodir pembiayaan Akses Jaminan Pembiayaan Kesehatan bagi masyarakat dan kebutuhan untuk mencegah, menanggulangi dan melindungi kesehatan serta keselamatan jiwa masyarakat Kota Bandung dari wabah bencana COVID-19.

§ **Belanja Langsung**

Melakukan perubahan alokasi belanja langsung urusan pendidikan dan kesehatan untuk mengakomodasi Bantuan Personal bagi Siswa RMP SD dan SMP baik negeri maupun swasta serta Jaminan Pembiayaan Kesehatan. Selain itu, terdapat pula penyesuaian pada beberapa urusan untuk mengakomodasi kebutuhan pembiayaan bagi siswa RMP SMA/K dan Mahasiswa, serta penanganan wabah bencana COVID-19.

5.1.1 Belanja Tidak Langsung

Dengan adanya perubahan belanja pada urusan pendidikan dan urusan kesehatan, maka komposisi belanja tidak langsung dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

| | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 1. Belanja Pegawai | Rp | 2,930,273,954,118.76 |
| 2. Belanja Bunga | Rp | 0 |
| 3. Belanja Subsidi | Rp | 140.153.204.134,00 |
| 4. Belanja Hibah | Rp | 194.433.439.280,00 |
| 5. Belanja Bantuan Sosial | Rp | 81,629,159,800.00 |
| 6. Belanja Bantuan Keuangan | Rp | 33,750,000,000.00 |
| 7. Belanja Tidak Terduga | Rp | 15,540,400,000.00 |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | Rp | 3,395,780,157,332.76 |

Berikut Rekapitulasi belanja tidak langsung Perangkat Daerah pada Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020.

Tabel 5.1.
Rekapitulasi Pagu Belanja Tidak Langsung
pada Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020

| No | Perangkat Daerah | Belanja Tidak Langsung Penjabaran Perwal Pergeseran APBD 2020 (Rp) | Proyeksi Belanja Tidak Langsung Perubahan Kedua RKPD 2020 (Rp) | Selisih |
|----|--|--|--|---------|
| 1 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 172,284,910,123.92 | 172,284,910,123.92 | - |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 11,716,338,912.45 | 11,716,338,912.45 | - |
| 3 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 24,595,207,081.92 | 24,595,207,081.92 | - |
| 4 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 74,384,219,089.37 | 74,384,219,089.37 | - |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan | 20,120,935,425.60 | 20,120,935,425.60 | - |
| 6 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 45,004,011,973.61 | 45,004,011,973.61 | - |
| 7 | Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana | 30,333,499,597.88 | 30,333,499,597.88 | - |
| 8 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 17,090,560,705.96 | 17,090,560,705.96 | - |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 18,712,637,415.65 | 18,712,637,415.65 | - |
| 10 | Dinas Kesehatan | 301,090,134,684.83 | 301,090,134,684.83 | - |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 15,611,803,120.96 | 15,611,803,120.96 | - |
| 12 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | 11,797,739,414.96 | 11,797,739,414.96 | - |
| 13 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan | 13,248,700,943.31 | 13,248,700,943.31 | - |
| 14 | Dinas Pangan dan Pertanian | 20,357,819,571.24 | 20,357,819,571.24 | - |
| 15 | Dinas Pekerjaan Umum | 46,646,117,744.55 | 46,646,117,744.55 | - |
| 16 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat | 11,114,813,255.62 | 11,114,813,255.62 | - |
| 17 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 17,261,912,354.01 | 17,261,912,354.01 | - |

| No | Perangkat Daerah | Belanja Tidak Langsung Penjabaran Perwal Pergeseran APBD 2020 (Rp) | Proyeksi Belanja Tidak Langsung Perubahan Kedua RKPD 2020 (Rp) | Selisih |
|----|---|--|--|---------|
| 18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 19,903,464,057.74 | 19,903,464,057.74 | - |
| 19 | Dinas Penataan Ruang | 45,253,076,330.36 | 45,253,076,330.36 | - |
| 20 | Dinas Pendidikan | 1,330,918,788,516.88 | 1,330,918,788,516.88 | - |
| 21 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 11,306,707,687.17 | 11,306,707,687.17 | - |
| 22 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 14,807,512,576.84 | 14,807,512,576.84 | - |
| 23 | Dinas Perhubungan | 61,929,265,844.45 | 61,929,265,844.45 | - |
| 24 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 10,656,511,268.44 | 10,656,511,268.44 | - |
| 25 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan | 28,997,039,660.70 | 28,997,039,660.70 | - |
| 26 | Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | 11,572,927,406.88 | 11,572,927,406.88 | - |
| 27 | Dinas Tenaga Kerja | 14,587,424,867.18 | 14,587,424,867.18 | - |
| 28 | Inspektorat | 34,795,628,278.47 | 34,795,628,278.47 | - |
| 29 | Kecamatan Andir | 13,599,438,418.74 | 13,599,438,418.74 | - |
| 30 | Kecamatan Antapani | 10,227,495,328.34 | 10,227,495,328.34 | - |
| 31 | Kecamatan Arcamanik | 10,979,977,995.56 | 10,979,977,995.56 | - |
| 32 | Kecamatan Astana Anyar | 11,449,453,696.75 | 11,449,453,696.75 | - |
| 33 | Kecamatan Babakan Ciparay | 12,355,973,054.24 | 12,355,973,054.24 | - |
| 34 | Kecamatan Bandung Kidul | 9,518,419,543.27 | 9,518,419,543.27 | - |
| 35 | Kecamatan Bandung Kulon | 15,419,195,778.76 | 15,419,195,778.76 | - |
| 36 | Kecamatan Bandung Wetan | 7,952,963,656.29 | 7,952,963,656.29 | - |
| 37 | Kecamatan Batununggal | 15,586,154,942.97 | 15,586,154,942.97 | - |
| 38 | Kecamatan Bojongloa Kaler | 10,139,110,279.07 | 10,139,110,279.07 | - |
| 39 | Kecamatan Bojongloa Kidul | 13,651,640,168.75 | 13,651,640,168.75 | - |
| 40 | Kecamatan Buahbatu | 11,166,266,862.64 | 11,166,266,862.64 | - |
| 41 | Kecamatan Cibeunying Kaler | 10,525,921,942.05 | 10,525,921,942.05 | - |
| 42 | Kecamatan Cibeunying Kidul | 12,237,871,950.14 | 12,237,871,950.14 | - |

| No | Perangkat Daerah | Belanja Tidak Langsung Penjabaran Perwal Pergeseran APBD 2020 (Rp) | Proyeksi Belanja Tidak Langsung Perubahan Kedua RKPD 2020 (Rp) | Selisih |
|----|--|--|--|--------------------|
| 43 | Kecamatan Cibiru | 11,492,440,123.50 | 11,492,440,123.50 | - |
| 44 | Kecamatan Cicendo | 12,997,856,127.54 | 12,997,856,127.54 | - |
| 45 | Kecamatan Cidadap | 8,734,811,780.87 | 8,734,811,780.87 | - |
| 46 | Kecamatan Cinambo | 11,223,865,559.29 | 11,223,865,559.29 | - |
| 47 | Kecamatan Coblong | 11,952,227,043.36 | 11,952,227,043.36 | - |
| 48 | Kecamatan Gedebage | 11,067,663,084.04 | 11,067,663,084.04 | - |
| 49 | Kecamatan Kiaracondong | 12,302,640,170.62 | 12,302,640,170.62 | - |
| 50 | Kecamatan Lengkong | 14,492,726,132.05 | 14,492,726,132.05 | - |
| 51 | Kecamatan Mandalajati | 10,248,495,616.76 | 10,248,495,616.76 | - |
| 52 | Kecamatan Panyileukan | 11,650,209,476.49 | 11,650,209,476.49 | - |
| 53 | Kecamatan Rancasari | 10,676,524,516.02 | 10,676,524,516.02 | - |
| 54 | Kecamatan Regol | 13,578,405,888.12 | 13,578,405,888.12 | - |
| 55 | Kecamatan Sukajadi | 11,247,937,435.03 | 11,247,937,435.03 | - |
| 56 | Kecamatan Sukasari | 9,555,406,931.26 | 9,555,406,931.26 | - |
| 57 | Kecamatan Sumur Bandung | 9,674,833,236.92 | 9,674,833,236.92 | - |
| 58 | Kecamatan Ujungberung | 12,806,447,948.21 | 12,806,447,948.21 | - |
| 59 | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 4,870,592,676.64 | 4,870,592,676.64 | - |
| 60 | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | 344,586,643,414.00 | 465,506,203,214.00 | 120,919,559,800 |
| 61 | Satuan Polisi Pamong Praja | 60,225,959,903.40 | 60,225,959,903.40 | - |
| 62 | Sekretariat Daerah | 64,331,219,928.23 | 64,331,219,928.23 | - |
| 63 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 16,234,099,011.89 | 16,234,099,011.89 | - |
| | Jumlah | 3,298,847,433,840.76 | 3,395,780,157,332.76 | 120,919,559,800.00 |

Sumber: SIRA, Tahun 2020

5.1.2 Belanja Langsung

Dengan adanya perubahan belanja pada urusan pendidikan dan urusan kesehatan, berikut rekapitulasi belanja langsung Perangkat Daerah pada Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020.

Tabel 5.2**Rekapitulasi Pagu Indikatif Belanja Langsung Perangkat Daerah
pada Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020**

| No | Perangkat Daerah | Belanja Langsung Penjabaran Perwal Pergeseran APBD 2020 (Rp) | Proyeksi Belanja Langsung Perubahan Kedua RKPD 2020 (Rp) | Selisih (Rp) |
|----|--|--|---|-----------------|
| 1 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 32,976,268,924.00 | 32,976,268,924.00 | - |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 11,050,515,530.00 | 11,050,515,530.00 | - |
| 3 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 15,281,927,137.25 | 15,281,927,137.25 | - |
| 4 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 32,477,975,159.00 | 32,477,975,159.00 | - |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan | 17,397,353,131.38 | 17,397,353,131.38 | - |
| 6 | Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana | 48,497,994,788.97 | 40,497,994,788.97 | (8,000,000,000) |
| 7 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 52,369,972,900.00 | 52,369,972,900.00 | - |
| 8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 23,304,811,319.00 | 23,304,811,319.00 | - |
| 9 | Dinas Kesehatan | 1,046,586,293,210.49 | 1,043,632,268,410.49 | (2,954,024,800) |
| 10 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 22,873,533,100.25 | 22,873,533,100.25 | - |
| 11 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | 12,762,789,234.07 | 12,762,789,234.07 | - |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan | 145,000,405,590.10 | 136,000,405,590.10 | (9,000,000,000) |
| 13 | Dinas Pangan dan Pertanian | 30,581,134,043.01 | 30,581,134,043.01 | - |
| 14 | Dinas Pekerjaan Umum | 483,462,465,945.41 | 483,462,465,945.41 | - |
| 15 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat | 13,360,524,465.46 | 13,360,524,465.46 | - |
| 16 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 54,166,941,651.32 | 54,166,941,651.32 | - |

| No | Perangkat Daerah | Belanja Langsung Penjabaran Perwal Pergeseran APBD 2020 (Rp) | Proyeksi Belanja Langsung Perubahan Kedua RKPD 2020 (Rp) | Selisih (Rp) |
|----|---|--|--|------------------|
| 17 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 16,935,171,490.00 | 16,935,171,490.00 | - |
| 18 | Dinas Penataan Ruang | 93,494,573,616.70 | 93,494,573,616.70 | - |
| 19 | Dinas Pendidikan | 749,775,160,952.94 | 686,318,023,664.94 | (63,457,137,288) |
| 20 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 16,125,526,958.00 | 16,125,526,958.00 | - |
| 21 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 42,753,881,532.00 | 42,753,881,532.00 | - |
| 22 | Dinas Perhubungan | 187,137,805,073.00 | 187,137,805,073.00 | - |
| 23 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 10,524,480,049.99 | 10,524,480,049.99 | - |
| 24 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan | 413,307,164,678.19 | 402,107,164,678.19 | (11,200,000,000) |
| 25 | Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | 35,366,795,000.00 | 35,366,795,000.00 | - |
| 26 | Dinas Tenaga Kerja | 32,199,971,398.00 | 32,199,971,398.00 | - |
| 27 | Inspektorat | 46,241,502,857.54 | 19,933,105,145.54 | (26,308,397,712) |
| 28 | Kecamatan Andir | 17,156,013,365.99 | 17,156,013,365.99 | - |
| 29 | Kecamatan Antapani | 15,807,732,915.20 | 15,807,732,915.20 | - |
| 30 | Kecamatan Arcamanik | 14,797,944,674.00 | 14,797,944,674.00 | - |
| 31 | Kecamatan Astana Anyar | 16,347,816,569.03 | 16,347,816,569.03 | - |
| 32 | Kecamatan Babakan Ciparay | 18,823,633,854.37 | 18,823,633,854.37 | - |
| 33 | Kecamatan Bandung Kidul | 12,767,613,370.00 | 12,767,613,370.00 | - |
| 34 | Kecamatan Bandung Kulon | 22,505,036,596.03 | 22,505,036,596.03 | - |
| 35 | Kecamatan Bandung Wetan | 10,979,098,521.00 | 10,979,098,521.00 | - |
| 36 | Kecamatan Batununggal | 25,102,063,918.96 | 25,102,063,918.96 | - |
| 37 | Kecamatan Bojongloa Kaler | 15,509,699,225.00 | 15,509,699,225.00 | - |
| 38 | Kecamatan Bojongloa Kidul | 17,055,518,693.00 | 17,055,518,693.00 | - |
| 39 | Kecamatan Buahbatu | 16,996,308,790.00 | 16,996,308,790.00 | - |
| 40 | Kecamatan Cibeunying Kaler | 16,535,701,345.00 | 16,535,701,345.00 | - |

| No | Perangkat Daerah | Belanja Langsung Penjabaran Perwal Pergeseran APBD 2020 (Rp) | Proyeksi Belanja Langsung Perubahan Kedua RKPd 2020 (Rp) | Selisih (Rp) |
|----|--|--|--|--------------------------|
| 41 | Kecamatan Cibeunying Kidul | 23,129,730,012.68 | 23,129,730,012.68 | - |
| 42 | Kecamatan Cibiru | 15,549,689,048.90 | 15,549,689,048.90 | - |
| 43 | Kecamatan Cicendo | 18,542,532,891.00 | 18,542,532,891.00 | - |
| 44 | Kecamatan Cidadap | 9,958,067,872.24 | 9,958,067,872.24 | - |
| 45 | Kecamatan Cinambo | 17,943,293,941.00 | 17,943,293,941.00 | - |
| 46 | Kecamatan Coblong | 21,207,330,621.30 | 21,207,330,621.30 | - |
| 47 | Kecamatan Gedebage | 13,129,793,288.00 | 13,129,793,288.00 | - |
| 48 | Kecamatan Kiaracondong | 22,755,950,069.18 | 22,755,950,069.18 | - |
| 49 | Kecamatan Lengkong | 21,251,006,689.04 | 21,251,006,689.04 | - |
| 50 | Kecamatan Mandalajati | 16,016,255,970.00 | 16,016,255,970.00 | - |
| 51 | Kecamatan Panyileukan | 12,094,271,659.00 | 12,094,271,659.00 | - |
| 52 | Kecamatan Rancasari | 15,105,004,018.97 | 15,105,004,018.97 | - |
| 53 | Kecamatan Regol | 20,464,655,534.97 | 20,464,655,534.97 | - |
| 54 | Kecamatan Sukajadi | 15,397,647,879.00 | 15,397,647,879.00 | - |
| 55 | Kecamatan Sukasari | 12,602,703,424.42 | 12,602,703,424.42 | - |
| 56 | Kecamatan Sumur Bandung | 12,097,347,354.60 | 12,097,347,354.60 | - |
| 57 | Kecamatan Ujungberung | 16,908,005,935.20 | 16,908,005,935.20 | - |
| 58 | Satuan Polisi Pamong Praja | 34,855,083,577.00 | 34,855,083,577.00 | - |
| 59 | Sekretariat Daerah | 181,285,147,565.00 | 181,285,147,565.00 | - |
| 60 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 94,531,974,704.17 | 94,531,974,704.17 | - |
| | Jumlah | 4,501,222,613,629.32 | 4,380,303,053,829.32 | (120,919,559,800) |

Sumber: SIRA, Tahun 2020

5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PADA PERUBAHAN KEDUA RKPd KOTA BANDUNG TAHUN 2020

Sesuai dengan perubahan pada urusan pendidikan dan urusan kesehatan, maka terdapat perubahan alokasi anggaran program dan kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran.

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020 merupakan dokumen perubahan rencana kerja pembangunan daerah guna memenuhi pelaksanaan urusan pendidikan dan urusan kesehatan dalam rangka pendanaan Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), kebijakan Gerakan Merdeka Belajar, kebijakan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat, serta kebutuhan untuk mencegah, menanggulangi, melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat Kota Bandung dari wabah bencana COVID-19. Selain itu perubahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi tambahan dana transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan pada beberapa urusan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020 dan melaksanakan amanat Perda RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, secara sinergis dan terintegrasi.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, dan Inspektorat untuk dapat menyesuaikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020.
3. Pemerintah Kota Bandung berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran, sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Perubahan Kota Bandung Tahun 2020, Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020.

4. Pemerintah Kota Bandung berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020.
5. Untuk menjamin pelaksanaan program, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, dan Inspektorat wajib melakukan langkah-langkah persiapan dan pengendalian pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2020, dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi secara efektif dan efisien.
6. Perubahan Kedua RKPD Kota Bandung Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Bandung, Maret 2020
WALI KOTA BANDUNG,

ODED MOHAMAD DANIAL

Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 1.01.01 Dinas Pendidikan

Total Pagu : 686.318.023.665

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | | |
| (1) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | |
| 1 01 Pendidikan | | | | | | | | | | |
| 1 01 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | 100 % | 3.987.298.100 | 3.987.298.100 | 0 | 100 % | 4.386.027.910 |
| 1 01 01 002 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 laporan | 12 laporan | 599.671.000 | 599.671.000 | 0 | 12 laporan | 659.638.100 |
| 1 01 01 010 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | - Jumlah lembaga yang disediakan ATK | - Jumlah lembaga yang disediakan ATK | 1 lembaga | 1 lembaga | 375.250.000 | 375.250.000 | 0 | 1 lembaga | 412.775.000 |
| 1 01 01 011 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | - Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | - Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | 3 Jenis | 3 Jenis | 350.038.700 | 350.038.700 | 0 | 3 Jenis | 385.042.570 |
| 1 01 01 015 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 12 laporan | 12 laporan | 263.920.000 | 263.920.000 | 0 | 12 laporan | 290.312.000 |
| 1 01 01 017 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | - Jumlah laporan bulanan Penyediaan Makanan dan Minuman | - Jumlah laporan bulanan Penyediaan Makanan dan Minuman | 12 laporan | 12 laporan | 160.122.600 | 160.122.600 | 0 | 12 laporan | 176.134.860 |
| 1 01 01 018 | Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | - Jumlah laporan bulanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | - Jumlah laporan bulanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 12 laporan | 12 laporan | 410.475.000 | 410.475.000 | 0 | 12 laporan | 451.522.500 |
| 1 01 01 019 | Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran | - Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran | - Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran | 12 laporan | 12 laporan | 1.827.820.800 | 1.827.820.800 | 0 | 12 laporan | 2.010.602.880 |
| 1 01 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik | Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik | 100 % | 100 % | 3.628.581.780 | 3.628.581.780 | 0 | 100 % | 3.991.439.958 |
| 1 01 02 012 | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur | - Jumlah perlengkapan peralatan aparatur yang disediakan | - Jumlah perlengkapan peralatan aparatur yang disediakan | 6 Jenis | 6 Jenis | 577.244.800 | 577.244.800 | 0 | 6 Jenis | 634.969.280 |
| 1 01 02 022 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | - Jumlah laporan pemeliharaan rutin gedung kantor | - Jumlah laporan pemeliharaan rutin gedung kantor | 4 laporan | 4 laporan | 192.097.400 | 192.097.400 | 0 | 4 laporan | 211.307.140 |
| 1 01 02 024 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | - Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara | - Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara | 131 Unit | 131 Unit | 1.099.999.870 | 1.099.999.870 | 0 | 131 Unit | 1.209.999.857 |
| 1 01 02 042 | Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | - Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | - Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | 1 gedung | 1 gedung | 1.522.439.710 | 1.522.439.710 | 0 | 1 gedung | 1.674.683.681 |
| 1 01 02 052 | Pengelolaan Aset Satuan Pendidikan | - Jumlah sekolah yang difasilitasi pengelolaannya | - Jumlah sekolah yang difasilitasi pengelolaannya | 331 Sekolah | 331 Sekolah | 236.800.000 | 236.800.000 | 0 | 331 Sekolah | 260.480.000 |
| 1 01 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai | Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai | 100 % | 100 % | 525.827.000 | 525.827.000 | 0 | 100 % | 578.409.700 |
| 1 01 03 008 | Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur | - Jumlah kegiatan pembinaan Kinerja Aparatur | - Jumlah kegiatan pembinaan Kinerja Aparatur | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 525.827.000 | 525.827.000 | 0 | 3 kegiatan | 578.409.700 |
| 1 01 15 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | Angka Partisipasi Kasar PAUD | Angka Partisipasi Kasar PAUD | 100 % | 100 % | 10.972.856.600 | 10.972.856.600 | 0 | 100 % | 12.070.142.260 |
| 1 01 15 067 | Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif PAUD Dikmas | - Jumlah PAUD Dikmas yang difasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif | - Jumlah PAUD Dikmas yang difasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif | 60 lembaga | 60 lembaga | 108.220.000 | 108.220.000 | 0 | 60 lembaga | 119.042.000 |
| 1 01 15 070 | Kegiatan Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik) | | | | | 264.000.000 | 264.000.000 | 0 | | 290.400.000 |
| 1 01 15 071 | Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - Jumlah lembaga yang difasilitasi Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - Jumlah lembaga yang difasilitasi Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 4 lembaga | 4 lembaga | 8.388.578.600 | 8.388.578.600 | 0 | 4 lembaga | 9.227.436.460 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----|---|---|---|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------|------------------------|
| 1 | 01 | 15 | 072 | Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - Jumlah lembaga yang difasilitasi Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - Jumlah lembaga yang difasilitasi Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 1160 lembaga | 1160 lembaga | 697.174.400 | 697.174.400 | 0 | 1160 lembaga | 766.891.840 |
| 1 | 01 | 15 | 074 | Kegiatan DAK Fisik PAUD | | | | | 329.007.000 | 329.007.000 | 0 | | 361.907.700 |
| 1 | 01 | 15 | 075 | Kegiatan Fasilitas pengelolaan dana Bantuan operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD | - Jumlah lembaga yang difasilitasi pengelolaan dana Bantuan operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD | - Jumlah lembaga yang difasilitasi pengelolaan dana Bantuan operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD | 1000 lembaga | 1000 lembaga | 533.517.600 | 533.517.600 | 0 | 1000 lembaga | 586.869.360 |
| 1 | 01 | 15 | 076 | Pelaksanaan Pendidikan PAUD | - Jumlah lembaga yang dibina | - Jumlah lembaga yang dibina | 4 lembaga | 4 lembaga | 652.359.000 | 652.359.000 | 0 | 4 lembaga | 717.594.900 |
| 1 | 01 | 18 | | Program Pendidikan Non Formal | APK Kesetaraan | APK Kesetaraan | 100 % | 100 % | 9.673.916.750 | 8.743.514.462 | (930.402.288) | 100 % | 9.617.865.908 |
| 1 | 01 | 18 | 001 | Kegiatan Pemberian bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C | - Jumlah warga belajar yang diberi bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C | - Jumlah warga belajar yang diberi bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C | 3000 orang | 3000 orang | 3.139.140.000 | 2.208.737.712 | (930.402.288) | 3000 orang | 2.429.611.483 |
| 1 | 01 | 18 | 002 | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal | - Jumlah peserta Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal | - Jumlah peserta Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal | 800 orang | 800 orang | 610.154.400 | 610.154.400 | 0 | 800 orang | 671.169.840 |
| 1 | 01 | 18 | 003 | Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan PAUD Dikmas | - Jumlah lembaga Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan PAUD Dikmas | - Jumlah lembaga Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan PAUD Dikmas | 150 lembaga | 150 lembaga | 279.599.600 | 279.599.600 | 0 | 150 lembaga | 307.559.560 |
| 1 | 01 | 18 | 018 | Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan Nonformal dan Informal | - Jumlah lembaga yang difasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Nonformal dan Informal | - Jumlah lembaga yang difasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Nonformal dan Informal | 100 lembaga | 100 lembaga | 550.000.000 | 550.000.000 | 0 | 100 lembaga | 605.000.000 |
| 1 | 01 | 18 | 020 | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Asesment Center | - Jumlah peserta Pembinaan dan Pengembangan Asesment Center | - Jumlah peserta Pembinaan dan Pengembangan Asesment Center | 800 orang | 800 orang | 527.978.000 | 527.978.000 | 0 | 800 orang | 580.775.800 |
| 1 | 01 | 18 | 023 | Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan | - Jumlah lembaga yang difasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan | - Jumlah lembaga yang difasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan | 20 lembaga | 20 lembaga | 919.927.000 | 919.927.000 | 0 | 20 lembaga | 1.011.919.700 |
| 1 | 01 | 18 | 024 | Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan SKB | | | | | 1.291.642.000 | 1.291.642.000 | 0 | | 1.420.806.200 |
| 1 | 01 | 18 | 025 | Kegiatan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) DAK Nonfisik Kesetaraan | | | | | 1.205.000.000 | 1.205.000.000 | 0 | | 1.325.500.000 |
| 1 | 01 | 18 | 026 | Penyelenggaraan SKB | - Jumlah lembaga yang ditingkatkan kualitasnya | - Jumlah lembaga yang ditingkatkan kualitasnya | 1 lembaga | 1 lembaga | 1.150.475.750 | 1.150.475.750 | 0 | 1 lembaga | 1.265.523.325 |
| 1 | 01 | 20 | | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disertifikasi | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disertifikasi | 52.55 % | 52.55 % | 176.284.299.030 | 177.082.738.400 | 798.439.370 | 52.55 % | 194.791.012.240 |
| 1 | 01 | 20 | 015 | Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan PAUD Berprestasi | - Jumlah peserta Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan PAUD Berprestasi | - Jumlah peserta Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan PAUD Berprestasi | 400 orang | 400 orang | 2.199.871.000 | 2.199.871.000 | 0 | 400 orang | 2.419.858.100 |
| 1 | 01 | 20 | 016 | Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan SMP Berprestasi | - Jumlah peserta Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan SMP Berprestasi | - Jumlah peserta Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan SMP Berprestasi | 1000 Orang | 1000 Orang | 6.628.010.200 | 6.628.010.200 | 0 | 1000 Orang | 7.290.811.220 |
| 1 | 01 | 20 | 017 | Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan Non Formal dan PAUD Dikmas | | | | | 392.909.000 | 392.909.000 | 0 | | 432.199.900 |
| 1 | 01 | 20 | 018 | Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan SMP | - Jumlah peserta pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan SMP | - Jumlah peserta pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan SMP | 300 Orang | 300 Orang | 3.270.892.800 | 3.695.082.800 | 424.190.000 | 300 Orang | 4.064.591.080 |
| 1 | 01 | 20 | 019 | Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan SD Berprestasi | - Jumlah peserta Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan SD Berprestasi | - Jumlah peserta Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan SD Berprestasi | 1000 orang | 1000 orang | 4.706.810.200 | 4.706.810.200 | 0 | 1000 orang | 5.177.491.220 |
| 1 | 01 | 20 | 030 | Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan kependidikan SD | - Jumlah peserta Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan kependidikan SD | - Jumlah peserta Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan kependidikan SD | 300 orang | 300 orang | 418.305.200 | 768.305.200 | 350.000.000 | 300 orang | 845.135.720 |
| 1 | 01 | 20 | 031 | Kegiatan Peningkatan Mutu PTK Non ASN | - Jumlah PTK Non ASN yang diberi honor | - Jumlah PTK Non ASN yang diberi honor | 10000 Org | 10000 Org | 150.353.505.000 | 150.353.505.000 | 0 | 10000 Org | 165.388.855.500 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|--|--|--|-------------------------|-------------------------|--|------------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 01 | 20 | 032 | Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan (DID) | | | | | | 8.313.995.630 | 8.338.245.000 | 24.249.370 | | 9.172.069.500 |
| 1 | 01 | 29 | | Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SD | - | - | - | - | | 5.672.313.000 | 5.672.313.000 | 0 | - | 6.239.544.300 |
| 1 | 01 | 29 | 006 | Kegiatan Rehabilitasi Sedang atau Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK) SD | | | | | | 5.672.313.000 | 5.672.313.000 | 0 | | 6.239.544.300 |
| 1 | 01 | 30 | | Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP | - | - | - | - | | 4.900.187.000 | 4.900.187.000 | 0 | - | 5.390.205.700 |
| 1 | 01 | 30 | 005 | Kegiatan Rehabilitasi Sedang atau Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK) SMP | | | | | | 4.900.187.000 | 4.900.187.000 | 0 | | 5.390.205.700 |
| 1 | 01 | 32 | | Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | Persentase sekolah yang difasilitasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | Persentase sekolah yang difasilitasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | 100 % | 100 % | | 188.720.872.000 | 188.720.872.000 | 0 | 100 % | 207.592.959.200 |
| 1 | 01 | 32 | 001 | Fasilitasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang Pendidikan Dasar | - Jumlah Sekolah yang difasilitasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | - Jumlah Sekolah yang difasilitasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | 331 Sekolah | 331 Sekolah | | 188.720.872.000 | 188.720.872.000 | 0 | 331 Sekolah | 207.592.959.200 |
| 1 | 01 | 37 | | Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar | Persentase manajemen pelayanan pendidikan yang dimanfaatkan | Persentase manajemen pelayanan pendidikan yang dimanfaatkan | 100 % | 100 % | | 226.466.585.323 | 226.466.585.323 | 0 | 100 % | 249.113.243.855 |
| 1 | 01 | 37 | 001 | Kegiatan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan | - Jumlah Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan | - Jumlah Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan | 1 Sistem | 1 Sistem | | 1.296.288.800 | 1.296.288.800 | 0 | 1 Sistem | 1.425.917.680 |
| 1 | 01 | 37 | 002 | Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online | - Jumlah kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online | - Jumlah kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | 428.017.400 | 428.017.400 | 0 | 1 kegiatan | 470.819.140 |
| 1 | 01 | 37 | 003 | Pembangunan dan Pengadaan sarana dan prasarana SD | - Jumlah SD yang difasilitasi pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan sarana dan prasarana | - Jumlah SD yang difasilitasi pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan sarana dan prasarana | 274 Sekolah | 274 Sekolah | | 88.897.620.391 | 88.897.620.391 | 0 | 274 Sekolah | 97.787.382.430 |
| 1 | 01 | 37 | 004 | Pendampingan Program HEBAT | - Jumlah kegiatan pendampingan program Hebat | - Jumlah kegiatan pendampingan program Hebat | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | 163.680.000 | 163.680.000 | 0 | 1 kegiatan | 180.048.000 |
| 1 | 01 | 37 | 005 | Pengembangan Kesiswaan SD | - Jumlah SD yang difasilitasi pengembangan kesiswaan | - Jumlah SD yang difasilitasi pengembangan kesiswaan | 457 Sekolah | 457 Sekolah | | 1.687.290.720 | 1.687.290.720 | 0 | 457 Sekolah | 1.856.019.792 |
| 1 | 01 | 37 | 006 | Pengembangan Kurikulum Pendidikan SD | - Jumlah SD yang difasilitasi pengembangan kurikulum | - Jumlah SD yang difasilitasi pengembangan kurikulum | 457 Sekolah | 457 Sekolah | | 433.300.000 | 433.300.000 | 0 | 457 Sekolah | 476.630.000 |
| 1 | 01 | 37 | 007 | Pengembangan Proses Belajar Mengajar SD | - Jumlah SD yang difasilitasi proses belajar mengajar | - Jumlah SD yang difasilitasi proses belajar mengajar | 274 Sekolah | 274 Sekolah | | 296.550.000 | 296.550.000 | 0 | 274 Sekolah | 326.205.000 |
| 1 | 01 | 37 | 008 | Pengembangan Proses Belajar Mengajar SMP | - Jumlah SMP yang difasilitasi proses belajar mengajar | - Jumlah SMP yang difasilitasi proses belajar mengajar | 62 Sekolah | 62 Sekolah | | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 | 62 Sekolah | 330.000.000 |
| 1 | 01 | 37 | 010 | Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif SD | - Jumlah SD yang difasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif | - Jumlah SD yang difasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif | 25 Sekolah | 25 Sekolah | | 505.150.000 | 505.150.000 | 0 | 25 Sekolah | 555.665.000 |
| 1 | 01 | 37 | 011 | Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif SMP | - Jumlah SMP yang difasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif | - Jumlah SMP yang difasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif | 25 Sekolah | 25 Sekolah | | 505.994.000 | 505.994.000 | 0 | 25 Sekolah | 556.593.400 |
| 1 | 01 | 37 | 012 | Penyelenggaraan Ujian Jenjang SD | - Jumlah SD yang difasilitasi Penyelenggaraan Ujian | - Jumlah SD yang difasilitasi Penyelenggaraan Ujian | 457 Sekolah | 457 Sekolah | | 1.900.000.000 | 1.900.000.000 | 0 | 457 Sekolah | 2.090.000.000 |
| 1 | 01 | 37 | 013 | Penyelenggaraan Ujian Jenjang SMP | - Jumlah SMP yang difasilitasi Penyelenggaraan Ujian | - Jumlah SMP yang difasilitasi Penyelenggaraan Ujian | 250 Sekolah | 250 Sekolah | | 800.000.000 | 800.000.000 | 0 | 250 Sekolah | 880.000.000 |
| 1 | 01 | 37 | 014 | Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan | - Jumlah dokumen Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan - Jumlah laporan bulanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | - Jumlah dokumen Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan - Jumlah laporan bulanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 5 Dokumen 12 laporan | 5 Dokumen 12 laporan | | 367.282.500 | 367.282.500 | 0 | 5 Dokumen 12 laporan | 404.010.750 |
| 1 | 01 | 37 | 015 | Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan | - Jumlah kegiatan pembinaan dewan sekolah | - Jumlah kegiatan pembinaan dewan sekolah | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | 82.323.000 | 82.323.000 | 0 | 1 kegiatan | 90.555.300 |
| 1 | 01 | 37 | 016 | Kegiatan Pengembangan Inovasi Pendidikan | - Jumlah kegiatan pengembangan inovasi pendidikan | - Jumlah kegiatan pengembangan inovasi pendidikan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | | 684.310.000 | 684.310.000 | 0 | 2 Kegiatan | 752.741.000 |
| 1 | 01 | 37 | 017 | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pendidikan | - Jumlah Dokumen kebijakan Pendidikan | - Jumlah Dokumen kebijakan Pendidikan | 5 Dokumen | 5 Dokumen | | 510.950.000 | 510.950.000 | 0 | 5 Dokumen | 562.045.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|---|---|---|--------------|--------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 01 | 37 | 018 | Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD | | | | | 41.029.768.234 | 41.029.768.234 | 0 | | 45.132.745.057 |
| 1 | 01 | 37 | 019 | Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP | | | | | 25.741.551.610 | 25.741.551.610 | 0 | | 28.315.706.771 |
| 1 | 01 | 37 | 020 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan sarana dan prasarana SMP | - Jumlah SMP yang difasilitasi Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan sarana dan prasarana | - Jumlah SMP yang difasilitasi Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan sarana dan prasarana | 62 Sekolah | 62 Sekolah | 54.023.810.068 | 54.023.810.068 | 0 | 62 Sekolah | 59.426.191.075 |
| 1 | 01 | 37 | 021 | Pengembangan dan Tata Kelola Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD | - Jumlah SD yang difasilitasi pengembangan dan tata kelola penyelenggaraan sekolah gratis | - Jumlah SD yang difasilitasi pengembangan dan tata kelola penyelenggaraan sekolah gratis | 274 Sekolah | 274 Sekolah | 822.221.800 | 822.221.800 | 0 | 274 Sekolah | 904.443.980 |
| 1 | 01 | 37 | 022 | Pengembangan dan Tata Kelola Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP | - Jumlah SMP yang difasilitasi pengembangan dan tata kelola penyelenggaraan sekolah gratis | - Jumlah SMP yang difasilitasi pengembangan dan tata kelola penyelenggaraan sekolah gratis | 62 Sekolah | 62 Sekolah | 3.884.326.800 | 3.884.326.800 | 0 | 62 Sekolah | 4.272.759.480 |
| 1 | 01 | 37 | 023 | Pengembangan Kesiswaan SMP | - Jumlah SMP yang difasilitasi pengembangan kesiswaan | - Jumlah SMP yang difasilitasi pengembangan kesiswaan | 250 Sekolah | 250 Sekolah | 1.561.950.000 | 1.561.950.000 | 0 | 250 Sekolah | 1.718.145.000 |
| 1 | 01 | 37 | 024 | Pengembangan Kurikulum Pendidikan SMP | - Jumlah SMP yang difasilitasi pengembangan kurikulum | - Jumlah SMP yang difasilitasi pengembangan kurikulum | 250 Sekolah | 250 Sekolah | 544.200.000 | 544.200.000 | 0 | 250 Sekolah | 598.620.000 |
| 1 | 01 | 38 | | Program Bantuan Pendidikan | Persentase masyarakat yg mendapatkan bantuan Pendidikan | Persentase masyarakat yg mendapatkan bantuan Pendidikan | 100 % | 100 % | 115.489.175.000 | 52.188.250.000 | (63.300.925.000) | 100 % | 57.407.075.000 |
| 1 | 01 | 38 | 001 | Pemberian bantuan kebutuhan sekolah siswa SD melalui Kartu Bandung Juara | - Jumlah siswa SD yang diberi bantuan melalui Kartu Bandung Juara | - Jumlah siswa SD yang diberi bantuan melalui Kartu Bandung Juara | 51500 Siswa | 51500 Siswa | 63.605.575.000 | 31.527.775.000 | (32.077.800.000) | 51500 Siswa | 34.680.552.500 |
| 1 | 01 | 38 | 002 | Pemberian bantuan kebutuhan sekolah siswa SMP melalui Kartu Bandung Juara | - Jumlah siswa SMP yang diberi bantuan melalui Kartu Bandung Juara | - Jumlah siswa SMP yang diberi bantuan melalui Kartu Bandung Juara | 37100 Siswa | 37100 Siswa | 51.883.600.000 | 20.660.475.000 | (31.223.125.000) | 37100 Siswa | 22.726.522.500 |

Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 1.02.01 Dinas Kesehatan

Total Pagu : 1.043.632.268.410

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | | | | |
|----------|---|--------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | | | | | |
| (1) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1 | 02 | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | Kesehatan | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | 100 % | 30.127.677.596 | 29.967.840.596 | (159.837.000) | 100 % | 32.964.624.656 | |
| 1 | 02 | 01 | 002 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Dinas Kesehatan | - Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Dinas Kesehatan | 12 laporan | 12 laporan | 5.065.485.550 | 5.065.485.550 | 0 | 12 laporan | 5.572.034.105 |
| 1 | 02 | 01 | 003 | Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan | - Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan | 12 laporan | 12 laporan | 191.400.000 | 191.400.000 | 0 | 12 laporan | 210.540.000 |
| 1 | 02 | 01 | 006 | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 10.145.600 | 10.145.600 | 0 | | 11.160.160 |
| 1 | 02 | 01 | 010 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | | | 399.597.050 | 399.597.050 | 0 | | 439.556.755 |
| 1 | 02 | 01 | 011 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | - Jumlah Laporan Penyediaan cetakan & pengadaan Dinas Kesehatan | - Jumlah Laporan Penyediaan cetakan & pengadaan Dinas Kesehatan | 1 laporan | 1 laporan | 1.437.055.400 | 1.437.055.400 | 0 | 1 laporan | 1.580.760.940 |
| 1 | 02 | 01 | 012 | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | - Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Dinas Kesehatan | - Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Dinas Kesehatan | 1 laporan | 1 laporan | 631.876.700 | 631.876.700 | 0 | 1 laporan | 695.064.370 |
| 1 | 02 | 01 | 013 | Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan | - Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan | 1 laporan | 1 laporan | 3.452.496.120 | 3.299.778.120 | (152.718.000) | 1 laporan | 3.629.755.932 |
| 1 | 02 | 01 | 014 | Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - Jumlah Laporan peralatan rumah tangga Dinas Kesehatan | - Jumlah Laporan peralatan rumah tangga Dinas Kesehatan | 12 laporan | 12 laporan | 743.521.500 | 743.521.500 | 0 | 12 laporan | 817.873.650 |
| 1 | 02 | 01 | 017 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | | | | | 243.350.000 | 243.350.000 | 0 | | 267.685.000 |
| 1 | 02 | 01 | 018 | Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | | | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 | 0 | | 1.155.000.000 |
| 1 | 02 | 01 | 019 | Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran | - Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran RSKIA | - Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran RSKIA | 12 laporan | 12 laporan | 623.307.776 | 623.307.776 | 0 | 12 laporan | 685.638.554 |
| 1 | 02 | 01 | 023 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor | - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor Bulanan | - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor Bulanan | 12 laporan | 12 laporan | 15.841.370.000 | 15.841.370.000 | 0 | 12 laporan | 17.425.507.000 |
| 1 | 02 | 01 | 024 | Kegiatan Pelayanan Humas dan Pengaduan Masyarakat | - Jumlah Laporan Pelayanan Humas dan Pengaduan Layanan Kesehatan Masyarakat Bulanan | - Jumlah Laporan Pelayanan Humas dan Pengaduan Layanan Kesehatan Masyarakat Bulanan | 12 laporan | 12 laporan | 140.271.900 | 140.271.900 | 0 | 12 laporan | 154.299.090 |
| 1 | 02 | 01 | 027 | Kegiatan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Kesehatan | - Jumlah Laporan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Kesehatan | - Jumlah Laporan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Kesehatan | 85 laporan | 85 laporan | 297.800.000 | 290.681.000 | (7.119.000) | 85 laporan | 319.749.100 |
| 1 | 02 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | "Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik" | "Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik" | 100 % | 100 % | 4.276.543.400 | 4.276.543.400 | 0 | 100 % | 4.704.197.740 | |
| 1 | 02 | 02 | 005 | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | | 440.000.000 |
| 1 | 02 | 02 | 007 | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | - Jumlah Lift pada RSUD | - Jumlah Lift pada RSUD | 1 set | 1 set | 858.000.000 | 858.000.000 | 0 | 1 set | 943.800.000 |
| 1 | 02 | 02 | 024 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | - Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional RSKIA | - Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional RSKIA | 4 Unit | 4 Unit | 3.018.543.400 | 3.018.543.400 | 0 | 4 Unit | 3.320.397.740 |

| 1 | 02 | 03 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai | Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai | 100 % | 100 % | 270.616.250 | 270.616.250 | 0 | 100 % | 297.677.875 |
|---|----|----|-----|---|---|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | 02 | 03 | 002 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | - Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya RSKIA | - Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya RSKIA | 330 Stel | 330 Stel | 104.816.250 | 104.816.250 | 0 | 330 Stel | 115.297.875 |
| 1 | 02 | 03 | 009 | Kegiatan Pembinaan Disiplin dan Kinerja Aparatur | - Jumlah laporan pembinaan aparatur Dinas Kesehatan | - Jumlah laporan pembinaan aparatur Dinas Kesehatan | 12 laporan | 12 laporan | 165.800.000 | 165.800.000 | 0 | 12 laporan | 182.380.000 |
| 1 | 02 | 16 | | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase masalah gizi yang ditangani sesuai standar | Persentase masalah gizi yang ditangani sesuai standar | 89.60 % | 89.60 % | 49.899.813.176 | 49.807.244.306 | (92.568.870) | 89.60 % | 54.787.968.736 |
| 1 | 02 | 16 | 066 | Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat | - Jumlah Pembinaan gizi masyarakat | - Jumlah Pembinaan gizi masyarakat | 8 kali | 8 kali | 218.745.030 | 218.745.030 | 0 | 8 kali | 240.619.533 |
| 1 | 02 | 16 | 070 | Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga | - Jumlah fasyankes yang dilakukan pembinaan kesehatan keluarga sesuai standar - Jumlah Pembinaan gizi masyarakat | - Jumlah fasyankes yang dilakukan pembinaan kesehatan keluarga sesuai standar - Jumlah Pembinaan gizi masyarakat | 80 Faskes 8 Pembinaan | 80 Faskes 8 Pembinaan | 595.050.350 | 595.050.350 | 0 | 80 Faskes 8 Pembinaan | 654.555.385 |
| 1 | 02 | 16 | 071 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIKUTRA LAMA | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 943.384.000 | 943.384.000 | 0 | 12 Jenis | 1.037.722.400 |
| 1 | 02 | 16 | 072 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi BLUD UPT PUSKESMAS LEDENG | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 668.576.000 | 668.576.000 | 0 | 12 Jenis | 735.433.600 |
| 1 | 02 | 16 | 073 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi BLUD UPT PUSKESMAS KARANGSETRA | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 382.765.000 | 382.765.000 | 0 | 12 Jenis | 421.041.500 |
| 1 | 02 | 16 | 074 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SUKAWARNA | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 808.766.000 | 808.766.000 | 0 | 12 Jenis | 889.642.600 |
| 1 | 02 | 16 | 075 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS BABATAN | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 1.204.862.000 | 1.204.862.000 | 0 | 12 Jenis | 1.325.348.200 |
| 1 | 02 | 16 | 076 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SURYALAYA | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 154.049.000 | 154.049.000 | 0 | 12 Jenis | 169.453.900 |
| 1 | 02 | 16 | 077 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIPAKU | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 351.378.000 | 351.378.000 | 0 | 12 Jenis | 386.515.800 |
| 1 | 02 | 16 | 078 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS BABAKAN SURABAYA | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 1.282.278.000 | 1.282.278.000 | 0 | 12 Jenis | 1.410.505.800 |
| 1 | 02 | 16 | 079 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS PASIRLAYUNG | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 1.182.298.000 | 1.182.298.000 | 0 | 12 Jenis | 1.300.527.800 |
| 1 | 02 | 16 | 080 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS GUMURUH | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 1.888.403.000 | 1.888.403.000 | 0 | 12 Jenis | 2.077.243.300 |
| 1 | 02 | 16 | 081 | Kegiatan Pelayanan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS MOCH RAMDAN | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 1.552.798.000 | 1.552.798.000 | 0 | 12 Jenis | 1.708.077.800 |
| 1 | 02 | 16 | 082 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS ASTANA ANYAR | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 675.338.897 | 643.779.000 | (31.559.897) | 12 Jenis | 708.156.900 |
| 1 | 02 | 16 | 083 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SUKAPAKIR | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 2.866.021.000 | 2.866.021.000 | 0 | 12 Jenis | 3.152.623.100 |
| 1 | 02 | 16 | 084 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS AHMAD YANI | | | | | 872.267.000 | 872.267.000 | 0 | | 959.493.700 |
| 1 | 02 | 16 | 085 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIJAGRA LAMA | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 546.124.800 | 544.872.000 | (1.252.800) | 12 Jenis | 599.359.200 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|---|---|---|----------|----------|---------------|---------------|--------------|---|----------|---------------|
| 1 | 02 | 16 | 086 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS PASIRLUYU | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 1.085.504.000 | 1.085.504.000 | | 0 | 12 Jenis | 1.194.054.400 |
| 1 | 02 | 16 | 087 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIGONDEWAH | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 1.497.449.000 | 1.497.449.000 | | 0 | 12 Jenis | 1.647.193.900 |
| 1 | 02 | 16 | 088 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Babakan Tarogong | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 213.921.900 | 213.921.900 | | 0 | 12 Jenis | 235.314.090 |
| 1 | 02 | 16 | 089 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIJERAH | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 1.433.770.000 | 1.433.770.000 | | 0 | 12 Jenis | 1.577.147.000 |
| 1 | 02 | 16 | 090 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS JATIHANDAP | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 454.231.000 | 454.231.000 | | 0 | 12 Jenis | 499.654.100 |
| 1 | 02 | 16 | 091 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS LIO GENTENG | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 309.311.373 | 252.437.000 | (56.874.373) | 0 | 12 Jenis | 277.680.700 |
| 1 | 02 | 16 | 092 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIBOLERANG | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 1.050.729.000 | 1.050.729.000 | | 0 | 12 Jenis | 1.155.801.900 |
| 1 | 02 | 16 | 093 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIJAGRA BARU | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 371.899.000 | 371.899.000 | | 0 | 12 Jenis | 409.088.900 |
| 1 | 02 | 16 | 094 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS PELINDUNG HEWAN | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 1.189.587.000 | 1.189.587.000 | | 0 | 12 Jenis | 1.308.545.700 |
| 1 | 02 | 16 | 095 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Cibaduyut Kidul | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 191.421.900 | 191.421.900 | | 0 | 12 Jenis | 210.564.090 |
| 1 | 02 | 16 | 096 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIPADUNG | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 1.917.171.000 | 1.917.171.000 | | 0 | 12 Jenis | 2.108.888.100 |
| 1 | 02 | 16 | 097 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SUKAHAJI | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 2.566.611.800 | 2.563.730.000 | (2.881.800) | 0 | 12 Jenis | 2.820.103.000 |
| 1 | 02 | 16 | 098 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS PANYILEUKAN | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 599.679.000 | 599.679.000 | | 0 | 12 Jenis | 659.646.900 |
| 1 | 02 | 16 | 099 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS ANTAPANI | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 1.224.864.000 | 1.224.864.000 | | 0 | 12 Jenis | 1.347.350.400 |
| 1 | 02 | 16 | 100 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS MANDALAMEKAR | | | | | 163.968.000 | 163.968.000 | | 0 | | 180.364.800 |
| 1 | 02 | 16 | 101 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Cibaduyut Wetan | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 180.921.900 | 180.921.900 | | 0 | 12 Jenis | 199.014.090 |
| 1 | 02 | 16 | 103 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CILENGKRANG | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 854.970.000 | 854.970.000 | | 0 | 12 Jenis | 940.467.000 |
| 1 | 02 | 16 | 104 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS JAJAWAY | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 183.082.000 | 183.082.000 | | 0 | 12 Jenis | 201.390.200 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|---|---|---|----------|----------|---------------|---------------|---|----------|---------------|
| 1 | 02 | 16 | 105 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS PAMULANG | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 408.501.000 | 408.501.000 | 0 | 12 Jenis | 449.351.100 |
| 1 | 02 | 16 | 106 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS PASAWAHAN | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 421.387.000 | 421.387.000 | 0 | 12 Jenis | 463.525.700 |
| 1 | 02 | 16 | 107 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS GIRIMANDE | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 178.677.000 | 178.677.000 | 0 | 12 Jenis | 196.544.700 |
| 1 | 02 | 16 | 108 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS DERWATI | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 766.948.000 | 766.948.000 | 0 | 12 Jenis | 843.642.800 |
| 1 | 02 | 16 | 109 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS PUSUNAWA | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 794.066.000 | 794.066.000 | 0 | 12 Jenis | 873.472.600 |
| 1 | 02 | 16 | 110 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CEMPAKA ARUM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 311.432.000 | 311.432.000 | 0 | 12 Jenis | 342.575.200 |
| 1 | 02 | 16 | 111 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SEKEJATI | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 856.545.000 | 856.545.000 | 0 | 12 Jenis | 942.199.500 |
| 1 | 02 | 16 | 112 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS BALAIKOTA | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 585.025.270 | 585.025.270 | 0 | 12 Jenis | 643.527.797 |
| 1 | 02 | 16 | 113 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS DAGO | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 2.557.778.000 | 2.557.778.000 | 0 | 12 Jenis | 2.813.555.800 |
| 1 | 02 | 16 | 114 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS MENGGER | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 252.802.000 | 252.802.000 | 0 | 12 Jenis | 278.082.200 |
| 1 | 02 | 16 | 115 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SARIJADI | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 915.086.000 | 915.086.000 | 0 | 12 Jenis | 1.006.594.600 |
| 1 | 02 | 16 | 116 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SEKELOA | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 602.970.000 | 602.970.000 | 0 | 12 Jenis | 663.267.000 |
| 1 | 02 | 16 | 117 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS TAMANSARI | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 794.673.000 | 794.673.000 | 0 | 12 Jenis | 874.140.300 |
| 1 | 02 | 16 | 118 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Pasirjati | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 191.000.000 | 191.000.000 | 0 | 12 Jenis | 210.100.000 |
| 1 | 02 | 16 | 119 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Cipamokolan | - Jumlah pelayanan sesuai SPM | - Jumlah pelayanan sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 330.813.900 | 330.813.900 | 0 | 12 Jenis | 363.895.290 |
| 1 | 02 | 16 | 120 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Pagarsih | - Jumlah pelayanan sesuai SPM | - Jumlah pelayanan sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 136.461.750 | 136.461.750 | 0 | 12 Jenis | 150.107.925 |
| 1 | 02 | 16 | 121 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Puter | - Jumlah pelayanan sesuai SPM | - Jumlah pelayanan sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 464.568.800 | 464.568.800 | 0 | 12 Jenis | 511.025.680 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----|---|--|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1 | 02 | 16 | 122 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Sukarasa | - Jumlah pelayanan sesuai SPM | - Jumlah pelayanan sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 98.756.000 | 98.756.000 | 0 | 12 Jenis | 108.631.600 |
| 1 | 02 | 16 | 123 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Riung Bandung | - Jumlah pelayanan sesuai SPM | - Jumlah pelayanan sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 74.472.000 | 74.472.000 | 0 | 12 Jenis | 81.919.200 |
| 1 | 02 | 16 | 124 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Sukaraja | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 93.615.400 | 93.615.400 | 0 | 12 Jenis | 102.976.940 |
| 1 | 02 | 16 | 125 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Cigadung | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 13.714.400 | 13.714.400 | 0 | 12 Jenis | 15.085.840 |
| 1 | 02 | 16 | 126 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Panghegar | - Jumlah pelayanan sesuai SPM | - Jumlah pelayanan sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 130.061.750 | 130.061.750 | 0 | 12 Jenis | 143.067.925 |
| 1 | 02 | 16 | 127 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Sukagalih | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | - Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 242.921.256 | 242.921.256 | 0 | 12 Jenis | 267.213.381 |
| 1 | 02 | 16 | 128 | Kegiatan Penurunan AKI AKB (DAK) | | | | | 6.725.475.000 | 6.725.475.000 | 0 | | 7.398.022.500 |
| 1 | 02 | 16 | 129 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Salam | | | | | 129.920.000 | 129.920.000 | 0 | | 142.912.000 |
| 1 | 02 | 16 | 130 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Cinambo | - Jumlah pelayanan sesuai SPM | - Jumlah pelayanan sesuai SPM | 12 Jenis | 12 Jenis | 139.946.700 | 139.946.700 | 0 | 12 Jenis | 153.941.370 |
| 1 | 02 | 16 | | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase masalah gizi yang ditangani sesuai standar | Persentase masalah gizi yang ditangani sesuai standar | 79,24 % | 79,24 % | 38.339.637.849 | 37.677.755.000 | (661.882.849) | 79,24 % | 41.445.530.500 |
| 1 | 02 | 16 | 043 | Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) | | | | | 34.037.713.699 | 34.741.588.000 | 703.874.301 | | 38.215.746.800 |
| 1 | 02 | 16 | 044 | Kegiatan Jaminan Persalinan (DAK) | | | | | 2.885.196.000 | 2.885.196.000 | 0 | | 3.173.715.600 |
| 1 | 02 | 16 | 060 | Kegiatan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) | | | | | 1.416.728.150 | 50.971.000 | (1.365.757.150) | | 56.068.100 |
| 1 | 02 | 19 | | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri | Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri | 67,9 % | 67,9 % | 973.547.130 | 973.547.130 | 0 | 67,9 % | 1.070.901.843 |
| 1 | 02 | 19 | 002 | Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat | - Jumlah masyarakat (individu) yang mendapatkan penyuluhan di RSKIA | - Jumlah masyarakat (individu) yang mendapatkan penyuluhan di RSKIA | 7700 orang | 7700 orang | 529.067.130 | 529.067.130 | 0 | 7700 orang | 581.973.843 |
| 1 | 02 | 19 | 010 | Kegiatan Promosi Kesehatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan | - Jumlah Fasyankes yang mendapat pembinaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat - Jumlah Jenis Publikasi KIE kepada Masyarakat | - Jumlah Fasyankes yang mendapat pembinaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat - Jumlah Jenis Publikasi KIE kepada Masyarakat | 125 Fasyankes 6 Dokumen | 125 Fasyankes 6 Dokumen | 444.480.000 | 444.480.000 | 0 | 125 Fasyankes 6 Dokumen | 488.928.000 |

| 1 | 02 | 23 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar | 38,59 % | 38,59 % | 10.278.939.000 | 10.278.939.000 | 0 | 38,59 % | 11.306.832.900 | |
|---|----|----|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 1 | 02 | 23 | 001 | Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan | - Jumlah Dokumen standar pelayanan kesehatan RSKGM | - Jumlah Dokumen standar pelayanan kesehatan RSKGM | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 81.360.000 | 81.360.000 | 0 | 1 Dokumen | 89.496.000 |
| 1 | 02 | 23 | 007 | Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit | - Level akreditasi | - Level akreditasi | Paripurna Level | Paripurna Level | 848.295.000 | 848.295.000 | 0 | Paripurna Level | 933.124.500 |
| 1 | 02 | 23 | 011 | Kegiatan Akreditasi Puskesmas (DAK) | | | | | 8.610.822.000 | 8.610.822.000 | 0 | | 9.471.904.200 |
| 1 | 02 | 23 | 019 | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | - Jumlah fasilitas kesehatan yang memenuhi standar | - Jumlah fasilitas kesehatan yang memenuhi standar | 142 Faskes | 142 Faskes | 67.540.000 | 67.540.000 | 0 | 142 Faskes | 74.294.000 |
| 1 | 02 | 23 | 020 | Kegiatan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Dasar | - Jumlah FKTP (Puskesmas dan Klinik Pratama) sesuai standar - Jumlah fasilitas HATTRA yang dibina | - Jumlah FKTP (Puskesmas dan Klinik Pratama) sesuai standar - Jumlah fasilitas HATTRA yang dibina | 91 Faskes 155 Hattra | 91 Faskes 155 Hattra | 386.312.000 | 386.312.000 | 0 | 91 Faskes 155 Hattra | 424.943.200 |
| 1 | 02 | 23 | 021 | Kegiatan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Lanjutan | - Jumlah FKRTL (RS dan Klinik Utama) sesuai standar - Jumlah Laboratorium Klinik sesuai standar | - Jumlah FKRTL (RS dan Klinik Utama) sesuai standar - Jumlah Laboratorium Klinik sesuai standar | 21 Faskes 19 klinik | 21 Faskes 19 klinik | 284.610.000 | 284.610.000 | 0 | 21 Faskes 19 klinik | 313.071.000 |
| 1 | 02 | 26 | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata -rev | persentase sarana prasarana RS Daerah milik pemerintah yang memenuhi standar | persentase sarana prasarana RS Daerah milik pemerintah yang memenuhi standar | 87,33 % | 87,33 % | 22.349.046.200 | 22.349.046.200 | 0 | 87,33 % | 24.583.950.820 | |
| 1 | 02 | 26 | 001 | Kegiatan Pembangunan Rumah sakit | - Jumlah dokumen DED gedung parkir RSKIA | - Jumlah dokumen DED gedung parkir RSKIA | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.091.732.400 | 15.091.732.400 | 0 | 1 Dokumen | 16.600.905.640 |
| 1 | 02 | 26 | 017 | Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah sakit | - Jumlah unit bangunan RSUD yang direhab | - Jumlah unit bangunan RSUD yang direhab | 5 Unit | 5 Unit | 5.320.000.000 | 5.320.000.000 | 0 | 5 Unit | 5.852.000.000 |
| 1 | 02 | 26 | 023 | Kegiatan Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit | - Jumlah porsi penyediaan makanan dan minuman pasien | - Jumlah porsi penyediaan makanan dan minuman pasien | 75000 porsi | 75000 porsi | 1.537.313.800 | 1.537.313.800 | 0 | 75000 porsi | 1.691.045.180 |
| 1 | 02 | 26 | 034 | Kegiatan Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit | - Jumlah unit/instalasi yang mendapat mebeulair RSKIA | - Jumlah unit/instalasi yang mendapat mebeulair RSKIA | 4 Ruang layanan | 4 Ruang layanan | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | 4 Ruang layanan | 440.000.000 |
| 1 | 02 | 26 | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | persentase sarana dan prasarana RS daerah milik pemerintah yang memenuhi standar | persentase sarana dan prasarana RS daerah milik pemerintah yang memenuhi standar | 93 % | 93 % | 18.504.648.999 | 77.271.020.690 | 58.766.371.691 | 93 % | 84.998.122.759 | |
| 1 | 02 | 26 | 027 | Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (DAK) | | | | | 7.304.648.999 | 7.304.649.000 | 1 | | 8.035.113.900 |
| 1 | 02 | 26 | 032 | Pengadaan Alat Alat Kesehatan (Banprov) | | | | | 10.000.000.000 | 50.228.695.439 | 40.228.695.439 | | 55.251.564.983 |
| 1 | 02 | 26 | 033 | Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Banprov) | | | | | 1.200.000.000 | 19.737.676.251 | 18.537.676.251 | | 21.711.443.876 |
| 1 | 02 | 27 | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | persentase Sarana Prasarana RS Daerah milik pemerintah yang sesuai standar | persentase Sarana Prasarana RS Daerah milik pemerintah yang sesuai standar | 87,33 % | 87,33 % | 7.234.233.000 | 7.234.233.000 | 0 | 87,33 % | 7.957.656.300 | |
| 1 | 02 | 27 | 001 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit | - Jumlah ruangan RSKGM yang memenuhi standar | - Jumlah ruangan RSKGM yang memenuhi standar | 14 unit | 14 unit | 2.643.880.000 | 2.643.880.000 | 0 | 14 unit | 2.908.268.000 |
| 1 | 02 | 27 | 017 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit | - Jumlah alat kesehatan RSUD yang memenuhi standar | - Jumlah alat kesehatan RSUD yang memenuhi standar | 1210 Unit | 1210 Unit | 4.590.353.000 | 4.590.353.000 | 0 | 1210 Unit | 5.049.388.300 |
| 1 | 02 | 36 | Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan | Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan | Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan | 100 % | 100 % | 4.355.062.400 | 4.355.062.400 | 0 | 100 % | 4.790.568.640 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|--|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1 | 02 | 36 | 003 | Kegiatan Pengembangan data dan informasi pembangunan kesehatan | - Jumlah Puskesmas yang mendapat Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan - Jumlah Faskes yang menerapkan SPGDT | - Jumlah Puskesmas yang mendapat Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan - Jumlah Faskes yang menerapkan SPGDT | 80 Puskesmas 15 Faskes | 80 Puskesmas 15 Faskes | 4.153.072.400 | 4.153.072.400 | 0 | 80 Puskesmas 15 Faskes | 4.568.379.640 |
| 1 | 02 | 36 | 006 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan | - Dokumen perencanaan pembangunan kesehatan - Dokumen Evaluasi pembangunan kesehatan | - Dokumen perencanaan pembangunan kesehatan - Dokumen Evaluasi pembangunan kesehatan | 8 Dokumen 7 Dokumen | 8 Dokumen 7 Dokumen | 201.990.000 | 201.990.000 | 0 | 8 Dokumen 7 Dokumen | 222.189.000 |
| 1 | 02 | 47 | | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan | Persentase kecamatan dengan puskesmas yang memenuhi kriteria WHO | Persentase kecamatan dengan puskesmas yang memenuhi kriteria WHO | 70 % | 70 % | 37.491.543.100 | 37.287.643.580 | (203.899.520) | 70 % | 41.016.407.938 |
| 1 | 02 | 47 | 001 | Kegiatan Rehabilitasi Total Fasilitas Kesehatan | - Jumlah Unit Puskesmas yang direhabilitasi total | - Jumlah Unit Puskesmas yang direhabilitasi total | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 25.175.861.300 | 25.175.861.300 | 0 | 10 Dokumen | 27.693.447.430 |
| 1 | 02 | 47 | 003 | Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan | - Jumlah sarana & prasarana yang dipenuhi | - Jumlah sarana & prasarana yang dipenuhi | 7 Jenis | 7 Jenis | 529.720.500 | 529.720.500 | 0 | 7 Jenis | 582.692.550 |
| 1 | 02 | 47 | 005 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | - Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara | - Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara | 7 Unit | 7 Unit | 778.464.700 | 778.464.700 | 0 | 7 Unit | 856.311.170 |
| 1 | 02 | 47 | 006 | Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan | - Jumlah Fasilitas Kesehatan yang direhabilitasi | - Jumlah Fasilitas Kesehatan yang direhabilitasi | 23 Unit | 23 Unit | 11.007.496.600 | 10.803.597.080 | (203.899.520) | 23 Unit | 11.883.956.788 |
| 1 | 02 | 51 | | Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat | Persentase masyarakat miskin yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan | Persentase masyarakat miskin yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan | 100 % | 100 % | 238.288.765.740 | 235.334.740.940 | (2.954.024.800) | 100 % | 258.868.215.034 |
| 1 | 02 | 51 | 004 | Kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat | - Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan | - Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan | 407668 Orang | 407668 Orang | 177.999.999.660 | 177.999.999.660 | 0 | 407668 Orang | 195.799.999.626 |
| 1 | 02 | 51 | 005 | Kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin | - Jumlah Masyarakat miskin yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan | - Jumlah Masyarakat miskin yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan | 251259 Orang | 251259 Orang | 60.288.766.080 | 57.334.741.280 | (2.954.024.800) | 251259 Orang | 63.068.215.408 |
| 1 | 02 | 55 | | Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan | persentase jenis layanan laboratorium yang sesuai standar | persentase jenis layanan laboratorium yang sesuai standar | 100 % | 100 % | 4.678.326.000 | 4.678.326.000 | 0 | 100 % | 5.146.158.600 |
| 1 | 02 | 55 | 002 | Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan (DID) | | | | | 4.678.326.000 | 4.678.326.000 | 0 | | 5.146.158.600 |
| 1 | 02 | 56 | | Program Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu | persentasi warga yang mendapat pelayanan gawat darurat | persentasi warga yang mendapat pelayanan gawat darurat | 1.60 % | 1.60 % | 4.489.305.000 | 4.489.305.000 | 0 | 1.60 % | 4.938.235.500 |
| 1 | 02 | 56 | 002 | Kegiatan Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (DID) | | | | | 4.489.305.000 | 4.489.305.000 | 0 | | 4.938.235.500 |
| 1 | 02 | 58 | | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Persentase penyakit tidak menular yang ditangani sesuai standar | Persentase penyakit tidak menular yang ditangani sesuai standar | 100 % | 100 % | 11.720.064.400 | 10.275.716.800 | (1.444.347.600) | 100 % | 11.303.288.480 |
| 1 | 02 | 58 | 001 | Kegiatan Kesehatan Jiwa dan Napza | - Jumlah penyakit gangguan jiwa yang ditangani sesuai standar | - Jumlah penyakit gangguan jiwa yang ditangani sesuai standar | 2500 Jiwa | 2500 Jiwa | 127.300.000 | 127.300.000 | 0 | 2500 Jiwa | 140.030.000 |
| 1 | 02 | 58 | 002 | Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | - Jumlah fasilitas kesehatan yang mampu melaksanakan tes HIV sesuai standar - Jumlah Penemuan kasus penyakit menular (HIV, TBC, DBD, Diare dan Pneumonia pada balita) - Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan pengobatan Tuberkulosis sesuai standar | - Jumlah fasilitas kesehatan yang mampu melaksanakan tes HIV sesuai standar - Jumlah Penemuan kasus penyakit menular (HIV, TBC, DBD, Diare dan Pneumonia pada balita) - Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan pengobatan Tuberkulosis sesuai standar | 66 Faskes 51674 kasus 59 Faskes | 66 Faskes 51674 kasus 59 Faskes | 572.275.000 | 572.275.000 | 0 | 66 Faskes 51674 kasus 59 Faskes | 629.502.500 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|---|---|---|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------|--|------------------------|
| 1 | 02 | 58 | 003 | Kegiatan Pencegahan dan pengendalian Gangguan Indra dan Fungsional | - Jumlah faskes yang mampu melaksanakan deteksi dini dan penanganan gangguan penglihatan | - Jumlah faskes yang mampu melaksanakan deteksi dini dan penanganan gangguan penglihatan | 50 Faskes | 50 Faskes | 82.500.000 | 82.500.000 | 0 | 50 Faskes | 90.750.000 |
| 1 | 02 | 58 | 004 | Kegiatan Peningkatan Imunisasi | - Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) - Jumlah yang diimunisasi dasar lengkap | - Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) - Jumlah yang diimunisasi dasar lengkap | 100 % 40342 Orang | 100 % 40342 Orang | 432.100.000 | 432.100.000 | 0 | 100 % 40342 Orang | 475.310.000 |
| 1 | 02 | 58 | 005 | Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah | - Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam - Jumlah Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) | - Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam - Jumlah Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) | 100 % 11 kasus | 100 % 11 kasus | 53.322.400 | 53.322.400 | 0 | 100 % 11 kasus | 58.654.640 |
| 1 | 02 | 58 | 006 | Pelayanan Kesehatan Matra | - Jumlah Jemaah Haji yang dilayani - Jumlah kesehatan matra yang terpantau dan direspon | - Jumlah Jemaah Haji yang dilayani - Jumlah kesehatan matra yang terpantau dan direspon | 2464 Orang 20 kegiatan | 2464 Orang 20 kegiatan | 317.770.000 | 317.770.000 | 0 | 2464 Orang 20 kegiatan | 349.547.000 |
| 1 | 02 | 58 | 007 | Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | - Jumlah Puskesmas yang mampu melaksanakan kegiatan pengendalian terpadu PTM - Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memiliki SOP penanganan penyakit tidak menular (hipertensi & DM) sesuai standar dan menyampaikan laporan ke dinas kesehatan - Jumlah penanganan kasus hipertensi sesuai standar - Jumlah penanganan kasus Diabetes Mellitus (DM) sesuai standar | - Jumlah Puskesmas yang mampu melaksanakan kegiatan pengendalian terpadu PTM - Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memiliki SOP penanganan penyakit tidak menular (hipertensi & DM) sesuai standar dan menyampaikan laporan ke dinas kesehatan - Jumlah penanganan kasus hipertensi sesuai standar - Jumlah penanganan kasus Diabetes Mellitus (DM) sesuai standar | 30 Puskesmas 70 Faskes 75000 kasus 3900 kasus | 30 Puskesmas 70 Faskes 75000 kasus 3900 kasus | 316.015.000 | 316.015.000 | 0 | 30 Puskesmas 70 Faskes 75000 kasus 3900 kasus | 347.616.500 |
| 1 | 02 | 58 | 008 | Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK) | | | | | 0 | 6.974.434.400 | 6.974.434.400 | | 7.671.877.840 |
| 1 | 02 | 58 | 009 | Kegiatan Pendukung Peningkatan Imunisasi (DAK) | | | | | 0 | 1.400.000.000 | 1.400.000.000 | | 1.540.000.000 |
| 1 | 02 | 59 | | Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan | Persentase Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan | Persentase Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan | 77.40 % | 77.40 % | 96.352.622.716 | 96.352.622.716 | 0 | 77.40 % | 105.987.884.988 |
| 1 | 02 | 59 | 001 | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Dan Regulasi Kesehatan | - Jumlah dokumen rancangan produk hukum daerah - Jumlah rekomendasi izin tenaga dan fasilitas kesehatan | - Jumlah dokumen rancangan produk hukum daerah - Jumlah rekomendasi izin tenaga dan fasilitas kesehatan | 4 Dokumen 200 laporan | 4 Dokumen 200 laporan | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 | 4 Dokumen 200 laporan | 198.000.000 |
| 1 | 02 | 59 | 003 | Kegiatan Peningkatan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga | - Jumlah IRTP yang memiliki sertifikat P-IRT | - Jumlah IRTP yang memiliki sertifikat P-IRT | 200 ijin | 200 ijin | 88.000.000 | 88.000.000 | 0 | 200 ijin | 96.800.000 |
| 1 | 02 | 59 | 004 | Kegiatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan | - Jumlah Obat sesuai standar di RSUD - Jumlah Jenis perbekalan kesehatan sesuai standar di Dinas Kesehatan | - Jumlah Obat sesuai standar di RSUD - Jumlah Jenis perbekalan kesehatan sesuai standar di Dinas Kesehatan | 41 Jenis 3 Jenis | 41 Jenis 3 Jenis | 93.721.516.927 | 93.721.516.927 | 0 | 41 Jenis 3 Jenis | 103.093.668.620 |
| 1 | 02 | 59 | 005 | Kegiatan Standarisasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan | - Jumlah Tenaga Kesehatan RSKIA yang mengikuti Diklat dan tersertifikasi | - Jumlah Tenaga Kesehatan RSKIA yang mengikuti Diklat dan tersertifikasi | 130 orang | 130 orang | 2.357.749.789 | 2.357.749.789 | 0 | 130 orang | 2.593.524.768 |
| 1 | 02 | 59 | 008 | Kegiatan Penatalaksanaan Kefarmasian dan Alat Kesehatan | | | | | 5.356.000 | 5.356.000 | 0 | | 5.891.600 |
| 1 | 02 | 60 | | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persentase rekomendasi IKL yang ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Wali Kota | Persentase rekomendasi IKL yang ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Wali Kota | 100 % | 100 % | 667.799.360 | 667.799.360 | 0 | 100 % | 734.579.296 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----|--|--|--|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 1 | 02 | 60 | 001 | Kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat Masyarakat | | | | | | 177.307.360 | 177.307.360 | 0 | | 195.038.096 |
| 1 | 02 | 60 | 001 | Kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat Masyarakat | - Jumlah Dokumen Rekomendasi IKL yang dihasilkan | - Jumlah Dokumen Rekomendasi IKL yang dihasilkan | 5 Dokumen | 5 Dokumen | | 490.492.000 | 490.492.000 | 0 | 5 Dokumen | 539.541.200 |
| 1 | 02 | 61 | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah | Persentase Rata-rata Nilai IKM | Persentase Rata-rata Nilai IKM | 79 Nilai | 79 Nilai | 317.333.174.093 | 317.333.356.638 | | 182.545 | 79 Nilai | 349.066.692.302 |
| 1 | 02 | 61 | 001 | Kegiatan Pelayanan BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah | - IKM BLUD | - IKM BLUD | 79 Nilai | 79 Nilai | | 4.958.624.000 | 4.958.624.000 | 0 | 79 Nilai | 5.454.486.400 |
| 1 | 02 | 61 | 002 | Kegiatan Pelayanan BLUD UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (P2KT) | - IKM BLUD | - IKM BLUD | 79 Nilai | 79 Nilai | | 261.963.000 | 261.963.000 | 0 | 79 Nilai | 288.159.300 |
| 1 | 02 | 61 | 003 | Kegiatan Pelayanan BLUD | | | | | | 23.807.724.000 | 23.807.724.000 | 0 | | 26.188.496.400 |
| 1 | 02 | 61 | 004 | Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS CARINGIN | - IKM BLUD | - IKM BLUD | 79 Nilai | 79 Nilai | | 2.508.865.000 | 2.508.865.000 | 0 | 79 Nilai | 2.759.751.500 |
| 1 | 02 | 61 | 005 | Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS CIBIRU | - IKM BLUD | - IKM BLUD | 79 Nilai | 79 Nilai | | 2.148.561.000 | 2.148.561.000 | 0 | 79 Nilai | 2.363.417.100 |
| 1 | 02 | 61 | 006 | Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS CINAMBO | - IKM BLUD | - IKM BLUD | 79 Nilai | 79 Nilai | | 1.147.056.000 | 1.147.056.000 | 0 | 79 Nilai | 1.261.761.600 |
| 1 | 02 | 61 | 007 | Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS CIPAMOKOLAN | - IKM BLUD | - IKM BLUD | 79 Nilai | 79 Nilai | | 1.700.453.000 | 1.700.453.000 | 0 | 79 Nilai | 1.870.498.300 |
| 1 | 02 | 61 | 008 | Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS CITARIP | - IKM BLUD | - IKM BLUD | 79 Nilai | 79 Nilai | | 3.143.403.000 | 3.143.403.000 | 0 | 79 Nilai | 3.457.743.300 |
| 1 | 02 | 61 | 009 | Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS CIUMBULEUIT | - IKM BLUD | - IKM BLUD | 79 Nilai | 79 Nilai | | 2.853.142.000 | 2.853.142.000 | 0 | 79 Nilai | 3.138.456.200 |
| 1 | 02 | 61 | 010 | Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS GARUDA | - IKM BLUD | - IKM BLUD | 79 Nilai | 79 Nilai | | 5.069.282.000 | 5.069.282.000 | 0 | 79 Nilai | 5.576.210.200 |
| 1 | 02 | 61 | 011 | Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS GRIYA ANTAPANI | - IKM BLUD | - IKM BLUD | 79 Nilai | 79 Nilai | | 1.037.495.000 | 1.037.495.000 | 0 | 79 Nilai | 1.141.244.500 |
| 1 | 02 | 61 | 012 | Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS KUJANGSARI | - IKM BLUD | - IKM BLUD | 79 Nilai | 79 Nilai | | 1.747.470.000 | 1.747.470.000 | 0 | 79 Nilai | 1.922.217.000 |
| 1 | 02 | 61 | 013 | Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS NEGLASARI | - IKM BLUD | - IKM BLUD | 79 Nilai | 79 Nilai | | 1.870.127.000 | 1.870.127.000 | 0 | 79 Nilai | 2.057.139.700 |
| 1 | 02 | 61 | 014 | Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS PADASUKA | - IKM BLUD | - IKM BLUD | 79 Nilai | 79 Nilai | | 4.492.919.000 | 4.492.919.000 | 0 | 79 Nilai | 4.942.210.900 |
| 1 | 02 | 61 | 015 | Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS PAGARSIH | - IKM BLUD | - IKM BLUD | 79 % | 79 % | | 1.724.651.093 | 1.724.833.638 | 182.545 | 79 % | 1.897.317.002 |
| 1 | 02 | 61 | 016 | Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS PASIRKALIKI | - IKM BLUD | - IKM BLUD | 79 Nilai | 79 Nilai | | 4.906.880.000 | 4.906.880.000 | 0 | 79 Nilai | 5.397.568.000 |
| 1 | 02 | 61 | 017 | Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS PASUNDAN | - IKM BLUD | - IKM BLUD | 79 Nilai | 79 Nilai | | 1.823.370.000 | 1.823.370.000 | 0 | 79 Nilai | 2.005.707.000 |
| 1 | 02 | 61 | 018 | Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS PUTER | - IKM BLUD | - IKM BLUD | 79 Nilai | 79 Nilai | | 3.030.828.000 | 3.030.828.000 | 0 | 79 Nilai | 3.333.910.800 |
| 1 | 02 | 61 | 019 | Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS SALAM | - IKM BLUD | - IKM BLUD | 79 Nilai | 79 Nilai | | 744.780.000 | 744.780.000 | 0 | 79 Nilai | 819.258.000 |
| 1 | 02 | 61 | 020 | Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS SINDANGJAYA | - IKM BLUD | - IKM BLUD | 79 Nilai | 79 Nilai | | 1.393.201.000 | 1.393.201.000 | 0 | 79 Nilai | 1.532.521.100 |
| 1 | 02 | 61 | 021 | Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS SUKAJADI | - IKM BLUD | - IKM BLUD | 79 Nilai | 79 Nilai | | 2.710.490.000 | 2.710.490.000 | 0 | 79 Nilai | 2.981.539.000 |
| 1 | 02 | 61 | 022 | Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS SUKARASA | - IKM BLUD | - IKM BLUD | 79 Nilai | 79 Nilai | | 1.881.562.000 | 1.881.562.000 | 0 | 79 Nilai | 2.069.718.200 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|---|---|---|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------|--------------|-----------------------|
| 1 | 02 | 61 | 023 | Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS TALAGABODAS | - IKM BLUD | - IKM BLUD | 79 Nilai | 79 Nilai | 1.637.084.000 | 1.637.084.000 | 0 | 79 Nilai | 1.800.792.400 |
| 1 | 02 | 61 | 024 | Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS TAMBLONG | - IKM BLUD | - IKM BLUD | 79 Nilai | 79 Nilai | 1.216.870.000 | 1.216.870.000 | 0 | 79 Nilai | 1.338.557.000 |
| 1 | 02 | 61 | 025 | Kegiatan Pelayanan BLUD UPT RUMAH SAKIT KESEHATAN GIGI MULUT (RSKGM) | - persentase rata rata ikm | - persentase rata rata ikm | 79 Nilai | 79 Nilai | 17.000.000.000 | 17.000.000.000 | 0 | 79 Nilai | 18.700.000.000 |
| 1 | 02 | 61 | 026 | Kegiatan Pelayanan BLUD UPT RUMAH SAKIT KESEHATAN IBU DAN ANAK (RSKIA) | - Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD RSKIA | - Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD RSKIA | 79 Nilai | 79 Nilai | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | 0 | 79 Nilai | 110.000.000.000 |
| 1 | 02 | 61 | 027 | Kegiatan Pelayanan BLUD UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UJUNG BERUNG (RSUD) | - IKM BLUD | - IKM BLUD | 79 Nilai | 79 Nilai | 121.000.000.000 | 121.000.000.000 | 0 | 79 Nilai | 133.100.000.000 |
| 1 | 02 | 61 | 028 | Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS ARCAMANIK | - IKM BLUD | - IKM BLUD | 79 Nilai | 79 Nilai | 1.516.374.000 | 1.516.374.000 | 0 | 79 Nilai | 1.668.011.400 |
| 1 | 02 | 62 | | Program Pola Pengelolaan UPT. Kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Tata laksana Keuangan Yang Sehat | Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Tata laksana Keuangan Yang Sehat | 100 % | 100 % | 57.644.448.173 | 57.644.448.173 | 0 | 100 % | 63.408.892.990 |
| 1 | 02 | 62 | 001 | Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Bidang Kesehatan | - Jumlah Laporan Keuangan Bidang Kesehatan yang Akuntabel | - Jumlah Laporan Keuangan Bidang Kesehatan yang Akuntabel | 344 laporan | 344 laporan | 57.644.448.173 | 57.644.448.173 | 0 | 344 laporan | 63.408.892.990 |

Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertanian

Total Pagu : 402.107.164.678

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | | | | |
|----------|---|--|--|---|--|---|-------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------|
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | | | | | |
| (1) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1 | 04 | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | |
| 1 | 04 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | |
| 1 | 04 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Layanan Administrasi | Cakupan Layanan Administrasi | 100 % | 100 % | 9.537.486.996 | 9.537.486.996 | 0 | 100 % | 10.491.235.696 | |
| 1 | 04 | 01 | 002 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik | - Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik | 12 Jasa Bulanan | 12 Jasa Bulanan | 1.100.230.314 | 1.100.230.314 | 0 | 12 Jasa Bulanan | 1.210.253.345 |
| 1 | 04 | 01 | 003 | Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor | - Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 2 kali | 2 kali | 21.090.000 | 21.090.000 | 0 | 2 kali | 23.199.000 |
| 1 | 04 | 01 | 006 | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | - Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya | - Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya | 108 Unit | 108 Unit | 237.083.630 | 237.083.630 | 0 | 108 Unit | 260.791.993 |
| 1 | 04 | 01 | 008 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | - Jumlah jasa kebersihan kantor | - Jumlah jasa kebersihan kantor | 12 Jasa Bulanan | 12 Jasa Bulanan | 4.100.781.565 | 4.100.781.565 | 0 | 12 Jasa Bulanan | 4.510.859.722 |
| 1 | 04 | 01 | 009 | Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | - jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | - jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | 8 jenis | 8 jenis | 489.185.500 | 489.185.500 | 0 | 8 jenis | 538.104.050 |
| 1 | 04 | 01 | 010 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | - Jumlah laporan bulanan penyediaan ATK | - Jumlah laporan bulanan penyediaan ATK | 12 laporan | 12 laporan | 199.994.737 | 199.994.737 | 0 | 12 laporan | 219.994.211 |
| 1 | 04 | 01 | 011 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | - Jumlah jenis cetakan dan penggandaan | - Jumlah jenis cetakan dan penggandaan | 17 jenis | 17 jenis | 225.216.500 | 225.216.500 | 0 | 17 jenis | 247.738.150 |
| 1 | 04 | 01 | 012 | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - Jumlah laporan penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan | - Jumlah laporan penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan | 12 laporan | 12 laporan | 67.474.750 | 67.474.750 | 0 | 12 laporan | 74.222.225 |
| 1 | 04 | 01 | 014 | Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4 jenis | 4 jenis | 118.800.000 | 118.800.000 | 0 | 4 jenis | 130.680.000 |
| 1 | 04 | 01 | 015 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - Jumlah penyediaan bahan bacaan | - Jumlah penyediaan bahan bacaan | 16 jenis | 16 jenis | 67.284.000 | 67.284.000 | 0 | 16 jenis | 74.012.400 |
| 1 | 04 | 01 | 017 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | - Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman | - Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman | 12 laporan | 12 laporan | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | 12 laporan | 440.000.000 |
| 1 | 04 | 01 | 018 | Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | - Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah | - Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 750.000.000 | 750.000.000 | 0 | 12 Bulan | 825.000.000 |
| 1 | 04 | 01 | 019 | Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran | - Jumlah penyediaan jasa tenaga pendukung bulanan | - Jumlah penyediaan jasa tenaga pendukung bulanan | 12 Jasa Bulanan | 12 Jasa Bulanan | 365.436.000 | 365.436.000 | 0 | 12 Jasa Bulanan | 401.979.600 |
| 1 | 04 | 01 | 020 | Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor | - Jumlah jasa pengamanan kantor | - Jumlah jasa pengamanan kantor | 26 Org | 26 Org | 1.394.910.000 | 1.394.910.000 | 0 | 26 Org | 1.534.401.000 |
| 1 | 04 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | 90 % | 90 % | 11.424.566.192 | 11.424.566.192 | 0 | 90 % | 12.567.022.812 | |
| 1 | 04 | 02 | 012 | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur | - Tersedianya perlengkapan dan peralatan aparatur | - Tersedianya perlengkapan dan peralatan aparatur | 6 jenis | 6 jenis | 310.402.620 | 310.402.620 | 0 | 6 jenis | 341.442.882 |
| 1 | 04 | 02 | 022 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | - Jumlah pemeliharaan gedung kantor | - Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 1 gedung | 1 gedung | 3.145.360.157 | 3.145.360.157 | 0 | 1 gedung | 3.459.896.173 |
| 1 | 04 | 02 | 024 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | - Jumlah kendaraan dinas oprasional terpelihara | - Jumlah kendaraan dinas oprasional terpelihara | 76 Unit | 76 Unit | 5.418.372.600 | 5.418.372.600 | 0 | 76 Unit | 5.960.209.860 |
| 1 | 04 | 02 | 049 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana | - Jumlah Kendaraan Operasional yang dikelola | - Jumlah Kendaraan Operasional yang dikelola | 44 Unit | 44 Unit | 2.550.430.815 | 2.550.430.815 | 0 | 44 Unit | 2.805.473.897 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|---|--|--|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------|----------------|------------------------|
| 1 | 04 | 03 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparatur | Tingkat disiplin aparatur | 100 % | 100 % | 117.521.250 | 117.521.250 | 0 | 100 % | 129.273.375 |
| 1 | 04 | 03 | 002 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | - Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya | - Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya | 185 Stel | 185 Stel | 117.521.250 | 117.521.250 | 0 | 185 Stel | 129.273.375 |
| 1 | 04 | 05 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Tingkat disiplin aparatur | Tingkat disiplin aparatur | 100 % | 100 % | 172.975.000 | 172.975.000 | 0 | 100 % | 190.272.500 |
| 1 | 04 | 05 | 004 | Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur | - Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur | - Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur | 185 Org | 185 Org | 172.975.000 | 172.975.000 | 0 | 185 Org | 190.272.500 |
| 1 | 04 | 15 | | Program Pengembangan Perumahan | | | 67.70 % | 67.70 % | 3.742.923.000 | 3.742.923.000 | 0 | 67.70 % | 4.117.215.300 |
| 1 | 04 | 15 | 020 | Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (DAK) | - Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani | - Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani | 205 Unit | 205 Unit | 3.742.923.000 | 3.742.923.000 | 0 | 205 Unit | 4.117.215.300 |
| 1 | 04 | 20 | | Program Penataan Kawasan Permukiman | Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh | 3.96 % | 3.96 % | 52.223.634.975 | 52.223.634.975 | 0 | 3.96 % | 57.445.998.473 |
| 1 | 04 | 20 | 004 | Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman | - Infrastruktur Permukiman yang terpelihara | - Infrastruktur Permukiman yang terpelihara | 80 Titik | 80 Titik | 1.472.369.450 | 1.472.369.450 | 0 | 80 Titik | 1.619.606.395 |
| 1 | 04 | 20 | 005 | Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman | - Jumlah dokumen pengawasan | - Jumlah dokumen pengawasan | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 1.166.817.500 | 1.166.817.500 | 0 | 9 Dokumen | 1.283.499.250 |
| 1 | 04 | 20 | 006 | Kegiatan Peningkatan Penerangan Jalan Lingkungan | - Jumlah Penerangan Jalan Lingkungan | - Jumlah Penerangan Jalan Lingkungan | 1431 titik | 1431 titik | 6.255.266.246 | 6.255.266.246 | 0 | 1431 titik | 6.880.792.871 |
| 1 | 04 | 20 | 007 | Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan | - Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan | - Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan | 11163 m2 | 11163 m2 | 12.402.842.320 | 12.402.842.320 | 0 | 11163 m2 | 13.643.126.552 |
| 1 | 04 | 20 | 008 | Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan | - Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan | - Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan | 1376 m2 | 1376 m2 | 2.456.785.696 | 2.456.785.696 | 0 | 1376 m2 | 2.702.464.266 |
| 1 | 04 | 20 | 009 | Kegiatan Pendukung Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat | - Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat | - Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat | 30 lokasi | 30 lokasi | 711.321.920 | 711.321.920 | 0 | 30 lokasi | 782.454.112 |
| 1 | 04 | 20 | 010 | Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar | - Jumlah sarana Air Bersih yang di bangun | - Jumlah sarana Air Bersih yang di bangun | 112 lokasi | 112 lokasi | 22.966.401.593 | 22.966.401.593 | 0 | 112 lokasi | 25.263.041.752 |
| 1 | 04 | 20 | 011 | Kegiatan Perencanaan kawasan permukiman | - Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman | - Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman | 26 Dokumen | 26 Dokumen | 4.791.830.250 | 4.791.830.250 | 0 | 26 Dokumen | 5.271.013.275 |
| 1 | 04 | 26 | | Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas | Presentase PSU milik pemerintah Kota Bandung dalam kondisi baik | Presentase PSU milik pemerintah Kota Bandung dalam kondisi baik | 100 % | 100 % | 17.284.214.992 | 17.284.214.992 | 0 | 100 % | 19.012.636.491 |
| 1 | 04 | 26 | 001 | Kegiatan Pemeliharaan Elemen Estetika Kota | - Elemen estetika kota yang terpelihara | - Elemen estetika kota yang terpelihara | 117 lokasi | 117 lokasi | 4.484.585.070 | 4.484.585.070 | 0 | 117 lokasi | 4.933.043.577 |
| 1 | 04 | 26 | 002 | Kegiatan Penataan Elemen Estetika Kota | - Elemen estetika kota yang tertata | - Elemen estetika kota yang tertata | 4 lokasi | 4 lokasi | 1.389.974.750 | 1.389.974.750 | 0 | 4 lokasi | 1.528.972.225 |
| 1 | 04 | 26 | 003 | Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas | - Jumlah dokumen perencanaan PSU | - Jumlah dokumen perencanaan PSU | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.138.230.172 | 1.138.230.172 | 0 | 2 Dokumen | 1.252.053.189 |
| 1 | 04 | 26 | 004 | Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Prasarana Sarana dan Utilitas | - Jumlah dokumen pengawasan | - Jumlah dokumen pengawasan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 271.425.000 | 271.425.000 | 0 | 1 Dokumen | 298.567.500 |
| 1 | 04 | 26 | 005 | Kegiatan Pengalihan Hak Prasarana, Sarana dan Utilitas | - Jumlah Pengembang Perumahan yang hak PSU RTH dan sarana prasarannya beralih | - Jumlah Pengembang Perumahan yang hak PSU RTH dan sarana prasarannya beralih | 6 lokasi | 6 lokasi | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 0 | 6 lokasi | 11.000.000.000 |
| 1 | 04 | 27 | | Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan | Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) menempati hunian yang layak | Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) menempati hunian yang layak | 67.70 % | 67.70 % | 104.301.769.946 | 104.301.769.946 | 0 | 67.70 % | 114.731.946.941 |
| 1 | 04 | 27 | 001 | Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | - Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani | - Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani | 1000 Unit | 1000 Unit | 23.478.788.145 | 23.478.788.145 | 0 | 1000 Unit | 25.826.666.960 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|---|---|---|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| 1 | 04 | 27 | 002 | Kegiatan Pembangunan Perumahan Sederhana Sehat | - Jumlah sarana dan prasarana dasar perumahan sederhana sehat | - Jumlah sarana dan prasarana dasar perumahan sederhana sehat | 2 lokasi | 2 lokasi | 71.140.800.000 | 71.140.800.000 | 0 | 2 lokasi | 78.254.880.000 |
| 1 | 04 | 27 | 003 | Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Perumahan | - Jumlah dokumen pengawasan | - Jumlah dokumen pengawasan | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 3.071.181.800 | 3.071.181.800 | 0 | 8 Dokumen | 3.378.299.980 |
| 1 | 04 | 27 | 004 | Kegiatan Pengelolaan Rumah Susun | - Jumlah rumah susun yang dikelola | - Jumlah rumah susun yang dikelola | 10 gedung | 10 gedung | 5.611.000.001 | 5.611.000.001 | 0 | 10 gedung | 6.172.100.001 |
| 1 | 04 | 27 | 005 | Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Perumahan | - Jumlah dokumen perencanaan | - Jumlah dokumen perencanaan | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 5 Dokumen | 1.100.000.000 |
| 2 | | | | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | |
| 2 | 04 | | | Pertanahan | | | | | | | | | |
| 2 | 04 | 16 | | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Persentase luasan RTH | Persentase luasan RTH | 12.215 % | 12.215 % | 107.304.374.657 | 107.304.374.657 | 0 | 12.215 % | 118.034.812.123 |
| 2 | 04 | 16 | 270 | Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Perkantoran | - Jumlah aset Tanah untuk perkantoran | - Jumlah aset Tanah untuk perkantoran | 15 lokasi | 15 lokasi | 69.045.000.000 | 69.045.000.000 | 0 | 15 lokasi | 75.949.500.000 |
| 2 | 04 | 16 | 271 | Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum | - Jumlah aset Tanah untuk fasilitas umum | - Jumlah aset Tanah untuk fasilitas umum | 4 lokasi | 4 lokasi | 25.485.000.000 | 25.485.000.000 | 0 | 4 lokasi | 28.033.500.000 |
| 2 | 04 | 16 | 272 | Kegiatan Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Kota Bandung | - Jumlah dokumen untuk pelayanan sewa tanah | - Jumlah dokumen untuk pelayanan sewa tanah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.640.667.500 | 1.640.667.500 | 0 | 1 Dokumen | 1.804.734.250 |
| 2 | 04 | 16 | 273 | Kegiatan Pemuktahiran Database Sewa Tanah Milik Daerah | - Database sewa tanah milik Daerah | - Database sewa tanah milik Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 224.092.000 | 224.092.000 | 0 | 1 Dokumen | 246.501.200 |
| 2 | 04 | 16 | 275 | Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan | - Jumlah pengawasan dan pengendalian pertanahan | - Jumlah pengawasan dan pengendalian pertanahan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.342.794.270 | 2.342.794.270 | 0 | 1 Dokumen | 2.577.073.697 |
| 2 | 04 | 16 | 281 | Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk RTH | - Jumlah dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk RTH | - Jumlah dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk RTH | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 1.480.000.000 | 1.480.000.000 | 0 | 18 Dokumen | 1.628.000.000 |
| 2 | 04 | 16 | 282 | Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk RTH | - Jumlah persiapan pengadaan lahan untuk RTH | - Jumlah persiapan pengadaan lahan untuk RTH | 18 Kali | 18 Kali | 235.240.000 | 235.240.000 | 0 | 18 Kali | 258.764.000 |
| 2 | 04 | 16 | 283 | Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk RTH | - Jumlah aset Pemerintah Kota Bandung untuk RTH | - Jumlah aset Pemerintah Kota Bandung untuk RTH | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 856.159.187 | 856.159.187 | 0 | 18 Dokumen | 941.775.106 |
| 2 | 04 | 16 | 284 | Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Perkantoran | - Jumlah dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk perkantoran | - Jumlah dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk perkantoran | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 770.000.000 | 770.000.000 | 0 | 8 Dokumen | 847.000.000 |
| 2 | 04 | 16 | 285 | Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Perkantoran | - Jumlah persiapan pengadaan lahan untuk perkantoran | - Jumlah persiapan pengadaan lahan untuk perkantoran | 8 kali | 8 kali | 937.800.000 | 937.800.000 | 0 | 8 kali | 1.031.580.000 |
| 2 | 04 | 16 | 286 | Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Perkantoran | - Jumlah aset Pemerintah Kota Bandung untuk perkantoran | - Jumlah aset Pemerintah Kota Bandung untuk perkantoran | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | 8 Dokumen | 550.000.000 |
| 2 | 04 | 16 | 287 | Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum | - Jumlah dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk fasilitas umum | - Jumlah dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk fasilitas umum | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 225.000.000 | 225.000.000 | 0 | 1 Dokumen | 247.500.000 |
| 2 | 04 | 16 | 288 | Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum | - Jumlah persiapan pengadaan lahan untuk fasilitas umum | - Jumlah persiapan pengadaan lahan untuk fasilitas umum | 1 kali | 1 kali | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 1 kali | 165.000.000 |
| 2 | 04 | 16 | 289 | Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum | - Jumlah aset Pemerintah Kota Bandung untuk fasilitas umum | - Jumlah aset Pemerintah Kota Bandung untuk fasilitas umum | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | 1 Dokumen | 550.000.000 |
| 2 | 04 | 16 | 290 | Kegiatan Analisa dan Studi Kelayakan Pertanahan | - Jumlah dokumen hasil analisa dan studi kelayakan pertanahan | - Jumlah dokumen hasil analisa dan studi kelayakan pertanahan | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 1.950.000.000 | 1.950.000.000 | 0 | 3 Dokumen | 2.145.000.000 |
| 2 | 04 | 16 | 291 | Kegiatan Penanganan Konflik-konflik Pertanahan | - Jumlah masalah pertanahan yang tertangani | - Jumlah masalah pertanahan yang tertangani | 25 kasus | 25 kasus | 962.621.700 | 962.621.700 | 0 | 25 kasus | 1.058.883.870 |
| 2 | 05 | | | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | |
| 2 | 05 | 24 | | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Persentase RTH yang berkualitas | Persentase RTH yang berkualitas | 50.31 % | 50.31 % | 88.182.164.670 | 76.982.164.670 | (11.200.000.000) | 50.31 % | 84.680.381.137 |
| 2 | 05 | 24 | 005 | Kegiatan Penataan RTH | - Jumlah taman, median dan jalur hijau jalan yang tertata | - Jumlah taman, median dan jalur hijau jalan yang tertata | 51 lokasi | 51 lokasi | 6.610.346.589 | 6.610.346.589 | 0 | 51 lokasi | 7.271.381.247 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|---|---|---|--------------|--------------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------------|
| 2 | 05 | 24 | 006 | Kegiatan Pemeliharaan RTH | - Jumlah taman, median dan jalur hijau jalan dalam kondisi baik | - Jumlah taman, median dan jalur hijau jalan dalam kondisi baik | 150 lokasi | 150 lokasi | 34.559.742.213 | 34.559.742.213 | 0 | 150 lokasi | 38.015.716.434 |
| 2 | 05 | 24 | 029 | Kegiatan Pengelolaan Taman Rekreasi | - Taman Tegallega dalam kondisi baik | - Taman Tegallega dalam kondisi baik | 196567 M2 | 196567 M2 | 42.113.746.000 | 30.913.746.000 | (11.200.000.000) | 196567 M2 | 34.005.120.600 |
| 2 | 05 | 24 | 030 | Kegiatan Pemeliharaan, Pengawasan, Pengendalian dan Penghijauan Pohon | - Pemeliharaan Pohon dan Penghijauan di Kota Bandung | - Pemeliharaan Pohon dan Penghijauan di Kota Bandung | 30 Kecamatan | 30 Kecamatan | 3.262.560.156 | 3.262.560.156 | 0 | 30 Kecamatan | 3.588.816.172 |
| 2 | 05 | 24 | 031 | Kegiatan Penyediaan Bibit Tanaman | - Jumlah Bibit Tanaman | - Jumlah Bibit Tanaman | 7697 bibit | 7697 bibit | 1.335.808.962 | 1.335.808.962 | 0 | 7697 bibit | 1.469.389.858 |
| 2 | 05 | 24 | 032 | Kegiatan Perencanaan RTH | - Jumlah Dokumen perencanaan | - Jumlah Dokumen perencanaan | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 299.960.750 | 299.960.750 | 0 | 5 Dokumen | 329.956.825 |

Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 1.05.02 Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Total Pagu : 40.497.994.789

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
|----------------|---|---|---|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | | |
| (1) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | | | | | | | | | |
| 1 05 | Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | |
| 1 05 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | 100 % | 6.007.471.569 | 6.007.471.569 | | 0 100 % | 6.608.218.726 |
| 1 05 01 002 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik | - Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik | 12 laporan | 12 laporan | 556.724.380 | 556.724.380 | | 0 12 laporan | 612.396.818 |
| 1 05 01 003 | Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor | - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 12 laporan | 12 laporan | 720.347.600 | 720.347.600 | | 0 12 laporan | 792.382.360 |
| 1 05 01 006 | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | - Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya | - Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya | 58 unit | 58 unit | 627.694.000 | 627.694.000 | | 0 58 unit | 690.463.400 |
| 1 05 01 008 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | - Jumlah penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | - Jumlah penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 8 Orang | 8 Orang | 425.840.800 | 425.840.800 | | 0 8 Orang | 468.424.880 |
| 1 05 01 009 | Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | - Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki | - Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki | 42 Unit | 42 Unit | 95.700.000 | 95.700.000 | | 0 42 Unit | 105.270.000 |
| 1 05 01 010 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | - Jumlah Penyediaan ATK | - Jumlah Penyediaan ATK | 24 Jenis | 24 Jenis | 101.513.400 | 101.513.400 | | 0 24 Jenis | 111.664.740 |
| 1 05 01 011 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | - Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Penggandaan | - Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Penggandaan | 7 jenis | 7 jenis | 103.019.679 | 103.019.679 | | 0 7 jenis | 113.321.647 |
| 1 05 01 012 | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - Jumlah laporan penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan | - Jumlah laporan penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan | 7 jenis | 7 jenis | 19.811.100 | 19.811.100 | | 0 7 jenis | 21.792.210 |
| 1 05 01 013 | Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor | - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 12 jenis | 12 jenis | 954.381.400 | 954.381.400 | | 0 12 jenis | 1.049.819.540 |
| 1 05 01 014 | Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12 laporan | 12 laporan | 257.458.870 | 257.458.870 | | 0 12 laporan | 283.204.757 |
| 1 05 01 015 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan | - Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan | 12 laporan | 12 laporan | 173.360.000 | 173.360.000 | | 0 12 laporan | 190.696.000 |
| 1 05 01 017 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | - Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman | - Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman | 12 laporan | 12 laporan | 320.204.340 | 320.204.340 | | 0 12 laporan | 352.224.774 |
| 1 05 01 018 | Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | - Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah | - Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah | 12 laporan | 12 laporan | 814.470.000 | 814.470.000 | | 0 12 laporan | 895.917.000 |
| 1 05 01 020 | Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor | - Jumlah Jasa Bulanan Pengamanan Kantor Bulanan | - Jumlah Jasa Bulanan Pengamanan Kantor Bulanan | 17 Orang | 17 Orang | 836.946.000 | 836.946.000 | | 0 17 Orang | 920.640.600 |
| 1 05 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik | Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik | 75 % | 75 % | 1.164.780.960 | 1.164.780.960 | | 0 75 % | 1.281.259.056 |
| 1 05 02 022 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | - Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | - Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 5 gedung | 5 gedung | 164.252.000 | 164.252.000 | | 0 5 gedung | 180.677.200 |
| 1 05 02 042 | Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | - Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi | - Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi | 5 gedung | 5 gedung | 1.000.528.960 | 1.000.528.960 | | 0 5 gedung | 1.100.581.856 |
| 1 05 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai | Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai | 91,64 % | 91,64 % | 1.331.832.700 | 1.331.832.700 | | 0 91,64 % | 1.465.015.970 |
| 1 05 03 002 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | - Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | - Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 120 Stel | 120 Stel | 512.981.700 | 512.981.700 | | 0 120 Stel | 564.279.870 |
| 1 05 03 003 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | - Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | - Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | 350 Stel | 350 Stel | 509.905.000 | 509.905.000 | | 0 350 Stel | 560.895.500 |
| 1 05 03 005 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | - Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | - Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | 350 Stel | 350 Stel | 308.946.000 | 308.946.000 | | 0 350 Stel | 339.840.600 |
| 1 05 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangny | Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangny | 100 % | 100 % | 343.014.400 | 343.014.400 | | 0 100 % | 377.315.840 |
| 1 05 05 004 | Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur | - Persentase layanan data dan informasi | - Persentase layanan data dan informasi | 100 % | 100 % | 343.014.400 | 343.014.400 | | 0 100 % | 377.315.840 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|---|---|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1 | 05 | 08 | | Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah | Persentase Layanan Data dan Informasi | Persentase Layanan Data dan Informasi | 80 % | 80 % | 324.427.500 | 324.427.500 | 0 | 80 % | 356.870.250 |
| 1 | 05 | 08 | 001 | Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah | - Laporan dokumen data lingkup kebakaran dan kebencanaan | - Laporan dokumen data lingkup kebakaran dan kebencanaan | 1 aplikasi | 1 aplikasi | 324.427.500 | 324.427.500 | 0 | 1 aplikasi | 356.870.250 |
| 1 | 05 | 27 | | Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana | Persentase Kelurahan Siaga Aktif Kebakaran dan Bencana | Persentase Kelurahan Siaga Aktif Kebakaran dan Bencana | 15 % | 15 % | 1.302.379.700 | 1.302.379.700 | 0 | 15 % | 1.432.617.670 |
| 1 | 05 | 27 | 002 | Kegiatan Penyuluhan Pencegahan bahaya kebakaran dan bencana | - Jumlah Penyuluhan Kebakaran dan Bencana | - Jumlah Penyuluhan Kebakaran dan Bencana | 31 kelurahan | 31 kelurahan | 579.408.500 | 579.408.500 | 0 | 31 kelurahan | 637.349.350 |
| 1 | 05 | 27 | 004 | Kegiatan Pembinaan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana | - Jumlah Kader Kelurahan Siaga Aktif Kebakaran dan Bencana yang Terbina | - Jumlah Kader Kelurahan Siaga Aktif Kebakaran dan Bencana yang Terbina | 2100 orang | 2100 orang | 440.541.700 | 440.541.700 | 0 | 2100 orang | 484.595.870 |
| 1 | 05 | 27 | 005 | Kegiatan Penyusunan, Sosialisasi dan Pengawasan Peraturan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana | - Jumlah bangunan dan gedung yang diawasi dan diperiksa alat pemadam dan proteksi kebakaran baik aktif maupun pasif serta alat proteksi kebakaran di kawasan pemukiman - Jumlah Penyusunan Peraturan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana | - Jumlah bangunan dan gedung yang diawasi dan diperiksa alat pemadam dan proteksi kebakaran baik aktif maupun pasif serta alat proteksi kebakaran di kawasan pemukiman - Jumlah Penyusunan Peraturan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana | 720 gedung 1 Produk hukum | 720 gedung 1 Produk hukum | 282.429.500 | 282.429.500 | 0 | 720 gedung 1 Produk hukum | 310.672.450 |
| 1 | 05 | 28 | | Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan | Tingkat waktu maksimum tanggap (Respons Time Rate) | Tingkat waktu maksimum tanggap (Respons Time Rate) | 15 menit | 15 menit | 14.118.688.100 | 14.118.688.100 | 0 | 15 menit | 15.530.556.910 |
| 1 | 05 | 28 | 001 | Kegiatan Pelayanan Pemadaman Operasi Pemadaman | - Persentase layanan pemadaman dan terdampak kebakaran dalam waktu tanggap | - Persentase layanan pemadaman dan terdampak kebakaran dalam waktu tanggap | 100 % | 100 % | 12.912.819.090 | 12.912.819.090 | 0 | 100 % | 14.204.100.999 |
| 1 | 05 | 28 | 002 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan | - Jumlah petugas pemadam yang mengikuti pelatihan Peningkatan Kapasitas | - Jumlah petugas pemadam yang mengikuti pelatihan Peningkatan Kapasitas | 576 Orang | 576 Orang | 507.011.900 | 507.011.900 | 0 | 576 Orang | 557.713.090 |
| 1 | 05 | 28 | 003 | Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban | - Persentase Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi kebakaran dan non kebakaran) dalam waktu tanggap | - Persentase Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi kebakaran dan non kebakaran) dalam waktu tanggap | 100 % | 100 % | 165.000.000 | 165.000.000 | 0 | 100 % | 181.500.000 |
| 1 | 05 | 28 | 004 | Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Utara | - Persentase layanan penanggulangan kebakaran dan bencana dalam waktu tanggap - Jumlah Sosialisasi penanggulangan kebakaran dan bencana kepada masyarakat | - Persentase layanan penanggulangan kebakaran dan bencana dalam waktu tanggap - Jumlah Sosialisasi penanggulangan kebakaran dan bencana kepada masyarakat | 100 % 31 Kelurahan | 100 % 31 Kelurahan | 135.633.450 | 135.633.450 | 0 | 100 % 31 Kelurahan | 149.196.795 |
| 1 | 05 | 28 | 005 | Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Barat | - Persentase layanan penanggulangan kebakaran dan bencana dalam waktu tanggap - Jumlah Sosialisasi penanggulangan kebakaran dan bencana kepada masyarakat | - Persentase layanan penanggulangan kebakaran dan bencana dalam waktu tanggap - Jumlah Sosialisasi penanggulangan kebakaran dan bencana kepada masyarakat | 100 % 31 Kelurahan | 100 % 31 Kelurahan | 136.259.400 | 136.259.400 | 0 | 100 % 31 Kelurahan | 149.885.340 |
| 1 | 05 | 28 | 006 | Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Timur | - Persentase layanan penanggulangan kebakaran dan bencana dalam waktu tanggap - Jumlah Sosialisasi penanggulangan kebakaran dan bencana kepada masyarakat | - Persentase layanan penanggulangan kebakaran dan bencana dalam waktu tanggap - Jumlah Sosialisasi penanggulangan kebakaran dan bencana kepada masyarakat | 100 % 8 Kelurahan | 100 % 8 Kelurahan | 134.341.760 | 134.341.760 | 0 | 100 % 8 Kelurahan | 147.775.936 |
| 1 | 05 | 28 | 007 | Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Selatan | - Persentase layanan penanggulangan kebakaran dan bencana dalam waktu tanggap - Jumlah Sosialisasi penanggulangan kebakaran dan bencana kepada masyarakat | - Persentase layanan penanggulangan kebakaran dan bencana dalam waktu tanggap - Jumlah Sosialisasi penanggulangan kebakaran dan bencana kepada masyarakat | 100 % 31 Kelurahan | 100 % 31 Kelurahan | 127.622.500 | 127.622.500 | 0 | 100 % 31 Kelurahan | 140.384.750 |
| 1 | 05 | 30 | | Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana lainnya | Persentase tersedianya Sarana Pengamanan Kebakaran di Kelurahan | Persentase tersedianya Sarana Pengamanan Kebakaran di Kelurahan | 1.65 % | 1.65 % | 22.585.980.080 | 14.585.980.080 | (8.000.000.000) | 1.65 % | 16.044.578.088 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|--|---|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 05 | 30 | 001 | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana lainnya | - Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana | - Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana | 14 jenis | 14 jenis | 19.430.735.400 | 11.430.735.400 | (8.000.000.000) | 14 jenis | 12.573.808.940 |
| 1 | 05 | 30 | 002 | Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana lainnya | - Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana | - Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana | 59 Unit | 59 Unit | 1.340.308.480 | 1.340.308.480 | 0 | 59 Unit | 1.474.339.328 |
| 1 | 05 | 30 | 004 | Kegiatan penataan sarana dan prasarana kawasan dan logistik | - Jumlah kawasan kumuh di kelurahan yang memiliki sarana pengamanan kebakaran | - Jumlah kawasan kumuh di kelurahan yang memiliki sarana pengamanan kebakaran | 2 kelurahan | 2 kelurahan | 1.814.936.200 | 1.814.936.200 | 0 | 2 kelurahan | 1.996.429.820 |
| 1 | 05 | 37 | | Program Penyelenggaraan Penanggulangan Prad dan Tanggap Darurat Bencana | Rata - Rata Tingkat Waktu Maksimum Assesment Tanggap Darurat Bencana | Rata - Rata Tingkat Waktu Maksimum Assesment Tanggap Darurat Bencana | 24 jam | 24 jam | 1.319.419.780 | 1.319.419.780 | 0 | 24 jam | 1.451.361.758 |
| 1 | 05 | 37 | 001 | Kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana | - jumlah aparaturn dan warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana - Jumlah Aparatur dan warga negara yang mendapat pelatihan kebencanaan | - jumlah aparaturn dan warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana - Jumlah Aparatur dan warga negara yang mendapat pelatihan kebencanaan | 200 Orang 200 Orang | 200 Orang 200 Orang | 642.566.600 | 642.566.600 | 0 | 200 Orang 200 Orang | 706.823.260 |
| 1 | 05 | 37 | 002 | Kegiatan Pelayanan Penanganan Darurat Bencana | - Persentase layanan tanggap darurat bencana kebakaran dalam waktu tanggap - Persentase tingkat waktu maksimum assesment tanggap darurat bencana | - Persentase layanan tanggap darurat bencana kebakaran dalam waktu tanggap - Persentase tingkat waktu maksimum assesment tanggap darurat bencana | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 232.615.000 | 232.615.000 | 0 | 100 % 100 % | 255.876.500 |
| 1 | 05 | 37 | 003 | Kegiatan Kerjasama bantuan penanggulangan bencana | - Persentase penyaluran kebutuhan dasar yang ditindaklanjuti | - Persentase penyaluran kebutuhan dasar yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % | 444.238.180 | 444.238.180 | 0 | 100 % | 488.661.998 |

Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Total Pagu : 136.000.405.590

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | | | Rencana Tahun 2020 | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | | | |
|----------|---|---|---|--|---|---|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | | | | | |
| (1) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 2 | | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | |
| 2 | 05 | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| 2 | 05 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 persen | 100 persen | 6.215.655.420 | 6.215.655.420 | 0 | 100 persen | 6.837.220.962 | |
| 2 | 05 | 01 | 002 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - Jumlah laporan penyediaan jasa bulanan telepon, koran, internet, air dan listrik | - Jumlah laporan penyediaan jasa bulanan telepon, koran, internet, air dan listrik | 12 laporan bulanan | 12 laporan bulanan | 326.705.400 | 326.705.400 | 0 | 12 laporan bulanan | 359.375.940 |
| 2 | 05 | 01 | 006 | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | - Jumlah laporan pemeliharaan dan pengurusan perijinan Kendaraan dinas atau Operasional | - Jumlah laporan pemeliharaan dan pengurusan perijinan Kendaraan dinas atau Operasional | 12 laporan bulanan | 12 laporan bulanan | 971.679.090 | 971.679.090 | 0 | 12 laporan bulanan | 1.068.846.999 |
| 2 | 05 | 01 | 010 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | - Jumlah laporan penyediaan ATK | - Jumlah laporan penyediaan ATK | 12 laporan bulanan | 12 laporan bulanan | 199.778.210 | 199.778.210 | 0 | 12 laporan bulanan | 219.756.031 |
| 2 | 05 | 01 | 011 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | - Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan bulanan | - Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan bulanan | 12 laporan bulanan | 12 laporan bulanan | 2.031.233.600 | 2.031.233.600 | 0 | 12 laporan bulanan | 2.234.356.960 |
| 2 | 05 | 01 | 013 | Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Jumlah unit peralatan dan perlengkapan yang diadakan | - Jumlah unit peralatan dan perlengkapan yang diadakan | 7 Unit | 7 Unit | 602.625.540 | 602.625.540 | 0 | 7 Unit | 662.888.094 |
| 2 | 05 | 01 | 014 | Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga bulanan | - Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga bulanan | 12 laporan bulanan | 12 laporan bulanan | 55.936.980 | 55.936.980 | 0 | 12 laporan bulanan | 61.530.678 |
| 2 | 05 | 01 | 017 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | - Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan | - Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan | 12 laporan bulanan | 12 laporan bulanan | 148.720.000 | 148.720.000 | 0 | 12 laporan bulanan | 163.592.000 |
| 2 | 05 | 01 | 018 | Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | - Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah | - Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 12 laporan bulanan | 12 laporan bulanan | 818.845.000 | 818.845.000 | 0 | 12 laporan bulanan | 900.729.500 |
| 2 | 05 | 01 | 019 | Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran | - Jumlah Laporan Kegiatan pembayaran Jasa Tenaga Pendukung | - Jumlah Laporan Kegiatan pembayaran Jasa Tenaga Pendukung | 12 laporan bulanan | 12 laporan bulanan | 1.060.131.600 | 1.060.131.600 | 0 | 12 laporan bulanan | 1.166.144.760 |
| 2 | 05 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | 100 persen | 100 persen | 4.141.541.564 | 4.141.541.564 | 0 | 100 persen | 4.555.695.720 | |
| 2 | 05 | 02 | 005 | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | - Pengadaan kendaraan roda 4 untuk pejabat struktural | - Pengadaan kendaraan roda 4 untuk pejabat struktural | 1 Unit | 1 Unit | 270.798.770 | 270.798.770 | 0 | 1 Unit | 297.878.647 |
| 2 | 05 | 02 | 010 | Kegiatan Pengadaan Mebeulair | - Pengadaan mebeulair kantor | - Pengadaan mebeulair kantor | 4 Jenis | 4 Jenis | 41.691.180 | 41.691.180 | 0 | 4 Jenis | 45.860.298 |
| 2 | 05 | 02 | 022 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | - Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 2 Paket | 2 Paket | 388.251.614 | 388.251.614 | 0 | 2 Paket | 427.076.775 |
| 2 | 05 | 02 | 028 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | - Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin Berkala/ Peralatan Gedung Kantor dan Gedung | - Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin Berkala/ Peralatan Gedung Kantor dan Gedung | 3 Paket | 3 Paket | 140.800.000 | 140.800.000 | 0 | 3 Paket | 154.880.000 |
| 2 | 05 | 02 | 042 | Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | - Jumlah gedung yang direhabilitasi | - Jumlah gedung yang direhabilitasi | 1 gedung | 1 gedung | 3.300.000.000 | 3.300.000.000 | 0 | 1 gedung | 3.630.000.000 |
| 2 | 05 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparatur | Tingkat disiplin aparatur | 100 persen | 100 persen | 60.500.000 | 60.500.000 | 0 | 100 persen | 66.550.000 | |
| 2 | 05 | 03 | 002 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | - Jumlah pakaian dinas beserta Perlengkapannya | - Jumlah pakaian dinas beserta Perlengkapannya | 70 Stel | 70 Stel | 60.500.000 | 60.500.000 | 0 | 70 Stel | 66.550.000 |
| 2 | 05 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100 persen | 100 persen | 276.600.000 | 276.600.000 | 0 | 100 persen | 304.260.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|--|--|--|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|--|------------------------|
| 2 | 05 | 05 | 003 | Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | - Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | - Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 70 Orang | 70 Orang | 276.600.000 | 276.600.000 | 0 | 70 Orang | 304.260.000 |
| 2 | 05 | 08 | | Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah | Persentase layanan data dan informasi | Persentase layanan data dan informasi | 100 persen | 100 persen | 205.840.000 | 205.840.000 | 0 | 100 persen | 226.424.000 |
| 2 | 05 | 08 | 001 | Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah | - Cakupan data yang dikompilasi dari bidang | - Cakupan data yang dikompilasi dari bidang | 100 % | 100 % | 205.840.000 | 205.840.000 | 0 | 100 % | 226.424.000 |
| 2 | 05 | 15 | | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Jumlah sampah yang dimanfaatkan dan di daur ulang di sumber sampah | Jumlah sampah yang dimanfaatkan dan di daur ulang di sumber sampah | 130735 ton | 130735 ton | 120.895.823.380 | 111.895.823.380 | (9.000.000.000) | 130735 ton | 123.085.405.718 |
| 2 | 05 | 15 | 002 | Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | - Jumlah jenis sarana persampahan yang diadakan | - Jumlah jenis sarana persampahan yang diadakan | 16 Jenis | 16 Jenis | 51.817.273.605 | 42.817.273.605 | (9.000.000.000) | 16 Jenis | 47.099.000.966 |
| 2 | 05 | 15 | 006 | Kegiatan Bimbingan Teknis Persampahan | - Jumlah pelatihan mengenai manajemen pengelolaan Bank Sampah dan metode pengolahan sampah | - Jumlah pelatihan mengenai manajemen pengelolaan Bank Sampah dan metode pengolahan sampah | 6 Jenis | 6 Jenis | 464.800.000 | 464.800.000 | 0 | 6 Jenis | 511.280.000 |
| 2 | 05 | 15 | 008 | Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Persampahan | - Jumlah laporan layanan pengelolaan sampah bulanan | - Jumlah laporan layanan pengelolaan sampah bulanan | 12 laporan bulanan | 12 laporan bulanan | 31.535.535.000 | 31.535.535.000 | 0 | 12 laporan bulanan | 34.689.088.500 |
| 2 | 05 | 15 | 011 | Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | - Jumlah KBS baru yang terbentuk | - Jumlah KBS baru yang terbentuk | 30 Kecamatan | 30 Kecamatan | 4.319.664.375 | 4.319.664.375 | 0 | 30 Kecamatan | 4.751.630.813 |
| 2 | 05 | 15 | 016 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan | - Jumlah komponen titik pantau yang disiapkan | - Jumlah komponen titik pantau yang disiapkan | 15 Komponen | 15 Komponen | 2.795.120.380 | 2.795.120.380 | 0 | 15 Komponen | 3.074.632.418 |
| 2 | 05 | 15 | 028 | Kegiatan Fasilitasi Edukasi Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan | - Jumlah sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata - Jumlah sekolah yang menerima pelatihan mengenai pengelolaan persampahan | - Jumlah sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata - Jumlah sekolah yang menerima pelatihan mengenai pengelolaan persampahan | 30 Sekolah 20 Sekolah | 30 Sekolah 20 Sekolah | 1.302.381.180 | 1.302.381.180 | 0 | 30 Sekolah 20 Sekolah | 1.432.619.298 |
| 2 | 05 | 15 | 029 | Kegiatan Pelaksanaan Tata Kelola Pengumpulan Sampah | - Terlaksananya pengumpulan sampah di jalan dan area publik | - Terlaksananya pengumpulan sampah di jalan dan area publik | 3 Bulan | 3 Bulan | 27.230.174.840 | 27.230.174.840 | 0 | 3 Bulan | 29.953.192.324 |
| 2 | 05 | 15 | 030 | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah | - Jumlah draft kebijakan yang dibuat | - Jumlah draft kebijakan yang dibuat | 3 Berkas | 3 Berkas | 1.430.874.000 | 1.430.874.000 | 0 | 3 Berkas | 1.573.961.400 |
| 2 | 05 | 17 | | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | Persentase kawasan konservasi terpelihara | Persentase kawasan konservasi terpelihara | 28,99 persen | 28,99 persen | 4.934.969.716 | 4.934.969.716 | 0 | 28,99 persen | 5.428.466.688 |
| 2 | 05 | 17 | 020 | Kegiatan Konservasi Keanekaragaman hayati | - Jumlah tanaman khas yang diadakan - Pembangunan Taman Kehati | - Jumlah tanaman khas yang diadakan - Pembangunan Taman Kehati | 1000 Pohon 1 lokasi | 1000 Pohon 1 lokasi | 2.657.292.806 | 2.657.292.806 | 0 | 1000 Pohon 1 lokasi | 2.923.022.087 |
| 2 | 05 | 17 | 021 | Kegiatan Konservasi Air Tanah | - Jumlah Sumur Resapan dalam yang dibuat - Jumlah sumur imbuhan ASR yang dibuat - Jumlah sumur pantau yang dibuat - Kajian hidrogeologi | - Jumlah Sumur Resapan dalam yang dibuat - Jumlah sumur imbuhan ASR yang dibuat - Jumlah sumur pantau yang dibuat - Kajian hidrogeologi | 11 Unit 8 Unit 1 Unit 1 Dokumen | 11 Unit 8 Unit 1 Unit 1 Dokumen | 1.809.421.910 | 1.809.421.910 | 0 | 11 Unit 8 Unit 1 Unit 1 Dokumen | 1.990.364.101 |
| 2 | 05 | 17 | 022 | Kegiatan Perlindungan Mata Air | - Jumlah pohon yang ditanam di wilayah tangkapan air - Jumlah mata air yang dipantau debitnya - Jumlah kawasan mata air yang dikonservasi | - Jumlah pohon yang ditanam di wilayah tangkapan air - Jumlah mata air yang dipantau debitnya - Jumlah kawasan mata air yang dikonservasi | 200 Pohon 10 Titik 5 lokasi | 200 Pohon 10 Titik 5 lokasi | 468.255.000 | 468.255.000 | 0 | 200 Pohon 10 Titik 5 lokasi | 515.080.500 |
| 2 | 05 | 32 | | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah B3 | Persentase Limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang terkelola | Persentase Limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang terkelola | 0,51 persen | 0,51 persen | 579.380.970 | 579.380.970 | 0 | 0,51 persen | 637.319.067 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|---|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 2 | 05 | 32 | 001 | Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | - Rekapitulasi data pelaku usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi ijin pengelolaan LB3 - Rekomendasi ijin pengelolaan LB3 | - Rekapitulasi data pelaku usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi ijin pengelolaan LB3 - Rekomendasi ijin pengelolaan LB3 | 1 Berkas 30 rekomendasi | 1 Berkas 30 rekomendasi | 177.589.920 | 177.589.920 | 0 | 1 Berkas 30 rekomendasi | 195.348.912 |
| 2 | 05 | 32 | 002 | Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3 | - Tersedianya dokumen DED pembangunan TPS Limbah B3 untuk industri UMKM | - Tersedianya dokumen DED pembangunan TPS Limbah B3 untuk industri UMKM | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 283.690.650 | 283.690.650 | 0 | 1 Dokumen | 312.059.715 |
| 2 | 05 | 32 | 003 | Kegiatan Pemantauan Kualitas Tanah | - Jumlah Laporan hasil uji kualitas tanah dan sludge | - Jumlah Laporan hasil uji kualitas tanah dan sludge | 20 Berkas | 20 Berkas | 118.100.400 | 118.100.400 | 0 | 20 Berkas | 129.910.440 |
| 2 | 05 | 33 | | Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup | Cakupan perlindungan kualitas lingkungan | Cakupan perlindungan kualitas lingkungan | 33.43 persen | 33.43 persen | 2.640.332.550 | 2.640.332.550 | 0 | 33.43 persen | 2.904.365.805 |
| 2 | 05 | 33 | 001 | Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup | - Jumlah pelaku usaha yang menaati aturan pengelolaan lingkungan | - Jumlah pelaku usaha yang menaati aturan pengelolaan lingkungan | 47 Pelaku Usaha | 47 Pelaku Usaha | 843.149.850 | 843.149.850 | 0 | 47 Pelaku Usaha | 927.464.835 |
| 2 | 05 | 33 | 002 | Kegiatan Penaatan dan penegakan hukum lingkungan | - Jumlah sanksi administrasi yang diberikan | - Jumlah sanksi administrasi yang diberikan | 8 Berkas | 8 Berkas | 901.004.600 | 901.004.600 | 0 | 8 Berkas | 991.105.060 |
| 2 | 05 | 33 | 003 | Kegiatan Penanganan Pengaduan lingkungan Hidup | - Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | - Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % | 896.178.100 | 896.178.100 | 0 | 100 % | 985.795.910 |
| 2 | 05 | 34 | | Program Pencegahan dampak lingkungan | Cakupan pencegahan dampak lingkungan akibat kebijakan dan usaha/kegiatan | Cakupan pencegahan dampak lingkungan akibat kebijakan dan usaha/kegiatan | 100 persen | 100 persen | 1.806.040.760 | 1.338.478.240 | (467.562.520) | 100 persen | 1.472.326.064 |
| 2 | 05 | 34 | 002 | Kegiatan Pengelolaan Dokumen Lingkungan | - Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) yang dikeluarkan | - Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) yang dikeluarkan | 200 Berkas | 200 Berkas | 334.495.400 | 334.495.400 | 0 | 200 Berkas | 367.944.940 |
| 2 | 05 | 34 | 003 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Dokumen Lingkungan | - Jumlah SDM Tim Komisi AMDAL yang meningkat | - Jumlah SDM Tim Komisi AMDAL yang meningkat | 40 Orang/Bulan | 40 Orang/Bulan | 300.592.000 | 300.592.000 | 0 | 40 Orang/Bulan | 330.651.200 |
| 2 | 05 | 34 | 004 | Kegiatan Perencanaan dan Penataan Lingkungan | - Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup | - Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 249.459.520 | 249.459.520 | 0 | 2 Dokumen | 274.405.472 |
| 2 | 05 | 34 | 005 | Penyusunan Standar, Norma, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup | - Dokumen Standar, Norma, Kebijakan dan Strategi Lingkungan Hidup yang dibuat | - Dokumen Standar, Norma, Kebijakan dan Strategi Lingkungan Hidup yang dibuat | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 453.931.320 | 453.931.320 | 0 | 1 Dokumen | 499.324.452 |
| 2 | 05 | 36 | | Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air | Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan" | Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan" | 41.30 persen | 41.30 persen | 1.278.374.800 | 1.278.374.800 | 0 | 41.30 persen | 1.406.212.280 |
| 2 | 05 | 36 | 001 | Kegiatan Pemantauan Kualitas Air | - Jumlah sungai yang dipantau | - Jumlah sungai yang dipantau | 16 Sungai | 16 Sungai | 596.012.000 | 596.012.000 | 0 | 16 Sungai | 655.613.200 |
| 2 | 05 | 36 | 002 | Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air | - Jumlah ijin pembuangan air limbah yang diverifikasi | - Jumlah ijin pembuangan air limbah yang diverifikasi | 34 Berkas | 34 Berkas | 682.362.800 | 682.362.800 | 0 | 34 Berkas | 750.599.080 |
| 2 | 05 | 37 | | Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim | Indeks S02 | Indeks S02 | 1.16 poin | 1.16 poin | 1.407.585.430 | 1.407.585.430 | 0 | 1.16 poin | 1.548.343.973 |
| 2 | 05 | 37 | 001 | Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | - Jumlah RW yang mengikuti Program Kampung Iklim - Jumlah Kantor yang menerapkan ecooffice dengan benar | - Jumlah RW yang mengikuti Program Kampung Iklim - Jumlah Kantor yang menerapkan ecooffice dengan benar | 2 RW 6 lokasi | 2 RW 6 lokasi | 453.589.000 | 453.589.000 | 0 | 2 RW 6 lokasi | 498.947.900 |
| 2 | 05 | 37 | 002 | Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara | - Jumlah Laporan Hasil Uji Kualitas Udara Ambien | - Jumlah Laporan Hasil Uji Kualitas Udara Ambien | 23 Berkas | 23 Berkas | 667.000.000 | 667.000.000 | 0 | 23 Berkas | 733.700.000 |
| 2 | 05 | 37 | 003 | Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara | - Jumlah pelaksanaan uji emisi | - Jumlah pelaksanaan uji emisi | 4 lokasi | 4 lokasi | 286.996.430 | 286.996.430 | 0 | 4 lokasi | 315.696.073 |

Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.05 Inspektorat

Total Pagu : 19.933.105.145

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
|----------------|--|--|--|---|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|---|----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | | |
| (1) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Urusan Penunjang | | | | | | | | | |
| 4 05 | Fungsi Penunjang Lainnya | | | | | | | | | |
| 4 05 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tercapainya layanan administrasi perkantoran penunjang urusan | Tercapainya layanan administrasi perkantoran penunjang urusan | 100 % | 100 % | 3.889.221.900 | 3.889.221.900 | 0 | 100 % | 4.278.144.090 |
| 4 05 01 001 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 laporan | 4 laporan | 12.750.000 | 12.750.000 | 0 | 4 laporan | 14.025.000 |
| 4 05 01 002 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - Laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik | - Laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik | 4 laporan | 4 laporan | 180.130.000 | 180.130.000 | 0 | 4 laporan | 198.143.000 |
| 4 05 01 003 | Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kantor Penunjang Kegiatan Administrasi Perkantoran | - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kantor Penunjang Kegiatan Administrasi Perkantoran | 4 Triwulan | 4 Triwulan | 239.808.800 | 239.808.800 | 0 | 4 Triwulan | 263.789.680 |
| 4 05 01 006 | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | - Jumlah biaya perizinan kendaraan dinas/operasional yang laik jalan | - Jumlah biaya perizinan kendaraan dinas/operasional yang laik jalan | 1 Tahun | 1 Tahun | 31.707.200 | 31.707.200 | 0 | 1 Tahun | 34.877.920 |
| 4 05 01 009 | Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | - Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja sehingga memberikan Peralatan yang siap pakai | - Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja sehingga memberikan Peralatan yang siap pakai | 1 Tahun | 1 Tahun | 53.355.000 | 53.355.000 | 0 | 1 Tahun | 58.690.500 |
| 4 05 01 010 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | - Pembelian alat tulis kantor | - Pembelian alat tulis kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | 219.984.600 | 219.984.600 | 0 | 1 Tahun | 241.983.060 |
| 4 05 01 011 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | - Jumlah barang cetakan dan penggandaan | - Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 1 Tahun | 1 Tahun | 109.064.000 | 109.064.000 | 0 | 1 Tahun | 119.970.400 |
| 4 05 01 012 | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - Jumlah tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor - Laporan penyediaan komponen instalasi listrik | - Jumlah tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor - Laporan penyediaan komponen instalasi listrik | 1 Tahun 12 laporan | 1 Tahun 12 laporan | 29.392.800 | 29.392.800 | 0 | 1 Tahun 12 laporan | 32.332.080 |
| 4 05 01 013 | Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Jumlah tersedianya alat perlengkapan kantor yang dibutuhkan - Jumlah pengadaan personal komputer - Jumlah pengadaan peralatan personal komputer - Jumlah pengadaan peralatan jaringan | - Jumlah tersedianya alat perlengkapan kantor yang dibutuhkan - Jumlah pengadaan personal komputer - Jumlah pengadaan peralatan personal komputer - Jumlah pengadaan peralatan jaringan | 1 Tahun 15 Unit 7 Buah 18 Buah | 1 Tahun 15 Unit 7 Buah 18 Buah | 199.952.500 | 199.952.500 | 0 | 1 Tahun 15 Unit 7 Buah 18 Buah | 219.947.750 |
| 4 05 01 014 | Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga | - Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga | 1 Tahun | 1 Tahun | 40.566.000 | 40.566.000 | 0 | 1 Tahun | 44.622.600 |
| 4 05 01 015 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan | - Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan | 12 Bulan | 12 Bulan | 37.886.000 | 37.886.000 | 0 | 12 Bulan | 41.674.600 |
| 4 05 01 017 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | - Laporan penyediaan makanan dan minuman | - Laporan penyediaan makanan dan minuman | 12 Bulan | 12 Bulan | 379.689.800 | 379.689.800 | 0 | 12 Bulan | 417.658.780 |
| 4 05 01 018 | Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | - Fasilitas kegiatan koordinasi, diklat, studi tiru, pemenuhan undangan ke luar daerah | - Fasilitas kegiatan koordinasi, diklat, studi tiru, pemenuhan undangan ke luar daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 | 0 | 12 Bulan | 1.485.000.000 |
| 4 05 01 023 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor | | | | | 1.004.935.200 | 1.004.935.200 | 0 | | 1.105.428.720 |
| 4 05 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur penunjang urusan | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur penunjang urusan | 100 % | 100 % | 27.449.433.013 | 1.141.035.300 | (26.308.397.712) | 100 % | 1.255.138.830 |
| 4 05 02 003 | Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor | - Pembangunan Gedung Kantor Bertingkat Sederhana | - Pembangunan Gedung Kantor Bertingkat Sederhana | 1 Paket | 1 Paket | 26.308.397.713 | 0 | (26.308.397.712) | 1 Paket | 0 |
| 4 05 02 022 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | - Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 1 laporan | 1 laporan | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 1 laporan | 165.000.000 |
| 4 05 02 024 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | - Jumlah kendaraan dinas operasional terpelihara | - Jumlah kendaraan dinas operasional terpelihara | 32 Unit | 32 Unit | 991.035.300 | 991.035.300 | 0 | 32 Unit | 1.090.138.830 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|--|--|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| 4 | 05 | 05 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah kegiatan pembinaan kinerja aparatur | Jumlah kegiatan pembinaan kinerja aparatur | 80.50 % | 80.50 % | 407.065.800 | 407.065.800 | 0 | 80.50 % | 447.772.380 |
| 4 | 05 | 05 | 004 | Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur | - Laporan kegiatan pembinaan kinerja aparatur | - Laporan kegiatan pembinaan kinerja aparatur | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 407.065.800 | 407.065.800 | 0 | 1 Dokumen | 447.772.380 |
| 4 | 05 | 53 | | Program peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah | Tercapainya pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan | Tercapainya pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan | 100 % | 100 % | 1.416.685.900 | 1.416.685.900 | 0 | 100 % | 1.558.354.490 |
| 4 | 05 | 53 | 001 | Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala | - Prosentase OPD yg di audit berdasarkan PKPT | - Prosentase OPD yg di audit berdasarkan PKPT | 100 % | 100 % | 255.000.000 | 255.000.000 | 0 | 100 % | 280.500.000 |
| 4 | 05 | 53 | 003 | Kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan | - Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti - Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti | - Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti - Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti | 5,24 % 11,31 % | 5,24 % 11,31 % | 365.365.000 | 365.365.000 | 0 | 5,24 % 11,31 % | 401.901.500 |
| 4 | 05 | 53 | 004 | Kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif | - Jumlah laporan hasil pengawasan yang di ekspose/laporan gelar pengawasan | - Jumlah laporan hasil pengawasan yang di ekspose/laporan gelar pengawasan | 1 laporan | 1 laporan | 324.524.950 | 324.524.950 | 0 | 1 laporan | 356.977.445 |
| 4 | 05 | 53 | 005 | Kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan | - Jumlah LKIP yang direviu (pemekot) - Jumlah LKIP yang disusun (PD) - Jumlah PD yang dievaluasi AKIP - Jumlah entitas pelaporan yang direviu | - Jumlah LKIP yang direviu (pemekot) - Jumlah LKIP yang disusun (PD) - Jumlah PD yang dievaluasi AKIP - Jumlah entitas pelaporan yang direviu | 1 laporan 1 laporan 63 Perangkat Daerah 64 laporan | 1 laporan 1 laporan 63 Perangkat Daerah 64 laporan | 471.795.950 | 471.795.950 | 0 | 1 laporan 1 laporan 63 Perangkat Daerah 64 laporan | 518.975.545 |
| 4 | 05 | 54 | | Program dukungan Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi | Persentase Capaian Pelaksanaan Pengawasan | Persentase Capaian Pelaksanaan Pengawasan | 80 % | 80 % | 1.777.275.970 | 1.777.275.970 | 0 | 80 % | 1.955.003.567 |
| 4 | 05 | 54 | 001 | Kegiatan dukungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi | - Laporan pelaksanaan ZI, Reformasi birokrasi, TP4HD, Survey penilaian integritas | - Laporan pelaksanaan ZI, Reformasi birokrasi, TP4HD, Survey penilaian integritas | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.517.224.470 | 1.517.224.470 | 0 | 1 Dokumen | 1.668.946.917 |
| 4 | 05 | 54 | 002 | Kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah | - Dokumen pelaksanaan coaching clinic | - Dokumen pelaksanaan coaching clinic | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 16.980.000 | 16.980.000 | 0 | 1 Dokumen | 18.678.000 |
| 4 | 05 | 54 | 003 | Kegiatan Pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah daerah | - Dokumen pelaksanaan Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) | - Dokumen pelaksanaan Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 243.071.500 | 243.071.500 | 0 | 1 Dokumen | 267.378.650 |
| 4 | 05 | 55 | | Program peningkatan sistem pengawasan pemerintah daerah | Terpeliharanya sistem penunjang pengawasan | Terpeliharanya sistem penunjang pengawasan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 3.306.733.480 | 4.323.314.888 | 1.016.581.408 | 1 kegiatan | 4.755.646.377 |
| 4 | 05 | 55 | 004 | Kegiatan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | | | | | 144.134.000 | 144.134.000 | 0 | | 158.547.400 |
| 4 | 05 | 55 | 008 | Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (DID) | | | | | 2.170.400.000 | 2.736.981.408 | 566.581.408 | | 3.010.679.549 |
| 4 | 05 | 55 | 009 | Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (DID) | | | | | 992.199.480 | 1.442.199.480 | 450.000.000 | | 1.586.419.428 |